



- 100** **Dinamika Opini Publik terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Kasus Percakapan Media Sosial X)**
Abyzan Syahadin Bagja Dahana
- 125** **Kontestasi Wacana Figur Kemandirian Perempuan dalam Belenggu Masyarakat Patriarkal pada Film Yuni**
Syarifah Nur Aini, Awanis Akalili
- 147** **Representasi Kritik Sosial dalam Karikatur Serangan IDF terhadap Rumah Sakit As-Syifa Palestina**
Alam An Shori, Ummi Hasanah, Melinda Raswari Jambak
- 170** **Shared Identity and Trust among the Furry Fandom: A Narrative Review**
Rifqi Zuhdi Amarta, Dilah Ratna Kartika
- 187** **Komunikasi Inovasi Studi Implementasi Aplikasi I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi)**
Sulis, Fitria Ayuningtyas, Munadhil Abdul Muqsith
- 204** **MONOKULTURALISME DALAM TAYANGAN WEB SERIES ANIMASI ANAK NUSSA**
Muhammad Alzaki Tristi, Rani Attiqah Gusbet



Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia

Jurnal Media dan Komunikasi (JMKI) diterbitkan Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Terbit dua kali setahun, Maret dan September. JMKI didedikasikan untuk mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian, kajian, dan fenomena dalam Ilmu Komunikasi khususnya di Indonesia. Ruang lingkup manuskrip yang diterbitkan di JMKI adalah manifestasi dari visi Departemen Ilmu Komunikasi yaitu *"Crafting Well Informed Society."* JMKI mengundang para peneliti maupun praktisi dari berbagai disiplin keilmuan untuk menulis tentang kajian media dan komunikasi seperti jurnalisme dan media, media *entertainment*, periklanan, humas, *cultural studies*, *film studies*, dan *game studies*.

Editor in Chief

Rajiyem, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Deputy Editor in Chief

I Gusti Ngurah Putra, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Editorial Board

Budhi Widi Astuti, Universitas Kristen Satya Wacana

Widodo Agus Setianto, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Wisnu Prasetya Utomo, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Yudi Perbawaningsih, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Reviewer

Effendi Gazali, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Gregoria Arum Yudarwati, Universitas Atma Jaya

Hermin Indah Wahyuni, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Megandaru Widhi Kawuryan, Departemen of Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Muninggar Saraswati, Swiss German University

Novi Kurnia, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Nunung Prajarto, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Rajab Ritonga, Faculty of Communication Science, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Editorial Secretary

Jusuf Ariz Wahyuono, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Mailing Address

Departemen Ilmu Komunikasi

Jalan Sosio Yustisia No. 2 Bulaksumur

Yogyakarta 55281

Email: jmki@ugm.ac.id



Daftar ISI

Dinamika Opini Publik terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Kasus Percakapan Media Sosial X) Abyzan Syahadin Bagja Dahana	100
Kontestasi Wacana Figur Kemandirian Perempuan dalam Belunggu Masyarakat Patriarkal pada Film Yuni Syarifah Nur Aini, Awanis Akalili	125
Representasi Kritik Sosial dalam Karikatur Serangan IDF terhadap Rumah Sakit As-Syifa Palestina Alam An Shori, Ummi Hasanah, Melinda Raswari Jambak	147
Shared Identity and Trust among the Furry Fandom: A Narrative Review Rifqi Zuhdi Amarta, Dilah Ratna Kartika	170
Komunikasi Inovasi Studi Implementasi Aplikasi I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) Sulis, Fitria Ayuningtyas, Munadhil Abdul Muqsith	187
MONOKULTURALISME DALAM TAYANGAN WEB SERIES ANIMASI ANAK NUSSA Muhammad Alzaki Tristi, Rani Attiqah Gusbet	204

Dinamika Opini Publik terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Kasus Percakapan Media Sosial X)

Abyzan Syahadin Bagja Dahana

| Prodi Magister Ilmu Komunikasi, Fisipol – Universitas
Gadjah Mada. Email: abyzan.syahadin.b.d@mail.ugm.ac.id

Abstrak

This study aims to describe the dynamics of public opinion in X around the Personal Data Protection Law (UU PDP) that emerged before and after its ratification. Previous research on the UU PDP has only focused on normative juridical aspects but not on public opinion aspects. Though, research on public opinion is important because public opinion has the power to advocate. This study analyzed 3,374 tweets about the UU PDP published from January 24, 2020, to October 17, 2023. Researchers obtained the data using the scraping method using the Python Twscrape library based on the search keywords "Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi", "UU PDP", and "RUU PDP". This study adopts the sentiment analysis model of the Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier and found that neutral-tone tweets dominated conversations that arose before and after the president passes the UU PDP. A qualitative word cloud analysis shows that neutral-tone tweets are facts related to the UU PDP. Negative opinion dominated public opinion against the UU PDP in both conversation periods. The dynamics of public opinion towards the UU PDP reflect the digital movement of opinion (DMO). This is because the number of opinion tweets is volatile and always depends on the intensity of the facts and important momentum related to the UU PDP.

Keywords: *sentiment analysis, public opinion, Data Protection Law, UU PDP, X*

Pendahuluan

Opini publik lahir dari akal dan kesadaran manusia sebagai makhluk berdaya dan bebas sehingga dapat mewujudkan pemikirannya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya pada lingkungan yang mereka anggap baik (Khusna, 2016). Di era media massa, opini publik merupakan perwujudan hasil diskusi rata-rata individu dalam kelompok masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan yang disuarakan oleh media massa (Indrawan, 2017). Oleh sebab itu, opini publik dapat berfungsi sebagai sarana advokasi publik terhadap kebijakan yang pemerintah bentuk maupun berlakukan (Halawa, 2022; Jamil et al., 2022). Bahkan, opini publik yang disuarakan secara intens melalui media sosial, mampu menjadi gerakan sosial tersendiri (Barisione & Ceron, 2017). Dengan mengambil kasus seputar isu perlindungan data di Indonesia, khususnya pandangan publik terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penelitian ini mencoba mengeksplorasi lebih jauh dinamika dari opini publik seputar konteks kebijakan yang pemerintah Indonesia terapkan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mutu perlindungan data pribadi yang rendah (Annur, 2022; Dihni, 2022). Predikat tersebut merujuk kepada ketiadaan regulasi seputar perlindungan data pribadi sehingga pemerintah kerap mengambil langkah yang kurang selaras dengan fakta di lapangan saat mereka menangani kasus-kasus pelanggaran privasi digital. Hal tersebut pun menjadi celah bagi para pelanggar (Anggraeni, 2018; Delpiero et al., 2021; Rosadi & Pratama, 2018; Sautunnida, 2018). Dengan demikian, penanganan beragam kasus kejahatan siber yang terjadi mulai dari level individu (Annur, 2020; Kurnia et al., 2022) hingga level instansi (Purnamasari, 2023; Republika.id, 2022) kebanyakan berhenti pada upaya investigasi tanpa hasil (CNN Indonesia, 2021; Mahrus, 2020).

Selain itu, ada banyak contoh pelanggaran privasi di Indonesia yang justru memberikan konsekuensi hukum bagi para korbannya. Beberapa contohnya antara lain pemidanaan terhadap Florence Sihombing, mahasiswa pascasarjana UGM, dan Wisni Yetty, seorang IRT. Florence Sihombing memprotes sebuah layanan publik di Yogyakarta melalui akun media sosial Path miliknya, yang notabene merupakan ruang privat. Namun, temannya sendiri menyebarkan unggahan tersebut ke publik sehingga memicu tuntutan hukum dari pihak yang menganggap protesnya mencederai nama baik warga Yogyakarta. Sementara itu, Wisni Yetty melaporkan peristiwa KDRT oleh mantan suaminya, tetapi ia justru mendapat gugatan balik berdasarkan bukti komunikasi Facebook Wisni bersama temannya, yang notabene merupakan ranah privatnya (Nurlatifah, 2016).

Penegakkan keamanan privasi dan data di ranah digital Indonesia menjumpai angin segar setelah DPR RI mengesahkan RUU Nomor 27 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 20 September 2022. Pada 17 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan pemberlakuan UU PDP sehingga menjadikan UU PDP sebagai regulasi utama bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga privasi dan keamanan data digital (Finaka & Nurhanisah, 2020; Finaka et al., 2023).

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah diserahkan kepada DPR RI oleh lembaga/kementerian perumus pada 24 Januari 2020 (Finaka & Nurhanisah, 2020; Finaka et al., 2023). Hal itu mengindikasikan bahwa RUU PDP telah menjalani serangkaian proses evaluasi dan perbaikan dari anggota legislatif sebelum RUU PDP disahkan oleh DPR sebagai UU PDP. Oleh karena itu, publik sudah semestinya mengharapkan penerapan UU PDP dapat menunjang kinerja pemerintah dalam penanganan kejahatan siber, tak terkecuali menyangkut kebocoran data seiring makin maraknya penggunaan platform digital (Putri & Fahrozi, 2021) dan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan digital (Ayunda & Rusdianto, 2021; Disemadi, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika perlindungan data pribadi di Indonesia yang kemudian berujung kepada penyuaan atas urgensi UU PDP. Yuniarti (2019) dan Wicaksana et al. (2020) menganggap bahwa UU PDP dapat menjadi regulasi perlindungan data yang holistik. Hal ini karena regulasi perlindungan data di Indonesia selama ini masih sebatas peraturan sektoral sehingga belum ada satu regulasi utama yang menaungi seluruh regulasi dari sektor-sektor terpisah. Ayunda dan Rusdianto (2021) serta Disemadi (2021) menganggap bahwa di era maraknya penggunaan kecerdasan

buatan, regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi dapat memberikan batasan jelas bagi pemanfaatan data pribadi oleh penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Setiawan dan Najicha (2022) menganggap bahwa penerapan UU PDP oleh pemerintah dapat meningkatkan legitimasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang tegas menegakkan perlindungan data pribadi. Selain itu, Fadhli et al. (2022) memandang penerapan UU PDP dapat mengatasi ambiguitas dari definisi dan batasan data pribadi yang selama ini berpotensi disalahgunakan oleh layanan paylater. Kemudian, ada pula Delpiero et al. (2021) serta Rosadi dan Pratama (2018) yang menganggap bahwa UU PDP dapat memperjelas praktik pengamanan data dalam proses transaksi daring yang selama ini kerap terjadi kebocoran data.

Secara garis besar, penelitian terdahulu seputar UU PDP merupakan telaah regulasi, baik terhadap undang-undang terkait secara yuridis normatif ataupun terhadap literatur lain terkait praktik perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang secara langsung melibatkan publik sebagai sumber data kaitannya sebagai salah satu stakeholder dalam penerapan regulasi perlindungan data pribadi masalah nihil. Padahal, sejak wacana tentang RUU PDP sudah pemerintah munculkan ke publik pada 24 Januari 2020 hingga setelah pengesahan UU PDP pada 17 Oktober 2022 oleh presiden, pro dan kontra dari publik terus bermunculan. Ada pihak yang menganggap bahwa pemberlakuan UU PDP merupakan solusi bagi permasalahan, tapi tidak sedikit pula pihak yang meragukan efektivitas implementasinya (Elnizar, 2022; Nirbita, 2022; Saputra, 2022; The Conversation, 2022). Terlebih setelah UU PDP disahkan, aksi peretasan dan pembocoran data oleh peretas Bjorka justru marak terjadi (Bestari, 2023; Nainggolan, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengekskansi dan merefleksikan penelitian terdahulu terkait isu perlindungan data, khususnya perumusan dan pemberlakuan UU PDP sebagai regulasi perlindungan data di ranah siber Indonesia. Penelitian ini berfokus kepada percakapan daring di media sosial X yang menjadikan UU PDP sebagai topik utama. Peneliti memilih X karena X merupakan media sosial dengan algoritma yang memungkinkan para penggunanya untuk selalu mendapatkan informasi aktual atas isu terkini (Cahyono, 2017; Hartanto, 2017). Adapun penelitian ini mengusung pertanyaan penelitian “bagaimana dinamika opini publik yang terbentuk dalam percakapan media sosial X seputar eksistensi UU PDP di Indonesia?”.

Kerangka Pemikiran

Opini Publik

Opini publik tidak mencerminkan realitas langsung, tetapi konstruksi media yang memengaruhi persepsi individu terhadap suatu isu. Walter Lippmann, jurnalis dan pengamat politik, berpendapat bahwa opini publik adalah hasil dari pembentukan stereotip dan imaji yang media lakukan dan bukan pemikiran “murni” individu terhadap realitasnya (Lippmann, 1922). Sementara itu, Bernard Hennessy

berpendapat bahwa opini publik dibentuk oleh representasi media dan dipengaruhi oleh norma sosial dan iklim politik (Hennessy, 1965). Menurut Indrawan (2017), opini publik memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1) memungkinkan terjadinya pro dan kontra terutama sebelum tercapainya konsensus; 2) melibatkan lebih dari satu orang dalam proses perumusan dan penyampaian; 3) opini dikomunikasikan oleh publik secara terbuka; dan 4) opini bersifat terbuka untuk turut ditanggapi oleh pihak selain penyampai opini.

Dalam konteks kehidupan bernegara, opini publik merupakan kekuatan politik (Indrawan, 2017) dan tolok ukur “kesuksesan” penerapan sistem demokrasi oleh suatu negara (Khusna, 2016). Hal tersebut sebagaimana melekat kepada hakikat opini publik yang merupakan buah dari komunikasi dua arah dan timbal balik antara politisi/pemerintah dengan pesan politiknya dan masyarakat dengan opininya yang prosesnya diperantarai oleh media massa—atau kini oleh media sosial yang lebih bebas restriksi (Indrawan, 2017). Dengan demikian, salah satu manifestasi dalam penerapan opini publik adalah penyuaran pendapat masyarakat untuk menyikapi kinerja pemerintah, misalnya terhadap perumusan regulasi/kebijakan (Khusna, 2016) seperti halnya UU PDP yang menjadi fokus penelitian ini.

Digital Movement of Opinion (DMO) dalam Percakapan Media Sosial

Penelitian oleh Halawa (2022) dan Jamil et al. (2022) misalnya, menunjukkan bahwa penyuaran opini publik secara intens dapat berfungsi sebagai sarana advokasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Penyuaran opini oleh publik untuk menanggapi kebijakan pemerintah dapat publik lakukan dengan fleksibel melalui media sosial. Sifat media sosial yang bersifat terbuka dan mudah digunakan oleh siapa pun telah memungkinkan publik untuk menyampaikan opininya secara spontan dan impulsif sehingga mampu menciptakan ragam gerakan sosial baru bertajuk digital movement of opinion (DMO) (Barisione & Ceron, 2017).

DMO merupakan proses penyampaian opini yang spontan dan impulsif melalui media sosial oleh penggunanya terhadap suatu isu tanpa direspon oleh aktor utama sebagaimana gerakan sosial pada umumnya. Sifat DMO yang berupa opini impulsif membuat isu yang pengguna media sosial angkat menjadi berumur pendek. Ini karena pengguna media sosial cenderung akan langsung beralih ke isu lain yang menarik perhatiannya sehingga kemudian ia tidak melanjutkan penyampaian opini/gagasan terhadap isu sebelumnya. DMO lazim mengambil bentuk seperti komentar, balasan kepada unggahan, produksi meme, dan diskusi spontan lain daripada secara mendalam berfokus kepada tujuan spesifik (Eriyanto, 2019).

Barisione dan Ceron (2017) mengungkapkan bahwa DMO merupakan bentuk aktivisme yang mumpuni karena terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi asalkan mereka memiliki ketertarikan terhadap isu yang sama. Menurut Barisione dan Ceron (2017), DMO memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 1) spontan (tidak terencana) yakni kemunculan opini tidak berakar kepada aktor kunci yang menjadi penggagas; 2) mayoritas opini pengguna media sosial selalu dalam oposisi biner; 3) praktik DMO akan selalu ada karena perhatian publik terhadap isu spesifik dapat berubah begitu cepat; 4)

praktik DMO tidak akan usang karena kemunculannya tidak berdasar kepada aktor pemantik; 5) DMO bersifat lintas sektor karena melibatkan berbagai kelompok.

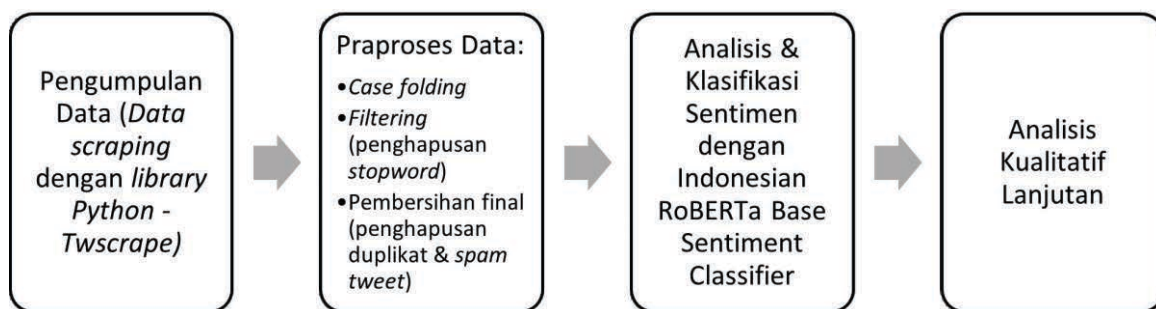
Media sosial X dapat menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan opininya seputar UU PDP, terutama kaitannya dengan isu kebocoran data yang marak terjadi. Publik sudah mengantisipasi UU PDP setidaknya selama dua tahun setelah regulasi tersebut mengemuka sebagai RUU PDP dalam berbagai pemberitaan oleh media. Dengan demikian, peneliti mengasumsikan bahwa pro dan kontra seputar UU PDP yang dipicu oleh konteks berbagai isu seputar perlindungan data pribadi berpotensi bertransformasi menjadi gerakan digital yang selaras dengan kaidah DMO.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode analisis sentimen berdasarkan kerangka kerja natural language processing (NLP). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi polarisasi sentimen dari opini publik terhadap suatu isu yang tertuang dalam data tekstual dalam jumlah, volume, dan variasi yang masif (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013) seperti halnya data percakapan X seputar UU PDP. Analisis sentimen terbukti mampu menguak berbagai aspek atas opini publik di media sosial terhadap suatu isu yang selama ini tak tampak secara kasat mata sehingga berpotensi menawarkan temuan baru untuk penelitian sosial-humaniora. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Khatami dan Kurnia (2021) melalui risetnya terhadap polemik pemecatan Pegawai KPK RI yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan dan studi Rakhman et al. (2021) terkait efektivitas kampanye 3M saat pandemi Covid-19.

Penelitian ini mengadopsi analisis sentimen berbasis model algoritma Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier. Wongso (2023) mengembangkan model ini dengan cara melakukan fine tuning terhadap model Indonesian RoBERTa Base dengan menerapkan dataset indonlu SmSA yang berisi sekitar 12 ragam dataset. Wongso (2023) berhasil melakukan fine tuning berdasarkan dataset tersebut dan mendapatkan skor akurasi klasifikasi sentimen sebesar 94,36% untuk model Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier. Model klasifikasi sentimen ini juga pernah diujicobakan oleh Jaya (2023) dalam analisisnya terhadap 394 tweet berbahasa Indonesia seputar pandangan publik terhadap profesi PNS dan memperoleh skor akurasi klasifikasi sentimen sebesar 90%.

Penelitian ini memadukan metode analisis sentimen berdasarkan NLP dan analisis teks kualitatif. Secara garis besar, penelitian ini terbagi menjadi empat tahap, yakni pengumpulan data (data collection), praproses data (data preprocessing), dan klasifikasi sentimen dengan Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier, serta analisis kualitatif lanjutan. Rangkuman tahapan penelitian ini sebagaimana peneliti sajikan pada Gambar 1 sedangkan penjelasan rinci terkait tiap tahap adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan alur penelitian dan olah data.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data dari media sosial X mengenai tweet seputar UU PDP. Data dikumpulkan dengan metode scraping menggunakan pustaka Twscrape dalam bahasa pemrograman Python, yang memungkinkan pengambilan data tanpa batasan jumlah tweet (vladkens, 2023). Scraping peneliti lakukan dengan kata kunci “Undang Undang Pelindungan Data Pribadi”, termasuk variasinya seperti “UU PDP” dan “RUU PDP”. Proses ini diatur untuk tweet yang diposting antara 24 Januari 2020 hingga 17 Oktober 2023, mencakup periode sejak RUU PDP dirilis ke publik oleh DPR RI hingga satu tahun setelah UU PDP disahkan presiden. Hasilnya adalah 6.338 tweet yang kemudian peneliti simpan dalam format CSV untuk peneliti olah lebih lanjut.

2. Praproses Data

Praproses data merupakan tahap yang peneliti lakukan untuk membersihkan dataset dari data duplikat maupun unsur-unsur yang kelak dapat mengganggu proses analisis sentimen (noise) (Verawati & Audit, 2022). Praproses data dalam penelitian ini mengacu kepada praktik praproses data untuk penerapan NLP yang dicontohkan oleh Nugroho (2019) dan praproses data untuk penerapan model BERT sebagaimana dicontohkan oleh Bricken (2021). Tahapan praproses data dalam penelitian ini terdiri dari case folding, filtering (stopword removal), dan pembersihan final (data duplikat dan tweet spam).

Hasil akhir dari seluruh rangkaian praproses ini adalah 3.374 tweet valid yang berupa teks dengan lower case, tidak mengandung tanda baca, angka, serta unsur nonalfabet lainnya seperti simbol RT ataupun tautan yang kerap tersemat pada tweet. Selain itu, emoji yang juga kerap tersemat pada cuitan turut diubah ke dalam format teks bukan ikon sehingga memungkinkan algoritma analisis sentimen untuk turut membaca dan mengartikannya. Komparasi antara tweet orisinal dengan tweet yang telah melalui tahap penghapusan stopwords sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komparasi tweet orisinal dengan tweet yang sudah melalui pemrosesan teks

<i>Tweet Orisinal</i>	<i>Tweet Terproses (hingga Stopword Removal)</i>
kalo lu kesel ajuin gugatan aja anjir wkwkwkwk ada tuh uu perlindungan data pribadi. gugatan perbuatan melawan hkm 🙏🙏 tinggal cari lawyer aje say kesel gw ngeliat artis sok gt ewhh najonggg	kesal ajuin gugatan anjing undang undang perlindungan data pribadi gugatan perbuatan melawan hukum cari lawyer sayang kesel artis sok ewhh najonggg

Sumber: Olahan peneliti (2024)

3. Klasifikasi Sentimen dengan Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier

Pada tahap ini, peneliti menilai tweet yang telah diproses menggunakan pustaka Python Transformer dan model Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier. Setiap teks dievaluasi berdasarkan tiga parameter sentimen—positif, netral, dan negatif—dengan total skor 1 yang dibagi sesuai kecenderungan sentimen. Misalnya, dari skor total 1, Transformer mungkin memberikan nilai 0,5 untuk positif, 0,2 untuk netral, dan 0,3 untuk negatif. Sentimen akhir ditentukan berdasarkan parameter dengan skor tertinggi, sehingga dalam contoh ini, Transformer akan menunjukkan sentimen positif (Wongso, 2023).

4. Analisis Kualitatif Lanjutan terhadap Klasifikasi Sentimen

Pada tahap ini, peneliti berupaya melakukan telaah dan analisis lebih dalam secara kualitatif terhadap berbagai visualisasi data berupa tabel maupun grafik yang mencerminkan berbagai temuan berkaitan dengan klasifikasi sentimen dari tweet. Analisis kualitatif peneliti lakukan secara empiris maupun teoritis dengan mengacu pada konsep opini publik dan digital movement of opinion (DMO).

Hasil dan Pembahasan

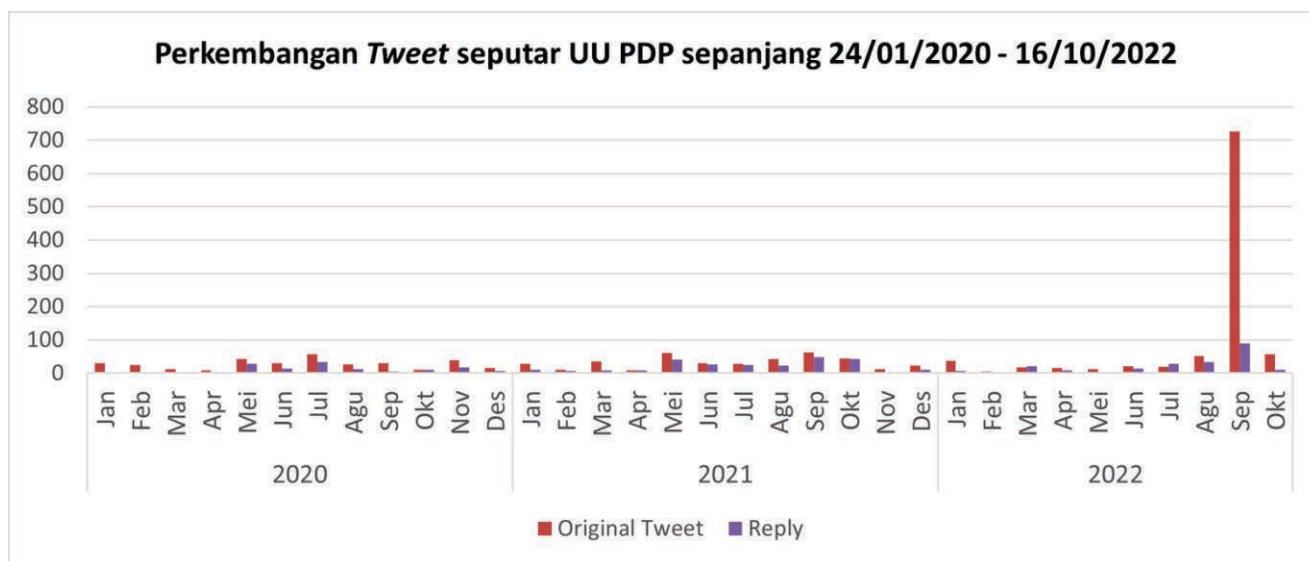
Percakapan X seputar UU PDP pada Periode 24 Januari 2020 hingga 16 Oktober 2022

Proses scraping terhadap percakapan X pada periode ini memperoleh sebanyak 2.298 sampel tweet valid yang mewakili percakapan publik di Indonesia seputar UU PDP. Sebagaimana tersaji pada Gambar 2, jumlah tweet sepanjang periode 24 Januari 2020 (saat DPR merilis RUU PDP ke publik) hingga 16 Oktober 2022 (sehari sebelum Presiden Jokowi mengesahkan UU PDP) cenderung bersifat fluktuatif.

Bulan September 2022 menjadi momen saat jumlah tweet mencapai jumlah tertinggi dalam percakapan pada periode ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP oleh DPR pada 20 September 2022 telah memantik atensi publik untuk membicarakan UU PDP dengan lebih intens.

Gambar 2 menunjukkan bahwa pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui metode scraping memperoleh dua macam bentuk tweet, yakni tweet orisinal dan reply. Tweet orisinal (original tweet) merupakan tweet yang muncul dalam percakapan secara otonom. Artinya, pemilik akun memublikasikan tweet tanpa merespon langsung tweet yang sudah ada melalui fitur reply di X. Sebaliknya, tweet berupa reply merupakan tweet yang pengguna X munculkan sebagai respon terhadap tweet yang telah muncul sebelumnya.

Sepanjang periode 24 Januari 2020 hingga 16 Oktober 2022, publik (warganet media sosial X) Indonesia lebih banyak melibatkan diri dalam percakapan daring seputar UU PDP melalui tweet yang mereka produksi secara otonom. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna X masih membicarakan UU PDP sebagai salah satu isu perlindungan data di Indonesia secara sporadis.



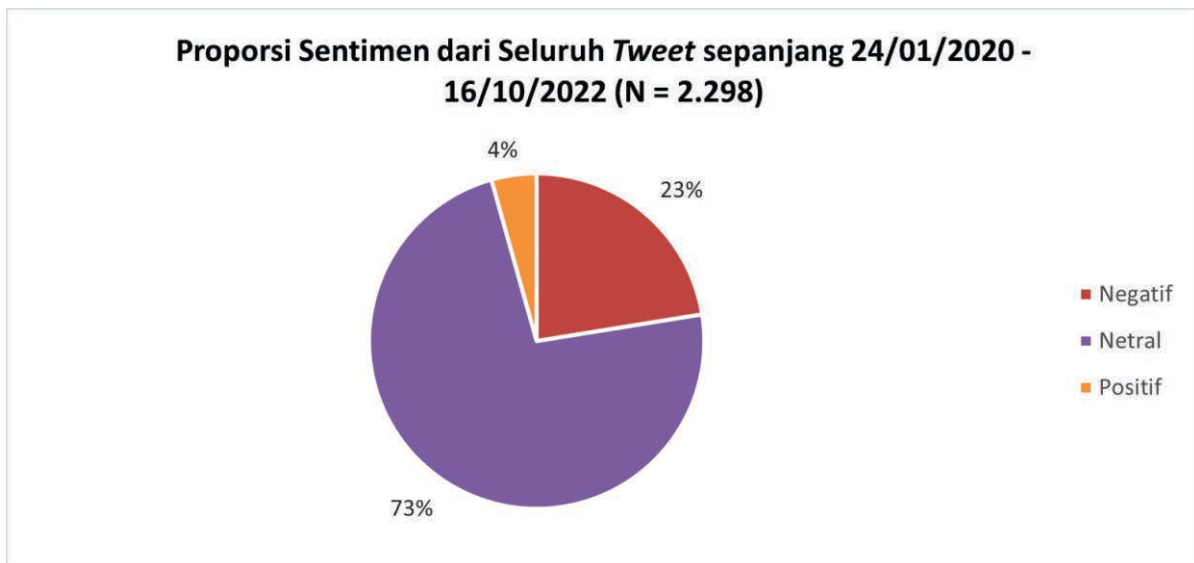
Gambar 2. Grafik perkembangan jumlah tweet seputar UU PDP pada periode 24 Januari 2020–16 Oktober 2022.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Analisis secara empiris terhadap metadata percakapan X seputar UU PDP pada penelitian ini turut menemukan adanya 1.460 akun X yang terlibat dalam percakapan sepanjang periode 24 Januari 2020 hingga 16 Oktober 2022. Secara spesifik, analisis terhadap 30 sampel akun X dengan jumlah tweet terbanyak seputar UU PDP dalam periode ini menunjukkan bahwa percakapan telah diikuti oleh akun-akun dengan beragam latar belakang. Adapun sebanyak 16 akun terindikasi milik personal, 12 akun merupakan milik media pemberitaan/informasi, dan 2 akun merupakan milik lembaga riset/organisasi

masyarakat sipil. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa akun milik personal menjadi aktor yang mendominasi percakapan seputar UU PDP dalam periode 24 Januari 2020 hingga 16 Oktober 2022.

Analisis sentimen dengan model Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier terhadap 2.298 sampel tweet menunjukkan bahwa tweet bersentimen netral mendominasi percakapan sebagaimana tersaji pada Gambar 3. Tweet bersentimen netral mengambil proporsi sebanyak 73% dari keseluruhan jumlah tweet, atau sebanyak 1.682 tweet. Sementara itu, tweet bersentimen negatif mengambil proporsi sebanyak 23% (516 tweet) dan tweet bersentimen positif sebanyak 4% (100 tweet).



Gambar 3. Proporsi sentimen pada tweet seputar UU PDP sepanjang periode 24 Januari 2020–16 Oktober 2022.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Pada uraian ini, peneliti juga memaparkan garis besar dimensi topik perbincangan seputar UU PDP berdasarkan tiap kelas sentimen. Dalam peneliti memaparkan garis besar topik perbincangan seputar UU PDP pada tiap kelas sentimen, peneliti menggunakan bantuan word cloud yang merupakan visualisasi kata-kata berdasarkan frekuensi kemunculannya pada seluruh populasi tweet dari tiap kelas sentimen (Arnal, 2020). Gambar 4 menunjukkan word cloud kata-kata dominan dari populasi tweet bersentimen netral, Gambar 5 menunjukkan word cloud kata-kata dominan dari populasi tweet bersentimen negatif, dan Gambar 6 menunjukkan word cloud kata-kata dominan dari populasi tweet bersentimen positif.

Pada word cloud kata-kata dari tweet bersentimen netral, peneliti tidak menemukan adanya kata yang memberikan konteks opini, misalnya “keren”, “semoga”, “tidak berguna”, dan kata lain yang merujuk kepada unsur subjektivitas pengguna X. Artinya, tweet bersentimen netral merupakan ungkapan fakta atau informasi semata terkait UU PDP, baik dalam dimensi perencanaan/perancangan, pengesahan, pemberlakuan, maupun implikasi lain atas eksistensi UU PDP sebagai regulasi utama bagi pemerintah dalam mengatur perlindungan data dan privasi warga negara di ranah siber Indonesia.

Word cloud kata-kata dari tweet bersentimen negatif menunjukkan bahwa tweet bersentimen negatif identik dengan ungkapan keresahan pengguna X atas maraknya kebocoran data. Hal ini sebagaimana tampak pada keberadaan kata “bocor”, “kebocoran”, dan “privasi”. Beberapa kata lain seperti “pinjol”, “ilegal”, dan “nik” turut memberikan konteks bahwa tweet bersentimen negatif dalam percakapan X seputar UU PDP merujuk kepada keresahan pengguna X—yang mewakili publik—atas maraknya kebocoran data menyangkut maraknya penyalahgunaan NIK oleh pihak tertentu dalam praktik pinjaman online terutama yang bersifat ilegal.

Keresahan yang publik luapkan dalam tweet bersentimen negatif berkorelasi dengan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di ranah digital dan status UU PDP yang masih berupa RUU pada saat percakapan ini terjadi. Oleh karena itu, konteks percakapan yang terbangun pada tweet bersentimen negatif adalah maraknya kasus kebocoran data—terutama yang berkaitan dengan praktik pinjaman online—merupakan akibat dari ketiadaan regulasi perlindungan data sehingga publik menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP. Temuan ini selaras dengan temuan riset oleh Putri dan Fahrozi (2021) bahwa UU PDP hendaknya menjadi urgensi bagi pemerintah seiring dengan maraknya kebocoran data digital akibat meningkatnya penggunaan platform digital, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi pada layanan finansial seperti paylater (Fadhli et al., 2022).

Sementara itu, pada word cloud kata-kata dari tweet bersentimen positif, peneliti menemukan cukup banyak kata yang berkorelasi dengan ungkapan subjektif seperti “alhamdulillah”, “keren”, dan “mantap”, serta “semoga”. Dengan peneliti merefleksikan kata-kata tersebut pada konteks UU PDP, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum tweet bersentimen positif berkorelasi dengan dimensi ungkapan optimisme, kekaguman, dan rasa syukur terhadap eksistensi UU PDP, meskipun baru sebatas RUU PDP pada saat percakapan ini berlangsung. Tabel 2 menunjukkan tiga akun penghasil tweet terbanyak pada masing-masing kelas sentimen. Sebagaimana analisis secara empiris yang peneliti lakukan terhadap word cloud dari kumpulan kata pada tweet di masing-masing kelas sentimen, tweet bersentimen netral cenderung merupakan tweet berisi informasi/fakta seputar UU PDP tanpa adanya unsur opini di dalamnya. Hal tersebut selaras dengan tiga akun penghasil tweet terbanyak pada kelas sentimen netral yang seluruhnya merupakan akun milik lembaga riset/organisasi masyarakat sipil yakni elsamnews dan akun milik media pemberitaan/informasi yakni KATADATAacid dan Bisniscom. Sementara itu, tweet bersentimen negatif dan positif cenderung merupakan tweet dengan kata-kata

yang berkorelasi dengan unsur subjektivitas dan opini di dalamnya. Oleh karena itu, tiga akun penghasil tweet terbanyak pada kategori tweet bersentimen negatif dan positif merupakan akun milik personal.

Tabel 2. 3 akun pengguna X dengan produksi tweet terbanyak pada tiap kelas sentimen

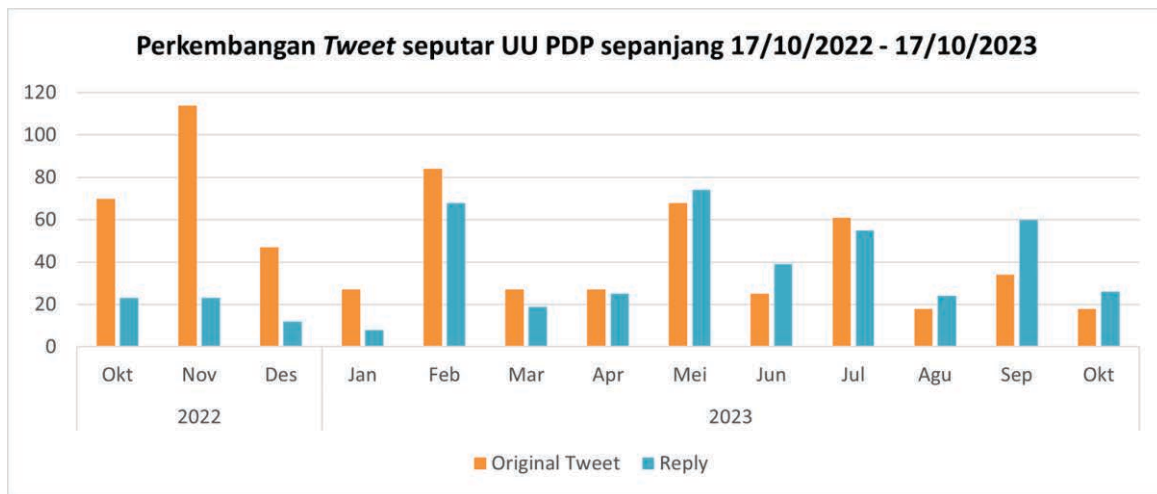
No	Kelas Sentimen	Nama Akun	Jumlah <i>Tweet</i>
1	Netral	elsamnews	31
2	Netral	KATADATAcoid	29
3	Netral	Bisniscom	21
4	Negatif	shda_agatha_	9
5	Negatif	Suara_Bawah	6
6	Negatif	yanpanjie	5
7	Positif	Dilsssxz	2
8	Positif	fanyaliunokas	2
9	Positif	Njusjambu	1

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Percakapan X seputar UU PDP pada Periode 17 Oktober 2022 hingga 17 Oktober 2023

Pengumpulan data percakapan di X seputar UU PDP untuk periode 17 Oktober 2022 hingga 17 Oktober 2023 (setahun setelah pengesahan UU PDP oleh Presiden Jokowi) memperoleh sebanyak 1.076 tweet. Sama seperti temuan pada periode sebelumnya, tweet pada periode ini juga terbagi menjadi original tweet dan reply sebagaimana tersaji pada Gambar 7. Namun, temuan pada periode ini terdapat perbedaan mencolok. Ini karena pada beberapa bulan (Mei, Agustus, dan September, serta Oktober), jumlah tweet dalam bentuk reply cenderung lebih banyak daripada tweet yang muncul secara otonom (original tweet). Jumlah tweet sepanjang periode ini juga fluktuatif seperti halnya tweet pada periode sebelumnya.

Walaupun UU PDP telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2022, jumlah tweet seputar UU PDP sepanjang periode ini relatif sedikit, bahkan tidak mencapai separuh dari total tweet sepanjang periode sebelumnya. Pada bulan Oktober 2022 saja, tweet seputar UU PDP justru mengalami penurunan signifikan bila dibanding dengan jumlah tweet pada September 2022. Hal ini menunjukkan bahwa status UU PDP yang telah resmi berlaku sebagai regulasi perlindungan data di Indonesia kurang begitu mendapat perhatian intens dari masyarakat Indonesia pengguna media sosial X.



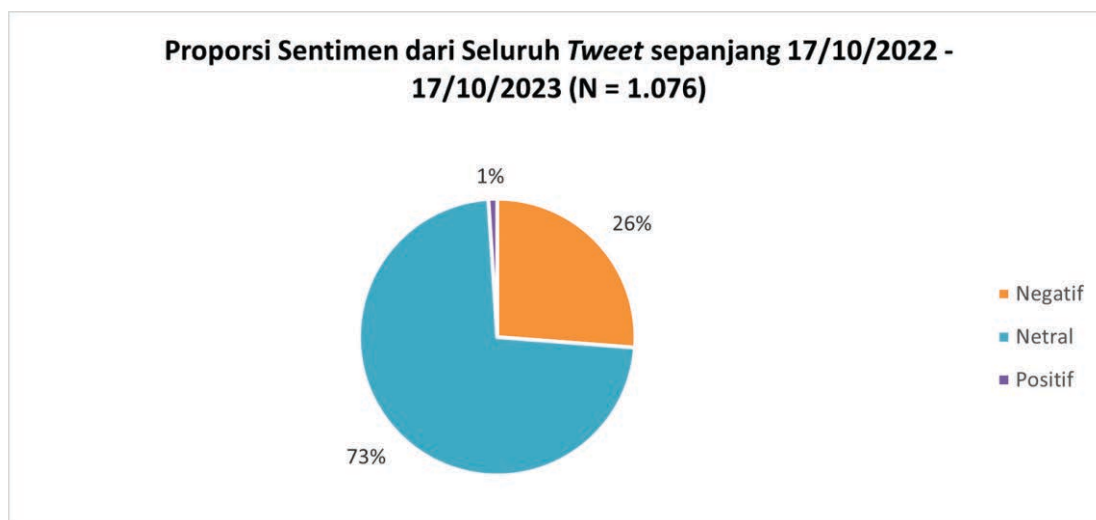
Gambar 7. Grafik perkembangan jumlah tweet seputar UU PDP pada periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Penelitian ini turut menemukan sebanyak 697 akun pengguna X terlibat dalam percakapan seputar UU PDP sepanjang periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 30 akun penghasil tweet terbanyak berasal dari latar belakang yang cukup beragam. Adapun sebanyak 15 akun X teridentifikasi milik personal, 9 akun milik media pemberitaan, dan 3 akun milik lembaga riset/organisasi masyarakat sipil, serta 3 akun milik lembaga pemerintah. Dengan demikian, 30 akun X penghasil tweet terbanyak dalam percakapan pada periode ini terbagi menjadi empat kategori latar belakang yang berbeda.

Temuan ini menunjukkan bahwa 30 akun pengguna X penghasil tweet terbanyak sepanjang periode ini terdiri dari akun dengan latar belakang yang lebih beragam daripada 30 akun X penghasil tweet terbanyak pada periode percakapan 24 Januari 2020–16 Oktober 2022 yang hanya terdiri dari tiga kategori akun. Perbedaan ini karena adanya akun lembaga pemerintah yang memublikasikan tweet seputar UU PDP dalam jumlah relatif banyak.

Analisis sentimen dengan model Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier terhadap 1.076 sampel tweet menunjukkan bahwa tweet bersentimen netral juga mendominasi percakapan seputar UU PDP pada periode ini. Gambar 8 menunjukkan bahwa tweet bersentimen netral mengambil proporsi sebanyak 73% dari keseluruhan jumlah tweet, atau sebanyak 783, kemudian disusul oleh tweet bersentimen negatif sebanyak 26% (282 tweet) dan tweet bersentimen positif sebanyak 1% (11 tweet).



Gambar 8. Proporsi sentimen pada tweet seputar UU PDP sepanjang periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023.
Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Pada periode ini, tweet bersentimen netral juga cenderung tidak mengandung kata yang berasosiasi dengan unsur subjektivitas atau opini. Gambar 9 menunjukkan bahwa tweet bersentimen netral banyak menyinggung fakta seputar implementasi UU PDP yang sudah Presiden Jokowi sahkan pada 17 Oktober 2022. Hal tersebut sebagaimana tingginya frekuensi penggunaan kata seperti “implementasi”, “sanksi”, dan “pelaksanaan”, serta “penerapan” yang masuk visualisasi word cloud. Beberapa kata lain seperti “nasabah”, “perusahaan”, dan “bsi” yang muncul sebagai kata dominan dalam word cloud turut mengindikasikan bahwa penerapan UU PDP akan memperkuat keamanan data dari aktivitas di sektor ekonomi, khususnya finansial (perbankan) dan jual-beli daring yang selama ini marak terjadi kasus kebocoran data (Delpiero et al., 2021; Rosadi & Pratama, 2018).



Gambar 9. Word cloud kata-kata dalam populasi tweet bersentimen netral pada periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023.
Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Gambar 10 merupakan word cloud berisi kata-kata dominan dari tweet bersentimen negatif pada periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023. Ada beberapa kata yang memiliki keterkaitan satu sama lain seperti “sanksi”, “penjara”, “melanggar”, “pidana”, “denda”, “hukuman”, dan “pelanggaran”, serta “takut”. Dengan mengelaborasi kata-kata tersebut, peneliti menganggap bahwa mayoritas tweet bersentimen negatif mencerminkan ketakutan publik terhadap UU PDP yang juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu—sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)—untuk melaporkan atau menuntut balik pihak lain (Nurlatifah, 2016). Ini karena dalam UU PDP terdapat klausul yang menyebutkan bahwa saat seseorang menyebarluaskan identitas pelaku kejahatan, maka pihak yang menyebarluaskan informasi juga berpotensi dapat dilaporkan kembali oleh pihak yang informasinya tersebar.

Word cloud kata-kata dominan dari tweet bersentimen negatif juga menunjukkan kata “bjorka” dan “doxing”. Berdasarkan elaborasi yang peneliti lakukan terhadap dua kata tersebut dengan konteks sentimen negatif terhadap UU PDP, maka peneliti menyimpulkan bahwa tweet bersentimen negatif juga banyak mengkritisi lemahnya implementasi UU PDP. Publik menganggap bahwa meskipun UU PDP sudah berlaku, faktanya pemerintah masih belum bisa mengatasi praktik doxing dan pembocoran data pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh hacker Bjorka beberapa kali setelah UU PDP diberlakukan oleh pemerintah (Bestari, 2023; Nainggolan, 2022).



Gambar 10. Word cloud kata-kata dari populasi tweet bersentimen negatif pada periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023.
Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Hal yang bertolak belakang dari temuan tweet bersentimen negatif peneliti temukan pada tweet bersentimen positif. Berdasarkan Gambar 11, peneliti menemukan beberapa kata subjektif yang cenderung membangun opini positif terkait UU PDP, seperti “keren”, “mantap”, dan “suka”, serta “hype”. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna X dengan tweet bersentimen positif menyambut baik pengesahan UU PDP. Dengan peneliti merujuk kepada beberapa kata lain seperti “ai”, “teknologi”, “recognition”, “bsi”, “transaksi”, dan “nasabah”, peneliti menganggap bahwa sambutan baik publik terhadap pengesahan UU PDP berkaitan dengan manfaat UU PDP yang dapat menjaga keamanan data

pribadi saat publik menggunakan layanan perbankan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang belakangan makin sering publik gunakan (Ayunda & Rusdianto, 2021; Disemadi, 2021; Putri & Fahrozi, 2021).

Selain itu, ada pula kata “undang ite” yang muncul dalam word cloud. Keberadaan kata ini dalam mayoritas tweet mengindikasikan bahwa publik menganggap eksistensi UU PDP dapat melengkap regulasi yang ada bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai kasus kejahatan digital di samping selama ini pemerintah hanya mengacu pada UU ITE. Opini ini selaras dengan temuan penelitian oleh Yuniarti (2019) dan Wicaksana et al. (2020) bahwa sebelum adanya UU PDP, pemerintah hanya mengacu kepada beberapa regulasi yang bersifat sektoral untuk melindungi keamanan di ranah siber.



Gambar 11. Word cloud kata-kata dalam populasi tweet bersentimen positif pada periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023.
Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Peneliti juga mengambil sampel berupa 3 akun penghasil tweet terbanyak pada tiap kelas sentimen untuk menambah kelengkapan pemaparan temuan. Tabel 5 menunjukkan bahwa 3 akun penghasil tweet terbanyak pada kelas sentimen netral merupakan akun lembaga riset/organisasi masyarakat sipil yakni training hukum dan akun media pemberitaan/informasi yakni klinik hukum dan HukumOnline. Sementara itu, 3 akun penghasil tweet terbanyak pada kelas sentimen negatif seluruhnya merupakan akun personal.

Tabel 4. 3 akun pengguna X dengan produksi tweet terbanyak pada tiap kelas sentimen

No	Kelas Sentimen	Nama Akun	Jumlah Tweet
1	Netral	traininghukum	17
2	Netral	klinikhukum	17
3	Netral	HukumOnline	13
4	Negatif	Dry_Sheriff	5
5	Negatif	ivokun	4
6	Negatif	roan_gylberth	3

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Pada pemaparan ini, peneliti tidak mencantumkan 3 akun penghasil tweet terbanyak pada kelas sentimen positif. Ini karena tweet bersentimen positif yang muncul sepanjang periode 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023 hanyalah sebanyak 11 tweet. Adapun 11 tweet tersebut diproduksi oleh 11 akun pengguna dengan rincian 10 di antaranya merupakan akun personal dan 1 sisanya merupakan akun milik lembaga riset/organisasi masyarakat sipil.

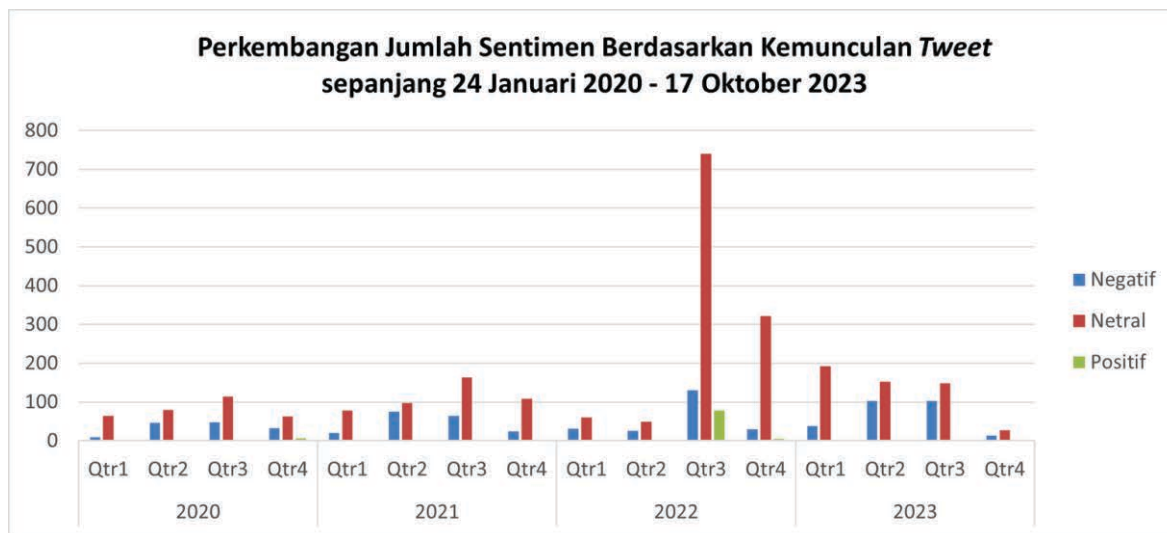
Analisis Dinamika Opini Publik dalam Percakapan X seputar UU PDP

Opini publik memiliki karakteristik melibatkan lebih dari satu orang dan setiap orang berhak menyampaikan opininya secara terbuka (Indrawan, 2017). Penelitian ini menemukan bahwa percakapan daring di X seputar UU PDP di Indonesia melibatkan sebanyak 2.157 akun pengguna media sosial X, yakni 1.460 akun terlibat dalam percakapan yang muncul sepanjang 24 Januari 2020–16 Oktober 2022 (sebelum pengesahan UU PDP oleh presiden) dan 697 akun terlibat dalam percakapan sepanjang 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023 (satu tahun setelah pengesahan UU PDP oleh presiden). Ini berarti bahwa setiap akun rata-rata menyampaikan informasi/opini seputar UU PDP melalui dua tweet untuk setiap periode percakapan.

Opini publik merupakan perwujudan hasil diskusi rata-rata individu sebagai respon terhadap suatu isu atau fenomena yang disuarakan oleh media (Hennessy, 1965; Indrawan, 2017; Lippmann, 1922). Anggapan tersebut selaras dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tweet bersentimen netral yang cenderung merupakan fakta atau informasi seputar UU PDP paling banyak disampaikan oleh akun pemberitaan dan penyampai informasi. Adapun informasi inilah yang kemudian mendapat beragam respon opini dari publik. Sementara itu, pro dan kontra yang merupakan karakteristik dari opini publik (Indrawan, 2017) dicerminkan oleh kehadiran tweet bersentimen negatif dan positif yang banyak disampaikan oleh akun-akun personal.

Sebagaimana pada Gambar 12, jumlah tweet yang berkategori sentimen negatif maupun positif senantiasa mengikuti kemunculan tweet bersentimen netral. Dengan demikian, praktik penyampaian respon oleh publik terhadap berbagai fakta/informasi seputar UU PDP telah mencerminkan praktik

penyampaian opini publik yang ideal karena setiap opini yang publik munculkan sangat bergantung kepada intensitas kemunculan fakta (Indrawan, 2017).



Gambar 12. Perbandingan perkembangan jumlah sentimen pada seluruh populasi tweet sepanjang percakapan pada 24 Januari 2020–17 Oktober 2023.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Peneliti juga melakukan analisis kualitatif terhadap populasi tweet dari kelas sentimen negatif maupun positif. Peneliti melakukan analisis terhadap word cloud, yakni visualisasi sampel kata-kata dominan dalam seluruh populasi tweet dari masing-masing kelas sentimen. Peneliti melakukan analisis teks kualitatif untuk menemukan konteks atas topik tertentu yang dibicarakan oleh mayoritas pengguna X melalui tweet terkait.

Peneliti menemukan bahwa analisis teks kualitatif terhadap tweet bersentimen negatif yang muncul pada kedua periode percakapan menunjukkan perbedaan hasil. Tweet seputar UU PDP dengan sentimen negatif yang muncul sepanjang 24 Januari 2020–16 Oktober 2022 menunjukkan bahwa publik cenderung menempatkan UU PDP sebagai pembangun konteks atas kritik mereka terhadap maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. Dalam hal ini, para pengguna media sosial X merasa resah terhadap maraknya kasus kebocoran data yang tidak kunjung berakhir sehingga mereka mengharapkan agar pemerintah segera mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP dan memberlakukannya sebagai regulasi. Sementara itu, tweet bersentimen negatif yang muncul sepanjang 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023 cenderung mencerminkan ketakutan para pengguna X atas potensi penyalahgunaan UU PDP yang telah berlaku. Para pengguna X beropini bahwa UU PDP yang sudah sangat detail mengatur tentang perlindungan data beserta sanksi yang dapat menimpa para pelanggar berpotensi akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu–misalnya pelaku kriminal yang informasi pribadinya tersebar luas–untuk menuntut balik pihak yang telah menyebarkan informasinya tersebut. Selain itu, tweet bersentimen negatif pada periode ini juga berisi kritik terhadap implementasi UU PDP yang terasa belum efektif. Ini

karena masih adanya praktik pembocoran data-data negara oleh hacker Bjorka meskipun pemerintah telah memberlakukan UU PDP (Bestari, 2023; Nainggolan, 2022).

Adapun analisis kualitatif terhadap tweet bersentimen positif seputar UU PDP yang muncul pada kedua periode percakapan menunjukkan hasil yang kontras dari tweet negatif. Tweet bersentimen positif yang muncul pada periode 24 Januari 2020–16 Oktober 2022 maupun 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023 menunjukkan adanya optimisme publik terhadap manfaat dari pemberlakuan UU PDP sebagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

Opini publik merupakan buah dari komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan pesan politiknya dan masyarakat dengan opininya (Indrawan, 2017). Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan jumlah tweet berkaitan dengan UU PDP terjadi secara signifikan pada bulan September 2022 sehingga mengindikasikan bahwa warganet Indonesia berbondong-bondong menunjukkan ketertarikannya untuk beropini terhadap isu terkait. Hal ini karena pada bulan September bertepatan dengan momentum DPR RI mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP. Dengan kata lain, pengesahan UU PDP merupakan bentuk pesan politik yang kemudian menggugah warganet Indonesia (pengguna media sosial X) untuk mengemukakan opininya sebagai refleksi atas dinamika perlindungan data pribadi di Indonesia selama ini.

Meskipun tweet seputar UU PDP yang muncul pada bulan Oktober 2022 memiliki jumlah terbanyak kedua setelah jumlah tweet pada bulan September 2022, tweet pada bulan ini justru mengalami penurunan secara drastis. Pasalnya, tweet pada bulan September 2022 berjumlah 816 tweet sedangkan tweet pada bulan Oktober 2022 (setelah 17 Oktober 2022 lebih tepatnya) hanya berjumlah 93 tweet. Padahal pada bulan Oktober 2022, masih ada satu peristiwa besar terkait UU PDP yakni pengesahan pemberlakuan UU PDP oleh Presiden Jokowi. Bahkan, tweet seputar UU PDP pun kembali ke jumlah yang relatif sama dengan dengan tweet yang muncul sebelum DPR mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP pada 20 September 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa UU PDP sudah tidak lagi dipandang sebagai isu yang “seksi” oleh masyarakat Indonesia—dalam hal ini diwakili oleh warganet X.

Jumlah tweet seputar UU PDP yang bersifat fluktuatif mengindikasikan bahwa percakapan daring di X seputar UU PDP mencerminkan bentuk aktivisme digital berupa digital movement of opinion (DMO). Hal ini karena kemunculan opini—yang berkelindan dengan tweet bersentimen positif dan negatif—senantiasa terikat pada momentum tertentu yang berkaitan dengan UU PDP, yakni pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP oleh DPR RI dan pengesahan implementasi UU PDP oleh Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna X cenderung impulsif dalam menanggapi UU PDP yang banyak diberitakan oleh akun-akun media di momen tertentu. Impulsivitas pengguna X itulah yang kemudian membuat percakapan seputar UU PDP menjadi tidak seintens saat momen pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP oleh DPR maupun pengesahan pemberlakuan UU PDP oleh presiden. Sebagaimana anggapan Barisione dan Ceron (2017), DMO merupakan bentuk aktivisme digital terhadap isu tertentu yang cenderung berumur pendek. Ini karena akar dari DMO adalah impulsivitas publik dalam

menyampaikan opininya terhadap suatu isu berdasarkan momentum tertentu yang mampu memancing ketertarikannya.

Walau demikian, percakapan X seputar UU PDP di Indonesia yang cenderung berjumlah lebih banyak setelah pemerintah mengesahkan UU PDP merupakan pertanda baik. Sebabnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap UU PDP sudah mulai bertambah, meski belum banyak pihak yang tergerak untuk terlibat aktif menuliskan opininya dalam bentuk tweet alih-alih hanya melakukan retweet ataupun like. Selain itu, percakapan X dalam merespon UU PDP di Indonesia sudah berhasil melibatkan akun X dengan beragam profil. Dengan demikian, percakapan X seputar UU PDP berhasil menjelma menjadi sebuah bentuk gerakan sosial berupa DMO karena mampu melibatkan aktor dari berbagai sektor untuk turut menyampaikan opininya dalam merespon fenomena terkait (Barisione & Ceron, 2017).

Selain itu, karakteristik DMO yang tidak berakar kepada aktor kunci (Barisione & Ceron, 2017) juga peneliti temukan melekat dalam percakapan di X seputar UU PDP. Hal ini karena tweet seputar UU PDP yang pengguna X munculkan baik sepanjang periode 24 Januari 2020–16 Oktober 2022 maupun 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023 sangat bersifat sporadis. Sebabnya, ada sebanyak 3.374 tweet beredar dalam keseluruhan percakapan dengan sebanyak 2.157 akun terlibat. Dengan jumlah tersebut, jumlah rata-rata tweet yang diproduksi oleh tiap akun hanyalah dua. Itu berarti bahwa setiap akun cenderung memproduksi tweet secara otonom dan terpisah tanpa adanya keterkaitan dan kesinambungan dengan tweet dari akun tertentu.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan opini publik terhadap UU PDP yang muncul saat sebelum dan sesudah Presiden Jokowi mengesahkan UU PDP. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan metode analisis sentimen berbasis model Indonesian Indonesian RoBERTa Base Sentiment Classifier terhadap 3.374 tweet tentang UU PDP dan analisis teks kualitatif terhadap sampel tweet pada tiap kelas sentimen yang direpresentasikan oleh word cloud.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tweet bersentimen netral mendominasi percakapan, menyusul setelahnya adalah tweet bersentimen negatif dan positif. Opini publik dalam bentuk tweet bersentimen negatif memiliki perbedaan konteks topik berdasarkan waktu kemunculannya. Tweet bersentimen negatif yang muncul sepanjang 24 Januari 2020–16 Oktober 2022 cenderung merupakan ungkapan keresahan publik terhadap maraknya kebocoran data sementara di saat bersamaan, UU PDP yang mereka harapkan dapat menjadi regulasi tidak kunjung berlaku. Sementara itu, tweet bersentimen negatif yang muncul sepanjang 17 Oktober 2022–17 Oktober 2023 cenderung berupa ungkapan ketakutan publik terhadap potensi penyalahgunaan UU PDP oleh pihak tertentu dan ungkapan kekecewaan karena pemberlakuan UU PDP tidak memberikan signifikansi terhadap upaya pemerintah

dalam menangani kebocoran data yang terjadi setelah pemberlakuan UU PDP. Sebaliknya, tweet bersentimen positif pada kedua periode percakapan senantiasa berupa optimisme publik terhadap penerapan UU PDP.

Berdasarkan analisis kualitatif yang peneliti lakukan dengan mengacu pada konsep opini publik dan digital movement opinion (DMO), percakapan X seputar UU PDP sangatlah dinamis karena melibatkan berbagai ragam aktor yang berperan sebagai penyebar fakta dan aktor yang berperan sebagai pemberi opini. Opini publik yang diwakili oleh tweet bersentimen negatif bahkan turut bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial digital berbentuk DMO dengan tujuan mengkritisi buruknya upaya perlindungan data pribadi oleh pemerintah Indonesia sehingga memiliki kekuatan untuk memengaruhi efektivitas implementasi UU PDP ke depannya. Praktik DMO yang berlangsung dalam percakapan X seputar UU PDP di Indonesia lebih banyak mengambil bentuk retweet atas tweet yang sudah eksis daripada produksi tweet orisinal sehingga menimbulkan ketimpangan jumlah antara opini dengan fakta yang muncul.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meski UU PDP selama ini dianggap mampu menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai kasus kebocoran data, publik tampak masih meragukan efektivitasnya sebagai instrumen hukum karena merujuk kepada masih buruknya penanganan kasus kebocoran data oleh pemerintah yang seakan-akan belum begitu tegas mengimplementasi regulasi terkait. Temuan ini hendaknya menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perlindungan data lainnya yang dapat menyelaraskan dan memperkuat implementasi UU PDP kelak. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkenalkan metode riset berbasis big data sebagai pendekatan baru untuk riset seputar isu perlindungan data pribadi. Walau demikian, penelitian ini masih memiliki kekurangan, di antaranya hanya mengadopsi konsep opini publik dan DMO yang masih sangat general sebagai pisau analisis dan tidak secara khusus mengelaborasi metode analisis jaringan aktor untuk memetakan kekuatan dari keseluruhan aktor yang terlibat dalam percakapan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, S.F. (2018). Polemik pengaturan kepemilikan data pribadi: Urgensi untuk harmonisasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814–825. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>
- Annur, C.M. (2020, September 8). Daftar kejahatan siber yang paling banyak dilaporkan ke polisi. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>
- Annur, C.M. (2022, September 13). Indeks keamanan siber Indonesia peringkat ke-3 terendah di antara negara G20. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20>

- Arnal, J.R. (2020, Juli 29). Introduction to NLP: Sentiment analysis and wordclouds. QuantDare. <https://quantdare.com/introduction-to-nlp-sentiment-analysis-and-wordclouds/>
- Asro'i, A., & Herny, F. (2022). Analisis sentimen pengguna Twitter terhadap perpanjangan PPKM menggunakan Metode K-Nearest Neighbor. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10(1), 17–24. <https://doi.org/10.31294/jki.v10i1.12624>
- Ayunda, R., & Rusdianto. (2021). Perlindungan data nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam aktivitas perbankan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 663–677. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37995>
- Barisione, M., & Ceron, A. (2017). A digital movement of opinion? Contesting austerity through social media. Dalam M. Barisione & A. Michailidou (eds.), *social media and European politics* (pp. 77–104). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59890-5_4
- Bestari, N.P. (2023, Maret 14). Bjorka beraksi, netizen minta ungkap kekayaan PNS pajak. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230314124632-37-421514/bjorka-beraksi-netizen-minta-ungkap-kekayaan-pns-pajak>
- Bricken, A. (2021, November 14). Does BERT need clean data? Part 1: Data cleaning. Towards Data Science. <https://towardsdatascience.com/part-1-data-cleaning-does-bert-need-clean-data-6a50c9c6e9fd>
- Cahyono, Y. (2017). Analisis sentiment pada sosial media Twitter menggunakan Naïve Bayes Classifier dengan Feature Selection Particle Swarm Optimization dan Term Frequency. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.32493/informatika.v2i1.1500>
- CNN Indonesia. (2021, November 25). Tanda tanya besar soal hasil investigasi kasus data bocor. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211125151533-185-726030/tanda-tanya-besar-soal-hasil-investigasi-kasus-data-bocor/2>
- Delpiero, M., Reynaldi, F.A., Ningdiah, I.U., & Muthmainnah, N. (2021). Analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggungjawaban online marketplace dalam perlindungan data pribadi pengguna pada kasus kebocoran data. *Padjajaran Law Review*, 9(1). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509/378>
- Dihni, V.A. (2022, Maret 7). Keamanan siber Indonesia peringkat ke-6 di Asia Tenggara. *databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-6-di-asia-tenggara>
- Disemadi, H.S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *WAWASAN YURIDIKA*, 5(2), 177–199. DOI: 10.25072/jwy.v5i2.460
- Elnizar, N.E. (2022, November 16). Warga Bekasi ajukan uji materi pertama UU Perlindungan Data Pribadi. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/warga-bekasi-ajukan-uji-materi-pertama-uu-pelindungan-data-pribadi-lt6374a7bd44628/?page=2>

- Eriyanto. (2019). Hashtags and digital movement of opinion mobilization: A social network analysis/SNA study on #BubarkanKPAI vs #KamiBersamaKPAI hashtags. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(3), 167–178. <https://doi.org/10.7454/jki.v8i3.11591>
- Fadhli, Z., Rahayu, S.W., & Gani, I.A. (2022). Perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi paylater. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 119–132.
- Finaka, A.W., & Nurhanisah, Y. (2020, September 21). RUU PDP: Jenis data pribadi yang wajib dilindungi. *Indonesiabaik.id*. <https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>
- Finaka, A.W., Nurhanisah, Y., & Devina, C. (2023, Maret 14). Pengguna internet di Indonesia makin tinggi. *Indonesiabaik.id*. <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>
- Halawa, H. (2022). Membangun opini publik untuk advokasi kebijakan. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(3), 364–375. <https://doi.org/10.24036/pgde.v2i3.156>
- Hartanto. (2017). Text mining dan sentimen analisis Twitter pada gerakan LGBT. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(1), 18–25. DOI: 10.15294/intuisi.v9i1.9561
- Hennessy, B.C. (1965). *Public opinion*. Wadsworth Publishing Company.
- Indrawan, R.M.J. (2017). Dampak komunikasi politik dan opini publik terhadap perilaku masyarakat. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171–179. <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>
- Jamil, A., Cahaya, S., & Kusuma, T. C. (2022). Pengaruh opini publik terhadap kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 8264–8270. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.8015>
- Jaya, A. (2023). Analisis Sentimen pandangan public terhadap profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Twitter menerapkan Indonesian Roberta Base Sentiment Classifier. *Indonesian Journal of Data and Science (IJODAS)*, 4(1), 38–44. <https://doi.org/10.56705/ijodas.v4i1.66>
- Khatami, M.I., & Kurnia, N. (2022). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis konten polemik pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Riset Komunikasi JURKOM*, 5(1), 51–69. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i1.449>
- Khusna, I.H. (2016). Opini publik cerminan dari pemerintah dan kebijakannya. *PROMEDIA*, 2(1), 120–137. <https://doi.org/10.52447/promedia.v2i1.313>
- Kurnia, N., Rahayu, Wendratama, E., Monggilo, Z.M.Z., Damayanti, A., Angendari, D.A.D., Abisono, F.Q., Shafira, I., & Desmalinda. (2022). Penipuan digital di Indonesia (Modus, medium, dan rekomendasi). Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. Harcourt, Brace and Company.
- Mahrus, Z. (2020, Mei 24). Kebocoran data pengguna Tokopedia, Bukalapak, dan Bhinneka: Siapa

- peduli? Cyberthreat.id. <https://cyberthreat.id/read/6795/Kebocoran-Data-Pengguna-Tokopedia-Bukalapak-dan-Bhinneka-Siapa-Peduli>
- Nainggolan, S.Y. (2022, November 10). Bjorka beraksi lagi! Kali ini retas data MyPertamina. medcom.id. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQjmEwb-bjorka-beraksi-lagi-kali-ini-retas-data-mypertamina>
- Nirbita, V.A (2022, Oktober 22). UU PDP: Apresiasi dan kritik di balik pengesahannya. LPM OPINI Online. <https://lpmopini.online/uu-pdp-apresiasi-dan-kritik-di-balik-pengesahannya/>
- Nugroho, K.S. (2019, Juni 18). Dasar text preprocessing dengan Python. Medium. <https://ksnugroho.medium.com/dasar-text-preprocessing-dengan-python-a4fa52608ffe>
- Nurlatifah, M. (2016). Ancaman kebebasan berekspresi di media sosial. Departemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM.
- Purnamasari, D.D. (2023, Februari 25). Kewenangan otoritas pengawas data pribadi tetap perlu diperkuat. KOMPAS. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/25/kewenangan-otoritas-pengawas-data-pribadi-tetap-perlu-diperkuat>
- Putri, D.D.F., & Fahrozi, M.H. (2021). Upaya pencegahan kebocoran data konsumen melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus e-commerce bhinneka.com). *Borneo Law Review*, 5(1), 46–68. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1>
- Rakhman, F.R., Ramadhani, R.W., & Kuncoroyakti, Y.A. (2021). Analisis sentimen dan opini digital kampanye 3M di masa Covid-19 melalui media sosial Twitter. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(01), 8–20. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/301>
- Republika.id. (2022, September 12). Peretasan dokumen negara belum bisa dipastikan. <https://www.republika.id/posts/31913/peretasan-dokumen-negara-belum-bisa-dipastikan>
- Rosadi, S.D., & Pratama, G.G. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *VeJ*, 4(1), 88–110. DOI: 10.25123/vej.2916
- Saputra, A. (2022, November 6). Belum 2 bulan disahkan, UU Perlindungan Data Pribadi digugat ke MK. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6390811/belum-2-bulan-disahkan-uu-perlindungan-data-pribadi-digugat-ke-mk>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi perbandingan hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Setiawan, H.B., & Najicha, F.U. (2022). Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia terkait dengan kebocoran data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>
- Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Social media and political communication: a social media analytics framework. *Social Network Analysis and Mining*, 3(4). <https://doi.org/10.1007/s13278-012-0079-3>

- The Conversation. (2022, September 21). Panel ahli: UU Perlindungan Data Pribadi rentan makan korban dan belum jamin proteksi data yang kuat. <https://theconversation.com/panel-ahli-uu-perlindungan-data-pribadi-rentan-makan-korban-dan-belum-jamin-proteksi-data-yang-kuat-191018>
- Verawati, I., & Audit, B.S. (2022). Algoritma Naïve Bayes Classifier untuk analisis sentimen pengguna Twitter terhadap provider By.u. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6, 1411–1417. doi:10.30865/mib.v6i3.4132
- vladkens. (2023, Juli 2). How to still scrape millions of tweets in 2023 using twscrape. Medium. <https://medium.com/@vladkens/how-to-still-scrape-millions-of-tweets-in-2023-using-twscrape-97f5d3881434>
- Wicaksana, R.H., Munandar, A.I., & Samputra, P.L. (2020). Studi kebijakan perlindungan data pribadi dengan Narrative Policy Framework. Kasus serangan siber selama pandemi Covid-19. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 22(2), 143–158. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.2.2020.143-158>
- Wongso, W. (2023). Indonesian-RoBERTa-Base-Sentiment-Classifier. Hugging Face. <https://huggingface.co/w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

Kontestasi Wacana Figur Kemandirian Perempuan dalam Belenggu Masyarakat Patriarkal pada Film Yuni

Syarifah Nur Aini | Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Gadjah Mada. Email: syarifahnuraini@mail.ugm.ac.id
Awanis Akalili | Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu
Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Email: awanisakalili@uny.ac.id

Abstrak

The patriarchal culture that was constructed by society brought women into spaces full of restraints. There is an act of deconstruction of patriarchal culture carried out through film as a mass communication medium. One of the films that shows the empowerment of women in fighting the patriarchal environment is Yuni film. Yuni film shows the condition of the people who are very close to patriarchal culture. Until these conditions place women in marginalized and disadvantageous positions. Some of the narrations and visualizations in Yuni film show that there are women who can develop and have principles in the midst of conditions full of patriarchy. The purpose of this study is to explore the representation of empowered women presented through Yuni film. The research method used is content analysis with Teun A. van Dijk's critical discourse analysis model. Meanwhile, data collection was carried out by observing the scenes and narration in Yuni film. The discourse that is built about empowered women is shown by characters, characterizations, dialogues, properties and so on which is the focus of this research process. The things that are presented related to identity as an empowered woman become a potential that is focused on in Yuni film.

Keywords: Empowered Women, Patriarchal Culture, Yuni Film

Pendahuluan

Budaya patriarki dilanggengkan melalui konstruksi sosial yang berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia. Patriarki mampu ditemukan dalam beragam aspek kehidupan berupa pendidikan, ekonomi, politik, maupun hukum. Dengan adanya internalisasi patriarki dapat mengakibatkan masalah sosial yang erat kaitannya dengan kebebasan perempuan (Sakinah, 2017). Tidak hanya itu saja, hak-hak yang seharusnya dimiliki dan didapatkan oleh perempuan pun menjadi terbatas. Sistem patriarki yang memiliki peran dominan dapat menyebabkan fenomena kesenjangan bahkan ketidakadilan gender (Natasha, 2013). Di mana kondisi tersebut berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, terkhusus bagi perempuan. Laki-laki dipercaya untuk mempunyai posisi dalam kontrol utama, sedangkan perempuan diberikan akses yang tidak sebebaskan-bebasnya dalam wilayah-wilayah yang umum. Pembatasan terhadap peran perempuan yang diakibatkan karena budaya patriarki menjadikan perempuan terbelenggu dalam kehidupan sosialnya. Adanya ketidaksetaraan

antara laki-laki dan perempuan menjadi akar dari hambatan untuk mendapatkan akses yang sama.

Bagi masyarakat yang menganut patriarki, laki-laki ditempatkan dalam peran yang lebih dominan dalam segala hal dibandingkan dengan perempuan (Rokhmansyah, 2016). Menurut Spradley (dalam Israpil, 2017), nilai patriarki memandang perempuan sebagai makhluk untuk mendampingi laki-laki agar struktur sosial yang ada dapat lebih harmonis dan seimbang. Peran perempuan dibatasi dengan pengekangan sebagai 'milik' laki-laki untuk melayani dan membantu. Sehingga perempuan dirasa tidak memiliki kemandirian dan apa yang diperoleh bergantung dari laki-laki. Citra diri perempuan didudukkan dalam suatu posisi yang inferior maupun subordinat. Terdapatnya anggapan bahwa perempuan memiliki sikap lemah dan lembut sehingga tidak seharusnya mempunyai kekuatan dalam partisipasi peran di kehidupan masyarakat. Selain itu, adanya pandangan bahwa perempuan merupakan pihak yang mudah ditindas dan tidak berhak untuk memiliki peran yang sentral dalam masyarakat. Penempatan perempuan dalam posisi kedua pun kerap kali menjadi penyebab dari tindakan merendahkan derajat perempuan.

Hegemoni budaya patriarki dapat merugikan perempuan sehingga menghadirkan perjuangan untuk melakukan dekonstruksi patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Feminisme hadir sekaligus berperan sebagai jalan dalam menghapuskan bias gender yang telah melekat dalam pikiran dan tindakan masyarakat Indonesia. Di mana kaum perempuan memiliki orientasi dalam kehidupan sosial tanpa adanya dominasi, opresi, dan kekerasan (Suhada, 2021). Hal tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat yang sukar menciptakan kesetaraan gender. Masyarakat tidak mampu berlaku adil dalam pikiran sehingga nilai maskulin dan feminin yang dikonstruksikan menyebabkan ruang kurungan atas patriarki. Menurut Misiyah (dalam Andi, 2016), feminisme sebagai upaya dalam memperdayakan perempuan dengan turut menumbuhkan kesadaran kritis terhadap lingkungannya. Selain itu, menurut Gadis (dalam Andi, 2016), feminisme berperan sebagai gerakan yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan di tengah masifnya konservatisme di Indonesia. Diperlukan banyak praktik dan contoh-contoh baik mengenai perjuangan perempuan yang dimunculkan maupun diperlihatkan kepada publik.

Menurut Tunggal (dalam Nada, 2021), tindakan perjuangan perempuan yang dapat dimaknai oleh masyarakat mampu menciptakan pemahaman bersama mengenai upaya mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan menyadarkan ketidaksetaraan gender. Kemudian, hal tersebut sejalan dengan menghasilkan kemajuan dan perkembangan dalam semua bidang yakni sebagai satu kesatuan bangsa. Tindakan pemberdayaan perempuan sebagai proses penyadaran dan pembentukan kapastitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk menghasilkan transformasi dalam persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (Nur, 2019). Dengan adanya perempuan yang dapat menguasai ilmu pengetahuan maka menjadi potensi bangsa dan dapat diupayakan secara terarah maupun berkelanjutan. Menurut Mustika (dalam Kemenpppa.go.id, 2020), perempuan tidak harus memilih satu dari beragam potensi yang dimiliki. Perempuan berhak mempunyai banyak kelebihan baik dari *smart*

(kecerdasan), *beauty* (kecantikan berasal dari dalam ataupun luar), dan *behaviour* (perilaku).

Upaya untuk membentuk realitas baru dalam perjuangan perempuan melawan budaya patriarki dapat dilakukan dalam beragam bentuk, termasuk film. Di mana film menjadi media elektronik dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara unik melalui sisi visual dan mengandung narasi tertentu. Film dapat merepresentasikan maupun mengkonstruksi realitas sosial yang sedang terjadi di dalam masyarakat (Risal & Nisa, 2021). Aspek tersebut dapat diketahui dari bagaimana film sengaja diproduksi untuk menyuguhkan fakta dalam bentuk simbolik dengan sarat makna melalui konten serta estetikanya. Hal ini berkelindan dengan film yang mampu menangkap realitas dalam masyarakat kemudian melakukan proyeksi melalui suatu layar (Sobur, 2006). Di sisi lain, film tidak menyajikan refleksi realitas secara penuh, tetapi memasukan beragam kode, tanda, hingga ideologi yang nantinya menghasilkan realitas baru.

Salah satu film yang menarik untuk dikaji adalah film Yuni yang menggambarkan perjuangan seorang pelajar perempuan untuk melawan budaya patriarki. Tokoh Yuni hidup dan tumbuh di dalam keluarga maupun lingkungan yang menganut budaya patriarki dan hal itu menyebabkan dirinya tidak dapat menjadi Yuni yang seutuhnya. Adanya visualisasi dan narasi dengan makna tersirat yang erat kaitannya dengan budaya patriarki dan dikemas melalui film Yuni. Keberhasilan film Yuni pun ditunjukkan dengan menjadi perwakilan Indonesia dalam kategori Best International Feature Film pada ajang penghargaan Academy Awards ke-94 atau Piala Oscar 2022. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis hendak menemukan keterbaruan mengenai bagaimana wacana perempuan berdaya yang sengaja dibangun melalui film Yuni. Wacana yang dihadirkan dalam film Yuni sarat dengan pembentukan figur perempuan berdaya untuk melawan logika patriarkal dan sengaja disajikan kepada khalayak. Hal tersebut krusial untuk memberikan novelty terhadap penelitian keilmuan komunikasi dengan mencoba membedah narasi-narasi keberdayaan perempuan dalam film Yuni. Selain itu, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana wacana untuk melakukan *counter* terhadap patriarki 3 dan melawan narasi patriarkal yang disandingkan melalui film Yuni.

Kerangka Pemikiran

A. Praktik Budaya Patriarki dalam Masyarakat

Budaya patriarki adalah budaya yang terdapat kondisi di dalamnya bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu, budaya patriarki menjadi suatu sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai kelompok yang dapat mempunyai kendali kekuasaan terhadap perempuan. Terdapat perbedaan yang kontras mengenai tugas dan peran antara laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan sosial. Budaya patriarki telah hadir secara turun temurun sehingga membentuk status, perilaku, dan otoritas yang terjadi antara laki-laki maupun perempuan

di mana menghadirkan suatu hirarki gender (Israpil, 2017). Di dalam keluarga laki-laki diposisikan sebagai seorang pemimpin yang mempunyai otoritas berupa kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan seksual. Atas kondisi itu, perempuan mendapatkan porsi yang ternilai sedikit untuk berpartisipasi dalam sektor publik dibandingkan dengan laki-laki. Budaya patriarki menyebabkan perempuan kurang menyadari potensi diri, malu dan takut bersalah, beban kerja domestik, kurang dapat menerima kekuasaan, hingga sebagainya (Nurchahyo, 2016).

Menurut Walby (2014), terdapat dua bentuk patriarki yaitu patriarki privat atau domestik dan patriarki publik. Struktur dominan patriarki domestik merupakan arena produksi rumah tangga dan struktur patriarki yang luas dalam arena pekerjaan, negara, seksualitas, kekerasan, hingga budaya. Sedangkan patriarki publik adalah praktik penguasaan yang terjadi dalam arena publik. Praktik patriarki dalam rumah tangga dapat dilihat dalam penugasan penuh perempuan untuk mengasuh anak dan mengerjakan tugas rumah tangga. Patriarki pada pekerjaan yaitu adanya upah dengan pemisahan posisi kerja perempuan dan laki-laki. Patriarki dalam seksualitas yaitu perempuan dianggap sebagai pihak pemberi layanan seksual, emosional, dan kasih sayang. Adanya patriarki yang dilanggengkan mengakibatkan perempuan menjadi feminisme ideal dalam keluarga, pendidikan, agama, hingga media massa.

Penelitian ini berkelindan dengan problematika patriarki yang menempatkan laki-laki dengan kedudukan yang sentral di mana seluruh kehidupan dan kegiatan ditentukan oleh laki-laki sebagai pemimpin. Prinsip tersebut menguat dan menjadi budaya bahkan ideologi yang mengakar di masyarakat baik disadari maupun tidak. Disebabkan karena kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan yang berbeda maka fungsi sosial yang ada di dalam masyarakat pun diciptakan secara berbeda. Laki-laki yang selalu dikaitkan dengan fungsi ataupun tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang memiliki kodrat melahirkan hanya mempunyai ruang di dalam rumah. Perempuan ditugaskan untuk membesarkan anak, sedangkan laki-laki berkewajiban untuk mencari nafkah. Pandangan seperti itu dinilai sebagai suatu hal yang alamiah dan adanya ketimpangan hingga subordinasi yang hadir pun dianggap sebagai hal yang lumrah. Perempuan dianggap memiliki citra sabar, tabah, penyayang, keibuan, patuh, suka mengalah, sumber kedamaian dan keadilan, pandai mengurus keluarga, selalu cantik, langsing, bersih, harus siap melayani, dan sebagainya (Sari & Haryono, 2019). Sedangkan citra lainnya adalah perempuan dianggap bodoh, dungu, tidak punya otak, emosional, dan sebagainya.

B. Perempuan Berdaya dan Aktualisasi Diri

Perempuan berdaya merupakan perempuan dengan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang positif dan menentukan pilihan dalam hidupnya. Menurut Kurniawati et al. (2019), perempuan berdaya adalah perempuan yang mampu mandiri, mengembangkan diri, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, *passion*, peka terhadap lingkungan, hingga memiliki wawasan luas. Perempuan memiliki dorongan yang bertujuan untuk mencapai hal yang ingin dilakukan.

Perempuan pun memiliki kekuatan dalam mengontrol keputusan baik pribadi ataupun sosial. Selain itu, perempuan mempunyai aktivisme maupun otonomi individu dan komunitas yang dapat memengaruhi adanya perubahan dalam diri ataupun sosial. Selain itu, perempuan mempunyai optimisme yang berkaitan dengan pandangan positif untuk menyambut masa depan. Perempuan berdikari dapat dimaknai sebagai upaya perempuan untuk mampu dalam mengaktualisasi potensi dirinya dan lebih dari sekadar aktivitas dalam ranah domestik. Perempuan berdikari tidak serta merta diartikan untuk melawan kodrat yang telah dimiliki secara *nature*, *nurture*, dan *culture* (Kuncoro & Kadar, 2016).

Kapabilitas perempuan berdikari dilihat dari kemampuan untuk pemenuhan ekonomi dengan memanfaatkan beragam sumber daya, pendidikan, memimpin, jaringan sosial, dan sebagainya. Perempuan memiliki hak yang bebas untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginannya tanpa paksaan dan perintah dari siapapun. Nilai diri dan moralitas seseorang tidak bergantung pada jenis kelamin yang dimiliki. Laki-laki dan perempuan memiliki hakikat sama, walaupun setiap individu berbeda peran dan tugas, tetapi laki-laki dan perempuan memiliki akal yang sama. Perempuan berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama, kesetaraan akan hak, hingga kebebasan dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, perempuan pun berhak untuk memiliki kesadaran dalam menentukan kebebasannya, bekerja sesuai keinginan, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, hingga menolak dirinya untuk dijadikan sebagai objek (Prameswari, et al., 2019).

Berkaitan dengan topik penelitian ini mengenai keberdayaan perempuan, maka penelitian ini turut melihat potensi yang dimiliki perempuan yang sebagai makhluk religius, sosial, budaya, dan individu. Tidak ada perbedaan signifikan mengenai kemampuan dasar potensial dari keduanya yaitu laki-laki dan perempuan (Habibah, 2015). Di dalam diri perempuan terdapat beragam potensi yang pantas untuk diberdayakan dan tidak dibiarkan begitu saja atau menganggap seperti hal yang tidak penting. Potensi yang dimiliki oleh perempuan dapat merubah peradaban perempuan hingga peradaban manusia. Perempuan sama halnya dengan laki-laki yaitu saling diberikan potensi sama dalam berkiprah dengan sinergi melalui asas kemitraan, kerja sama, tolong menolong, mendukung, dan memberikan penguatan dalam suatu kehidupan di masyarakat. Perempuan mampu menjadi pribadi berdikari sebagai pihak yang bertanggung jawab, memiliki prinsip, berdiri sendiri, maupun menempatkan diri sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perempuan berhak mendapatkan kesetaraan dan kesejahteraan dalam semua bidang pembangunan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hingga hukum.

C. Kehadiran dan Perjuangan Gerakan Feminisme

Feminisme dapat dimaknai sebagai ideologi atau paham mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan feminis pun sebagai suatu usaha dalam meningkatkan kedudukan maupun derajat perempuan agar mampu setara dengan laki-laki. Adanya gambaran

terhadap perempuan yang mengikuti kodratnya dipersepsi menjadi hal yang tradisional. Sifat gender perempuan berupa lemah lembut, halus, penuh perasaan, emosional membawa pemaknaan bahwa perempuan tidak patut untuk menempati posisi pemimpin dan dikhawatirkan tidak dapat membuat keputusan (Ma'shimah, 2012). Dengan adanya feminisme maka dapat memberikan perhatian untuk mengatur perbaikan kehidupan sosial dengan bertolak dari relasi kekuasaan yang menyubordinasi perempuan. Gerakan feminisme hadir sebagai respon dari adanya tumpang tindih makna yang tidak dipahami secara baik oleh masyarakat yakni pemaknaan antara gender dan jenis kelamin (Darusalam, 2016). Perempuan dapat memperlihatkan adanya tokoh-tokoh dengan citra perempuan yang kuat dan mendukung nilai-nilai dalam feminisme.

Menurut Hallows (dalam Lubis, 2016), feminisme sebagai suatu kajian (paradigma) yang bertujuan dalam mengungkapkan bahwa pada realitas sosial, politik, budaya, dan lainnya terdapat ketimpangan gender, ketidasan perempuan, hingga stereotip yang tidak benar dan dilekatkan pada perempuan. Selain itu, feminisme pun tidak hanya dimaknai sebagai suatu teori, cara pandang, maupun pemikiran, tetapi dipahami sebagai suatu gerakan. Atas dasar itu, feminisme sebagai gerakan memiliki tujuan dan kepentingan tertentu. Menurut Jackson & Jakie (dalam Lubis, 2016), tujuan dari adanya feminisme yaitu a) menyediakan informasi maupun analisis tentang kehidupan perempuan, b) mengupayakan adanya perubahan sosial dan menghilangkan ketidaksetaraan gender ataupun subordinasi perempuan, c) menjadikan diri sebagai suatu kritik terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada, d) menunjukkan bagaimana perspektif perempuan terhadap ilmu pengetahuan yang belum nampak dalam ilmu pengetahuan sebelumnya.

Teori feminisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme dari Naomi Wolf yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai kuasa dan tidak berarti perempuan sebagai monster, tetapi sebagai aksi positif untuk dirinya maupun orang lain (Hearty, 2015). Dalam pemikiran Wolf, terdapat konsep feminisme kekuasaan yang menggunakan pengalaman perempuan sebagai dasar atas refleksi kekuatan berasal dari dalam diri maupun menyetarakan kekuasaan sama antara laki-laki maupun perempuan (Hammer, 2002). Sedangkan prinsip feminisme kekuasaan dari Wolf berupa a) peran besar dalam kehidupan merupakan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, b) perempuan mempunyai kuasa yang penuh terhadap nasibnya, c) pengalaman perempuan adalah bermakna dan tidak hanya sebatas omong kosong, d) perempuan berkuasa dalam menyatakan kebenaran terhadap pengalamannya, hingga e) perempuan memiliki hak untuk menerima rasa hormat pada segenap aspek kehidupan (Wolf, 1997).

D. Film Sebagai Medium Komunikasi

Film mengkombinasikan kedua elemen yaitu visual dan audio serta menjadikannya sebagai media untuk menyampaikan pesan maupun alat komunikasi massa (Irwanto, 2018). Film dapat berperan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi sikap maupun perilaku sosial politik masyarakat. Selain itu, film dinilai sebagai alat audio visual yang dapat menarik atensi masyarakat.

Hal tersebut disebabkan adanya adegan yang dirasa hidup dengan kombinasi tata warna, suara, kostum, atau panorama dengan nilai estetika. Dengan adanya potensi yang terdapat dalam film maka film dapat sebagai media untuk melakukan proses konstruksi, reproduksi, dan produksi konflik-konflik berkaitan dengan ideologi tertentu. Film mengandung beragam kekuatan yang seringkali tidak disadari oleh penontonnya dan mampu menguatkan ideologi ataupun budaya. Di mana hal tersebut sejalan dengan pemaknaan film yang sebagai ruang untuk diisi dengan pesan maupun informasi yang ditujukan untuk penonton.

Pihak yang mempunyai akses terhadap produksi sinema memiliki posisi besar untuk mengkonstruksi pesan dengan beragam ciri khas dan bentuk. Film pun sebagai media yang berperan dalam mencerminkan realitas sosial dalam masyarakat. Melalui film disajikan ide, makna, pesan yang dimasukkan ke dalam suatu cerita di mana merupakan interaksi mengenai wacana antara sineas film dan masyarakat. Para sineas membangun sebuah objektivasi mengenai ide dan dikonstruksikan secara ulang dengan bentuk simbol maupun teks pada adegan, dialog, *setting*, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa film adalah produk budaya yang pada akhirnya berinteraksi dengan masyarakat pada suatu eksternalisasi yang merupakan titik awal dari konstruksi realitas sosial (Nurbayati, et al., 2017). Realitas sosial dan konstruksi realitas dipadukan di dalam film yang pada akhirnya menjadi sarana bagi masyarakat dalam memahami fenomena yang sedang terjadi. Atas dasar hal tersebut, film menjadi tolak ukur mengenai keadaan masyarakat sebagai refleksi atas realitas sosial yang ada.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba memahami bahwa terdapat beberapa unsur di dalam media film yaitu a) bentuk, berlandaskan pada cara media film membentuk produk genre dan film pun bergantung terhadap cara konstruksi beragam kualitas; b) narasi, menempatkan diri terhadap aspek bentuk yang erat kaitannya dengan konstruksi cerita maupun drama dan narasi mampu membentuk makna dalam sebuah konflik yang dibentuk atas tokoh serta penokohan; c) teks, berhaluan terhadap produk media sehingga seakan-akan produk di dalam *frame* kamera adalah buku yang sedang dibaca; d) genre, konsep yang mengarah terhadap fakta dalam Sebagian besar produksi film di mana membagi ke dalam beragam tipe; e) representasi, film bertujuan dalam menunjukkan kondisi berbagai kelompok sosial yang telah dikategorikan dalam gender, umur, kelas sosial, dan sebagainya; f) *audience*, berkaitan dengan sejauh mana persepsi dan pengalaman sosial individu terhadap pemaknaan materi yang dihadirkan melalui film; g) efek, mengandung makna mengenai bagaimana maupun mengapa produk media mampu mempengaruhi audiens secara aktif ataupun pasif; h) institusi, dimaknai sebagai organisasi atau pihak yang menjalankan dan memiliki kontrol terhadap media serta institusi mampu memelihara kepentingan dari pemilik modal.

E. Representasi Perempuan dalam Media

Media informasi memiliki peran untuk membentuk gambaran mengenai laki-laki dan perempuan. Di mana hal itu berkaitan dengan tanpa adanya pembedaan berkaitan dengan posisi

besar dan kecil, kaya atau miskin, terkhusus di area nilai-nilai yang melampaui batasan (Watie, 2016). Media informasi mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat berupa kesadaran terhadap perempuan. Kesadaran baik bernilai positif ataupun negatif yang dilandasi oleh pesan-pesan yang dimuat dan disebarluaskan melalui bentuk media. Seringkali dihadirkan informasi mengenai perempuan dengan masifnya publikasi narasi mengenai perempuan patuh maupun baik dalam pemikiran laki-laki. Atas kondisi tersebut, terdapat produksi ideologi mengenai keunggulan laki-laki yang mengakibatkan perempuan selalu berada pada keadaan yang dirugikan. Media pun tidak jarang menjadi pihak yang elanggengkan tradisi ataupun prinsip dengan menempatkan perempuan dalam ruang diskriminasi. Di dalam media, seringkali perempuan digambarkan dengan posisi sebagai objek untuk tatapan dan konsumsi dari laki-laki.

Dalam melihat representasi keberdayaan perempuan pada penelitian ini, digunakan teori representasi dari Stuart Hall yang menunjukkan sebuah proses di mana *meaning* diproduksi melalui bahasa hingga dipertukarkan dengan anggota kelompok pada suatu kebudayaan. Representasi pun mengelaborasi terkait dengan konsep pada benak individu dengan bahasa sehingga memungkinkan publik dalam memaknai benda, kejadian, dunia imajinasi dari objek, hingga kejadian yang sifatnya tidak nyata (Hall, 2003). Mendukung hal tersebut, representasi bekerja dalam sistem yang terdiri dari dua aspek krusial berupa konsep dalam pikiran dan bahasa (Surahman, 2014). Konsep atas suatu hal hadir dalam pikiran hingga mampu membuat individu mengetahui maknanya. Akan tetapi, makna tidak akan mampu dikomunikasikan tanpa adanya bahasa. Sehingga yang menjadi hal esensial pada sistem representasi adalah kelompok yang mampu memproduksi hingga bertukar makna dengan optimal merupakan kelompok tertentu dengan latar belakang pengetahuan sama dan menciptakan pemahaman sejalan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Dengan adanya paradigma kritis maka dapat dilihat realitas yang diteliti dan peneliti yang dihubungkan dengan nilai tertentu. Analisis konten dimaknai sebagai suatu alat penelitian yang sengaja diarahkan kepada konten aktual dan fitur internal dalam media. Aspek tersebut digunakan untuk menentukan keberadaan kata, frase, konsep, tema, dan serangkaian teks. Metode analisis wacana kritis dilakukan dengan melalui proses mengkaji terhadap elemen gambar maupun teks yang terdapat di dalam film Yuni. Data yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan dari penelitian yang dilakukan meliputi kajian terkait dengan budaya patriarki, perempuan berdaya, dan film. Sedangkan sumber kajian yang penulis gunakan adalah artikel ilmiah pada jurnal tertentu, buku referensi, maupun artikel dalam *website* yang diakses melalui internet. Film sengaja dipilih oleh peneliti sebagai bahan kajian untuk penelitian ini, di mana film Yuni menarik atensi yang tinggi dan mengandung nilai menarik untuk dikaji. Selain itu, melalui film dapat

disampaikan pesan dengan olahan visual, audio, dan narasi yang penuh dengan unsur seni. Dapat dikatakan bahwa subjek dari penelitian ini adalah film Yuni dengan objek penelitian berupa wacana perempuan berdaya yang dihadirkan melalui *scene-scene* tertentu dalam film Yuni.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2018), penelitian tidak hanya berfokus pada teks semata karena teks adalah hasil dari produksi sehingga perlu juga mengamati proses produksi teks. Analisis wacana van Dijk digambarkan dengan adanya tiga dimensi berupa teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis wacana kritis ini adalah menggabungkan dan melakukan elaborasi terhadap ketiga dimensi dalam satu kesatuan analisis. Pertama, aspek teks yang diteliti yaitu bagaimana struktur teks dan strategi wacana digunakan dalam menegaskan tema tertentu. Kedua, aspek kognisi sosial di mana adanya proses produksi teks yang berkaitan dengan sisi kognisi individu. Kognisi sosial berkaitan dengan kesadaran pengetahuan, prasangka, dan pengetahuan produsen teks terhadap sebuah peristiwa. Ketiga, aspek konteks sosial yakni memuat wacana yang berkembang dalam masyarakat dan berkaitan dengan isu atau fenomena yang sedang hadir. Selain itu, berkaitan pula dengan mendalami wacana mengenai hal tertentu yang sedang diproduksi maupun dikonstruksi dalam masyarakat. Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk menjadi metode yang relevan dalam penelitian ini karena dapat mengkaji film Yuni dengan melihat beragam tataran berupa teks, kognisi sosial, dan konteks sosial sehingga data yang dihasilkan mampu bersifat komprehensif maupun tidak tertutup pada dimensi tertentu saja.

Hasil dan Pembahasan

Representasi mengenai perempuan berdaya yang dihadirkan melalui film Yuni dapat diketahui dengan tiga dimensi wacana berupa teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dengan sebagai berikut.

A. Dimensi Teks

1. Struktur Makro

Struktur makro mengandung makna secara umum maupun keseluruhan dengan topik yang diangkat dan adanya elemen yang saling berkaitan. Superstruktur sebagai strategi penulis yang berkaitan dengan pengemasan pesan yang mengandung penekanan bagian yang didahulukan dan diakhirkan. Dapat dikatakan bahwa skematik merupakan alur mulai dari orientasi hingga akhir yang mencakup konflik dan ending. Di mana pada film Yuni dimulai dengan kehidupan Yuni sebagai siswa SMA, terdapat konflik berupa pelanggaran budaya patriarki dengan isu keperawanan, pernikahan, pendidikan, hingga diakhiri dengan pembatalan pernikahan oleh Yuni. Skematik adalah rangkaian alur cerita yang bertujuan dalam membentuk suatu arti di dalam film. Ketika menonton suatu film Yuni, maka pada awal dimulai pandangan penonton diarahkan pada rutinitas Yuni sebagai seorang siswa di sekolah menengah atas. Di

mana ia adalah siswa berprestasi dan dikenal memiliki kemampuan dalam akademik dan nonakademik pada bidang musik. Akan tetapi, Yuni tinggal dalam lingkungan yang sangat berprinsip terhadap budaya patriarki.

Kebebasan perempuan dalam lingkungan Yuni adalah hal yang sulit ditemukan dan susah untuk dilakukan. Sebagai seorang remaja, Yuni mencoba untuk keluar dari zona patriarkal yang melekat dikehidupan sosialnya. Film ini menekankan terhadap konflik dalam diri Yuni dan lingkungan sekitar Yuni terkait dengan stigma negatif terhadap perempuan. Yuni dihadapkan dengan betapa susahny ia menentukan dan mewujudkan mimpinya untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu, Yuni yang selalu dikejar-kejar oleh tuntutan untuk menerima lamaran dan melakukan pernikahan dini. Hingga pada akhirnya, Yuni menunjukkan kebebasannya dengan memilih pilihan sendiri, mengembangkan dirinya, mendapatkan hal baru, dan menolak untuk menikah dalam umurnya yang masih remaja. Sub topik di dalam film Yuni yang kaitannya dengan representasi perempuan bedaya antara lain:

- Perempuan yang pintar dan cerdas



Gambar 1, 2. Yuni sebagai siswa yang memiliki akademis dan nonakademis yang baik

Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Yuni adalah seorang siswa yang pintar di sekolahnya bahkan sudah terkenal pada kalangan guru. Ia mendapatkan tawaran untuk mengajukan beasiswa karena gurunya yakin bahwa ia adalah siswa yang pintar dan memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perempuan berhak mendapatkan akses pendidikan setinggi-tingginya dan tidak ada pembeda yang terjadi antara perempuan maupun laki-laki. Perempuan pun sama seperti laki-laki sebagai makhluk Tuhan dengan segala potensi dan daya nalarnya. Pendidikan justru akan menjadikan perempuan semakin maju dan memberikan dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa modern sekarang, perempuan memiliki kebebasan dalam melanjutkan pendidikan dan memberikan kesempatan untuk perempuan pada perolehan kesetaraan sosial yang sama dengan laki-laki (Rokhmansyah, 2016). Sehingga setiap perempuan memiliki kebebasan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan termasuk mewujudkan mimpinya dalam hal

pendidikan.

- Aktif mengikuti kegiatan yang membangun diri



Gambar 3. Yuni mengikuti kegiatan olahraga yaitu pencak silat
Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Kegiatan Yuni tidak terbatas hanya di ruang kelas dan tempat sekolah saja. Akan tetapi, Yuni aktif mengikuti pencak silat. Bahkan ia dengan percaya dirinya mengajukan diri untuk menguji kemampuannya dan bertanding dengan seorang laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang memiliki otoritas sendiri terhadap dirinya. Peran perempuan pun tidak hanya terbatas di ruang-ruang tertutup ataupun rumah yang jauh dari jangkauan publik. Akan tetapi, perempuan memiliki keleluasaan dalam melakukan eksplorasi kegiatan apapun yang diminatinya selama itu sesuai dengan keputusan pribadinya dan mendatangkan dampak untuk dirinya berkembang. Bahkan perempuan telah memiliki peran dan kontribusi yang progresif dalam sektor produktif. Terdapat pula beberapa alasan yang mendasari perempuan turut aktif dalam dunia kerja berupa kondisi eksternal, motif ekonomi, motif psikologis, hingga tanggung jawab sosial (Nofianti, 2016).

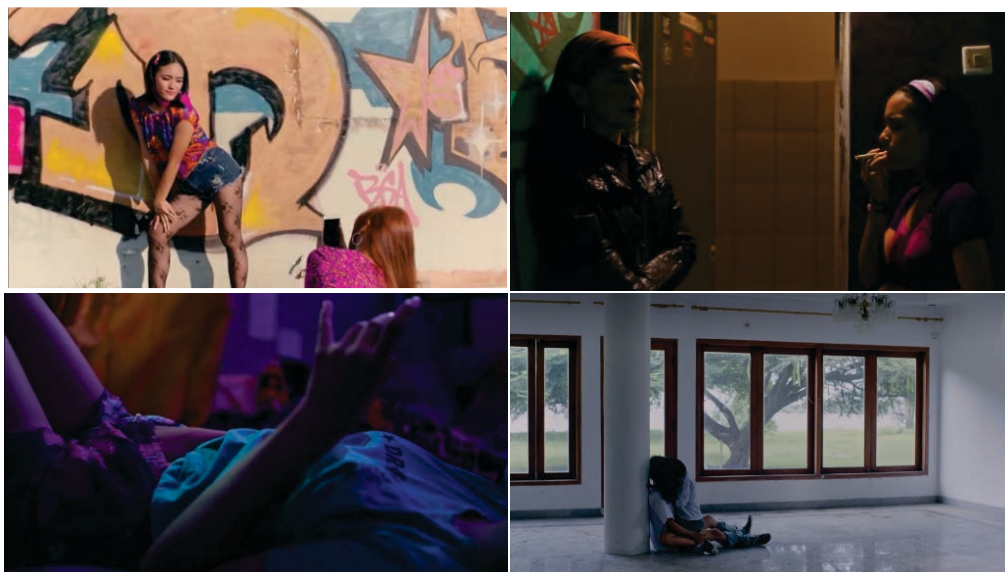
- Berani untuk tampil di publik



Gambar 4. Yuni sedang menyanyi lagu Tua-Tua Keladi di depan umum.
Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Dengan memiliki kemampuan di bidang musik, skill menyanyi Yuni tidak diragukan lagi. Yuni memilih untuk mengajukan diri dan menyanyi di depan umum sebagai bentuk aktualisasi kemampuannya dan menunjukkan bahwa ia mampu. Perempuan bukanlah aurat yang harus ditutup rapat-rapat ataupun dilindungi. Perempuan juga bukan makhluk yang lemah dengan segala stigma yang telah melekat pada dirinya. Hal tersebut bertentangan dan melawan terhadap perempuan yang selama ini dipandang sebelah mata maupun mempunyai batasan diri sehingga diri perempuan dianggap sebagai aurat (Mannan, 2021). Potensi yang dimiliki oleh perempuan hendaknya disalurkan agar publik dapat mengetahui keberdayaannya. Perempuan berhak memperoleh apresiasi dan validasi positif dari masyarakat. Segala bentuk dukungan yang hadir mampu menumbuhkan semangat-semangat baru untuk membangun kehidupan yang saling mendukung dalam masyarakat.

- Berinisiatif dan mengekspresikan diri



Gambar 5, 6, 7, 8. Yuni mengeksplorasi beragam hal untuk memperoleh nilai *freedom*

Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Yuni ingin memiliki hidup yang bebas dari budaya patriarki yang melekat di sekelilingnya. Ia pun berkenalan dengan orang-orang baru dan mendapatkan banyak *insight* untuk mencapai titik diri sendiri yang sebenar-benarnya. Perempuan memiliki kebebasan untuk bertujuan dan melakukan aktualisasi terhadap dirinya. Batasan-batasan yang selama ini dilekatkan oleh masyarakat yang sarat akan budaya patriarki telah menempatkan perempuan dalam ruang penuh belunggu. Perempuan bebas untuk menentukan apapun pilihannya dan hal apa yang hendak ia tunjukkan kepada dunia. Perempuan pun berhak

untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat dengan segala jati diri yang ia miliki tanpa harus dibebankan oleh pemikiran patriarkal. Sesuai dengan pemikiran Purnamawati (2012) dan Saputri & Himam (2015), bawa perempuan berdaya merupakan perempuan yang mandiri, mengembangkan diri, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, mempunyai *passion*, peka dengan lingkungan, hingga berwawasan luas.

- Memiliki prinsip dan memilih jalan hidup sendiri



Gambar 9, 10, 11. Yuni menolak lamaran dan pernikahan terkait dengan dirinya.

Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Yuni yang telah menyadari kemampuannya dan paham akan dirinya sendiri selalu menentukan pilihan secara sadar maupun tanpa paksaan orang lain. Mulai dari keputusannya untuk melanjutkan pendidikan, mencoba hal-hal baru sebagai sarana ekspresi diri, menolak lamaran dua laki-laki, dan membatalkan acara pernikahannya. Hidup perempuan sepenuhnya ada di tangan dirinya sendiri. Terkhusus mengenai pasangan dan segala mimpi yang dimiliki. Menentukan mimpi dan menggapainya adalah hak perempuan yang patut dihormati. Selain itu, memaksa perempuan untuk menikah pun adalah hal yang sangat tidak etis. Perempuan sendiri yang tahu mengenai dirinya, pandangan hidupnya, dan segala hal yang bersifat prinsip. Berdasarkan pada Vida (2017), seiring dengan hadirnya kesadaran perempuan terhadap upaya untuk mewujudkan cita-cita, maka menikah maupun mengasuh anak kini bukan menjadi tujuan utama dalam hidup. Perempuan hendaknya tidak disuruh untuk memilih satu hal atau hal lainnya, tetapi perempuan berhak dalam menentukan semua hal yang akan dilakukannya.

2. Struktur Mikro

Analisis terhadap elemen mikro terdiri dari semantik, sintaksis, dan retorik. Produsen film Yuni menampilkan beragam elemen retorik berupa grafis, ekspresi, dan metafora yang bertujuan untuk memperjelas eksistensi Yuni sebagai perempuan yang berdaya. Yuni memiliki kebebasan untuk melakukan hal yang ia sukai dengan menggunakan *smartphone* dan media sosial

yang dimilikinya. Selain itu, elemen retorik juga menegaskan bahwa Yuni yang tidak berminat untuk menikah dini dan memilih melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

- Semantik

Semantik adalah bagian yang nantinya menentukan arah pandangan khalayak dibawa serta membantu khalayak untuk mendapatkan pemaknaan terhadap sebuah peristiwa.

Tabel 1. Latar



Tabel 2. Detail



Tabel 3. Maksud



Ibu (tetangga Yuni): “Yun, kumaha lamarannya diterima teu?”
 Yuni: “Inggih bu masih dipikiraken, embuh lah kayane yuji pengen sekolah dimin.”



Ibu (tetangga Yuni): *“Kunaon sekolah luhur luhur, awewe mene penting dapur sumur Kasur.”*

Tabel 4. Pra-anggapan
Sumber: Olahan peneliti (2023)

- Sintaksis

Sintaksis terbagi menjadi dua bagian berupa koherensi dan pengingkaran. Koherensi dimaknai sebagai teks. Sedangkan pengingkaran sebagai praktik wacana yang mengandung bagaimana produsen teks memberikan pesan secara implisit.

Tabel 5. Koherensi



Ibu Guru: *“Percaya deh arek ibu. Kekurangan sireu ye cuma penyakit ungu.”*

Tabel 6. Pengingkaran



Yuni: *“ML ki rasane kepie tah?”*
Teman-teman Yuni: *“Hush yun, jangan tanya kaya gitu”*

Sumber: Olahan peneliti (2023)

- Stilistik

Melalui stilistik ditunjukkan adanya pemilihan kata yang merujuk pada sikap ataupun

ideologi yang dianut.

Tabel 7. Stilistik



Yuni: *"ML ki rasane kepie tah?"*
 Teman-teman Yuni: *"Hush yun, jangan tanya kaya gitu"*

Sumber: Olahan peneliti (2023)

- Retoris

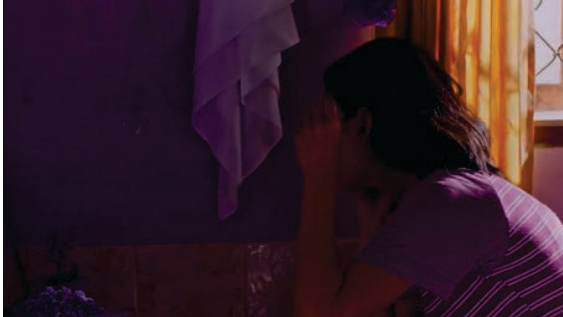
Di dalam retoris terdapat beragam elemen yang bertujuan dalam mengetahui aspek yang ditekankan dalam teks, memaknai maksud teks, hingga melihat hal yang ditonjolkan oleh produsen teks. Analisis terhadap elemen mikro terdiri dari semantik, sintaksis, dan retoris. Produsen film yuni menampilkan beragam elemen retoris berupa grafis, ekspresi, dan metafora yang bertujuan untuk memperjelas eksistensi Yuni sebagai perempuan yang berdaya. Yuni memiliki kebebasan untuk melakukan hal ia sukai dengan menggunakan *smartphone* dan media sosial yang dimilikinya. Selain itu, elemen retoris juga menegaskan bahwa Yuni yang tidak berminat untuk menikah dini dan memilih melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel 7. Grafis



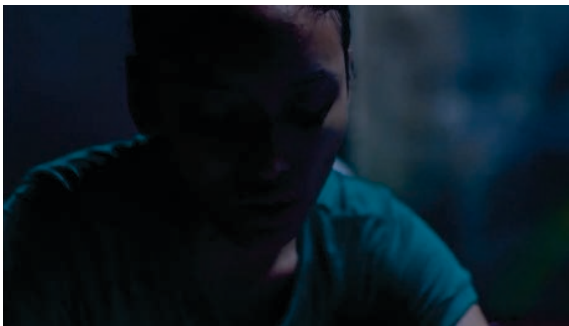
Sumber: Olahan peneliti (2023)

Tabel 8. Metafora



Yuni: *"Yuni keh ora pernah mikirin nikah buk, mikirin pacar weh ora"*

Tabel 9. Ekspresi



Yuni: *"Iye mau bu lis ngekon yuni arep nerusakan nang perguruan tinggi ora? Jare kon ngobrol karo ibu bapak"*

Sumber: Olahan peneliti (2023)

B. Dimensi Kognisi Sosial

Analisis dimensi kognisi sosial bertujuan dalam mengamati ideologi yang dihadirkan oleh pihak pembuat teks yang terlibat dalam pembuatan film Yuni. Model yang digunakan dalam melihat realitas perempuan berdaya dalam film Yuni merupakan model peristiwa. Di mana produsen teks melakukan riset terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan budaya patriarki serta merugikan pihak perempuan. Kemudian hal tersebut tentunya perlu didekonstruksi agar masyarakat tereduksi dan mampu membuka lebih jauh pikirannya. Budaya patriarki yang dilanggengkan oleh kehidupan sosial menjadi hal yang dapat dihindarkan demi kemajuan masyarakat terkhusus perempuan.

Analisis wacana kritis Teun A. van Dijk tidak hanya terbatas pada proses analisis teks saja. Akan tetapi, analisis wacana kritis Teun A. van Dijk pun mendalami terkait dengan kognisi sosial yang dimaknai sebagai bagian proses dalam produksi teks pada film. Film Yuni dilatarbelakangi dengan kondisi pada banyak perempuan di Indonesia yang mengalami pernikahan dini dan berakibat pada tidak adanya akses untuk melanjutkan segala mimpi mereka (Bantennews., 2021). Selain itu, melalui film Yuni pihak sineas hendak mendobrak hal-hal yang selama ini dianggap tabu terkhusus bagi perempuan.

Selama ini perempuan seringkali dibebankan dengan tugas menjaga diri dan masa depan yang terbatas dengan tujuan utama menjadi seorang istri. Dalam film Yuni pun para tokoh berinteraksi

menggunakan Bahasa Jawa Serang. Di mana tujuan dari hal tersebut untuk memakai Bahasa daerah yang berasal dari latar tempat film Yuni yaitu Cilegon, Banten. Film Yuni kental dengan nuansa warna ungu yang merupakan barang-barang yang dimiliki Yuni dan warna kesukaan Yuni. Nuansa ungu yang selalu dihadirkan dalam film Yuni menjadi simbol gerakan perempuan dan warna ungu biasanya digunakan dalam memperingati Hari Perempuan internasional. Upaya tersebut pun berkelindan dengan bagaimana mengubah stigma atas warna ungu yang seharusnya sebagai simbol terkait perjuangan perempuan dikonstruksi sebagai mitos janda oleh logika patriarkal (Khanifah, 2023).

C. Dimensi Konteks Sosial

Analisis dimensi konteks sosial melihat bahwa bagaimana wacana dapat dibentuk dengan melalui akses yang hadir di masyarakat. Akses perempuan terhadap sektor publik dan aktualisasi diri masih menjadi hal yang sulit dilakukan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian khusus untuk memberikan pemahaman bahwa perempuan juga sebagai makhluk yang bebas untuk berperan. Selain itu, adanya tuntutan bagi perempuan untuk menikah dini dan menjadi ibu rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan secara dini dapat mendatangkan hal-hal negatif berkaitan dengan kesiapan mental, fisik, ekonomi, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, perempuan memiliki andil bagi publik yang tidak hanya dibatasi untuk aktif di ruang rumah tangga saja. Hal-hal tersebut perlu untuk disajikan bagi masyarakat agar masyarakat mampu memaknai dan melakukan perubahan terhadap budaya patriarki yang telah mengakar.

Di dalam analisis wacana kritis Teun A. van Dijk terdapat analisis sosial yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana wacana mampu diproduksi hingga dikonstruksi dalam masyarakat. Konteks sosial di dalam film Yuni memperlihatkan bagaimana masyarakat memaknai wacana yang berkembang mengenai budaya patriarki yang telah mengakar. Berdasarkan pada *scene-scene* yang telah peneliti teliti didapatkan hasil bahwa film Yuni menggambarkan perempuan tetap mampu berdaya meskipun belenggu patriarki telah terkonstruksi di dalam banyak aspek kehidupan. Dalam film Yuni diperlihatkan adanya beragam keterbatasan bagi perempuan untuk berkembang dan memiliki andil pada bagian ataupun posisi yang sentral.

Perempuan diwajibkan untuk tetap perawan hingga ia menikah. Masyarakat menganggap keperawanan adalah hal yang sakral dan wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian, adanya pemikiran bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi. Hal itu berkaitan dengan prinsip bahwa tempat perempuan hanya di rumah dengan tugas domestik dan mengurus rumah tangga. Perempuan pun dituntut untuk menikah secara cepat dan menolak ajakan lamaran atau pernikahan menjadi hal tabu. Tolakan tersebut dianggap mampu mendatangkan hal-hal negatif di kemudian hari. Bahkan pembahasan mengenai hal yang berbau seksual menjadi hal yang harus ditutup rapat-rapat. Suatu kenikmatan perempuan menjadi hal yang tabu dan dianggap bukan hal yang penting, tidak seperti laki-laki yang dengan bebas mendapatkan kenikmatan terkait dengan seksualitasnya. Temuan tersebut selaras dengan Walby (dalam Puluhulawa, 2021) bahwa patriarki

sebagai suatu struktur sosial dan praktiknya yang memposisikan laki-laki pada posisi superior. Sehingga kondisi tersebut pun menyebabkan laki-laki berkuasa dalam mendominasi, menindas, hingga melakukan eksploitasi terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai representasi perempuan berdaya dalam film Yuni maka didapatkan kesimpulan, antara lain:

- Perempuan berdaya digambarkan dengan adanya perempuan yang pintar dan cerdas, aktif mengikuti kegiatan yang membangun diri, berani untuk tampil di publik, berinisiatif dan mengekspresikan diri, memiliki prinsip dan memilih jalan hidup sendiri.
- Proses produksi film dan narasi yang ada didalamnya selalu berkaitan dengan ideologi yang dibawa oleh pihak produsen. Di mana hal tersebut berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatkannya. Sehingga apa yang didapati mampu bersumber sebagai suatu kehadiran dari karya dan disajikan kepada masyarakat. Selain itu, aspek situasi di masyarakat pun menjadi bagian pembentuk dari film. Dengan begitu diharapkan film yang diproduksi dapat dimaknai dengan baik agar memiliki pemikiran baru terkait dengan perempuan berdaya yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan patriarkal.

Daftar Pustaka

- Andi, M. P. (2016, September 27). *Gerakan perempuan dan wacana feminisme di Indonesia*. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/gerakan-perempuan-dan-wacana-feminismedi-indonesia>
- Bantennews. co.id. (2021, September 11). *Alasan sutradara bikin Film 'Yuni' berbahasa dialek Banten*. Bantennews. <https://www.bantennews.co.id/alasan-sutradara-bikin-film-yuni-berbahasa-dialek-banten/>
- Darusalam, Z. (2016). Kajian feminisme novel Maimunah "Cinta Sang Perawan" karya Charisma W. *Inovasi Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2(15), 18–25.
- Eriyanto. (2018). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LkiS Yogyakarta.
- Habibah. (2015). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *Sosioreligius*, 1(1).
- Hall, S. (2003). *"The Work of Representation", Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. Sage.
- Hammer, R. (2002). *Antifeminism and family terrorism: a critical feminist perspective*. Rowman and Littlefield Publisher Inc.

- Hearty, F. (2015). *Keadilan jender: Perspektif feminis muslim dalam sastra Timur Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayati, N. (2016). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2). <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/516>.
- Israpil, I. (2017). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Israpil. (2017). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141. <https://blamakassar.ejournal.id/pusaka/article/view/176/144>.
- Kemenppa.go.id. (2020, November 12). *Punya banyak potensi, perempuan mampu kembangkan kiprah di dunia bisnis dan digital*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2947/punya-banyak-potensi-perempuan-mampu-kembangkan-kiprah-di-dunia-bisnis-dan-digital>.
- Kuncoro, A., & Kadar, K. (2016). Pengaruh pemberdayaan perempuan dan peningkatan sumberdaya ekonomi keluarga. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.67>.
- Kurniawati, J., et al. (2019). Selfie objectification: representation of hijabed women in Instagram. The 10th IGSSCI (International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia) Page 166
NEW MEDIA AND THE CHANGING SOCIAL LANDSCAPE OF CONTEMPORARY SOCIETIES: How Are New Media Reshaping the Whole Aspects of Life Of contemporary Societies?. 166–180. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i20.4934>.
- Lubis, A. Y. (2016). *Pemikiran kritis kontemporer. Dari teori kritis, cultural studies, feminisme, postkolonial hingga multikulturalisme*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ma'Simah, L. A. (2012). Teks-teks keislaman dalam kajian feminisme muslim": Telaah metodologis atas pandangan feminis muslim terhadap penciptaan dan kepemimpinan perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 67–90. [10.21580/sa.v7i2.650](https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.650).
- Mannan, A., Farida, S. N., & Rozy, F. (2021). Penguatan pendidikan perempuan (peran perempuan dalam agama, keluarga, dan kehidupan sosial di masa modern). *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 5, 1–35. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>.
- Nada, S. (2021). *Mempertanyakan masa depan perempuan dan perjuangan feminisme di Indonesia bersama Tunggal Pawestri*. White Board Journal. <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/mempertanyakan-masa-depan-perempuan-dan-perjuangan-feminisme-di-indonesia-bersama-tunggal-pawestri/>.
- Nasri, D. (2017). Ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam novel Padusi karya Ka'bati. *Madah Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(2). [225.10.26499/madah.v7i2.431](https://doi.org/10.22510.26499/madah.v7i2.431).
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(1), 53–64. <http://dx.doi.org/10.24014/>

marwah.v12i1.513.

- Nofianti, L. (2016). Perempuan di sektor publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(1), 51–61. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v15i1.2635>.
- Nur, S. (2019). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK KESETARAAN & MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10(1), 99–111. <http://dx.doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388>.
- Nurbayati, N., et al. (2019). Konstruksi media tentang aspek kemanusiaan pada poligami (analisis isi terhadap film *Surga Yang Tak DiRindukan*). *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 8(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRKom/article/view/6021>.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1). <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/878>.
- Prameswari, N. P. L. M., Nugroho, W. B., & Mahadewi, N. M. A. S. (2019). Feminisme eksistensial Simone de Beauvoir: Perjuangan perempuan di ranah domestik. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(2), 1–13.
- Puluhulawa, D. (2021). Patriarchy reproduction in Mamah Dedeh's da'wah materials. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 3(2), 53–63. <http://dx.doi.org/10.31958/agenda.v3i2.4633>.
- Purnamawati, A. (2012). Media, perempuan, dan kemandirian. In *Citra Perempuan Dalam Media* (pp. 57–64), Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/77>.
- Risal, Y., & Nisa, F. K. (2021). Reinterpretasi dan dekonstruksi fenomena sosial dalam film (analisis pada film fiksi pendek *Srinthil*). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 5(1), 84–95. <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v5i1.3686>.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawacana.
- Sakia, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Saputri, R. K., & Himam, F. (2015). Mindset Wanita Pengusaha Sukses. *Jurnal Psikologi*, 42(2), 157. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7170>.
- Sari, K. W., & Haryono, C. G. (2019). Hegemoni budaya patriarki pada film (analisis naratif Tzvetan Todorov terhadap film *Kartini* 2017). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 12(1). <http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v12i1.1542>.
- Sobur, A. (2006). *Semiotika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam dinamika perjuangan gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v3i1.42>.
- Surahman, S. (2014). Representasi perempuan metropolitan dalam film *7 Hati 7 Cinta 7 Wanita*. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1).

Vida, H. D. (2017). Feminisme dalam majalah perempuan. *Sociae Polites*, 153–168.

Walby, S. (2014). Teorisasi patriarki (terjemahan Mustika K Prasela). Jalsutra.

Watie, E. D. S. (2016). Representasi wanita dalam media massa masa kini. *Jurnal The Messenger*, 2(2), 1–10.

<http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v2i2.297>.

Wolf, N. (1997). *Geger gender*. Pustaka Semesta Press.

Representasi Kritik Sosial dalam Karikatur Serangan IDF terhadap Rumah Sakit As-Syifa Palestina

Alam An Shori	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: 230301210012@student.uin-malang.ac.id
Umami Hasanah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: ummihsnh2492@gmail.com
Melinda Raswari Jambak	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: 230301210022@student.uin-malang.ac.id
Wildana Wargadinata	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: wildana@bsa.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The IDF (Israel Defense Forces) raid on As-Shifa hospital is a serious problem as it is related to international humanitarian rules regarding civilian objects. Emad Hajjaj on his Instagram account criticized this behavior with caricatures. This study aims to (1) uncover the representation of social criticism in Emad Hajjaj's caricature on Instagram and (2) uncover the factors behind caricature making. The primary data source comes from two caricatures on Emad Hajjaj's Instagram account, while the secondary data comes from books, journals, news, and articles relevant to this study. This type of research is qualitative research using the semiotic approach of Roman Jakobson's perspective and Gillin and Gillin's theory of social criticism. The data collection techniques used are screenshots, reading, and notes. Data analysis techniques use the Miles and Huberman technique which consists of data reduction, data presentation, and conclusions. The result of this study is that there are two types of representations of social criticism in Emad Hajjaj's caricature related to the attack on IDF soldiers, namely socio-political criticism and social moral criticism. The background to the criticism was a response to the actions of IDF soldiers.

Keyword: Social Criticism, Caricature, Semiotics, Roman Jakobson

Pendahuluan

Kritik sosial adalah bentuk komunikasi masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kontrol terhadap jalannya sistem pada kehidupan sosial. Dalam ranah kehidupan social di masyarakat, kritik sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan dari sisi oposisi terhadap pemerintah atau pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur kebijakan (Aritonang, 2022). Kritik sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik sosial secara langsung dan tidak langsung. Beberapa bentuk kritik sosial langsung dilakukan secara aksi nyata di lapangan seperti unjuk rasa dan demonstrasi. Sedangkan bentuk kritik sosial tidak langsung dilakukan dengan berbagai media yang dapat menyampaikan sebuah kritik. Seperti halnya kritik dalam lagu, puisi, film, novel, dan pertunjukkan (Heru Dwi Waluyanto, 2000). Berbagai bentuk kritik sosial yang dilakukan oleh masyarakat memiliki latar belakang dan dampaknya masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah kritik dilakukan untuk memberikan sebuah perubahan dan perbaikan. Kritik sosial harus dipoles hingga mampu memahami dan menyampaikan pesan kritik sesuai dengan maksud dan tujuan (Waluyanto, 2000).

Dalam sebuah negara yang berdaulat dan mendukung penuh keberadaan demokrasi di tengah masyarakat, akan membuka peluang besar untuk terciptanya kritik sosial dari masyarakat (Itiqomah & Sofyan, 2015). Negara demokratis berpendapat bahwa kritik sosial perlu ditampung dan dipertimbangkan sebagai aspirasi masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan setiap kritik sosial yang disampaikan guna menciptakan lingkungan demokratis yang sesungguhnya (Rizkyaningtyas et al., 2018).

Namun, kritik sosial tidak selalu mudah untuk dilakukan. Keduanya baik kritik sosial secara langsung ataupun tidak langsung memiliki resiko masing-masing (Salim & Sukendro, 2021). Kritik sosial secara langsung kerap kali berakhir ricuh dan menimbulkan kekacauan berkepanjangan. Seperti setiap saat terjadi demo yang selalu berakhir dengan bentrok antara aparat dan masyarakat. Begitu pula dengan kritik sosial secara tidak langsung, banyak hal yang bisa diupayakan untuk melakukan kritik. Berbagai macam bentuk kritik tentu dilakukan oleh masyarakat untuk menyuarakan protes di ruang terbuka. Hal tersebut tentu memberikan ancaman pada pihak yang dikritik (Wulandari & Hayati, 2023). Seperti yang terjadi pada masa sebelum reformasi, di mana pemerintah melakukan penangkapan pada para aktivis yang juga seorang sastrawan karena dianggap membahayakan negara dengan membangkitkan semangat masyarakat pembelot menggunakan karya-karyanya (Septiani & Nuraeni, 2022).

Namun, dewasa ini kebebasan berpendapat lebih dihargai dan dijaga oleh berbagai pihak (Hieu, 2021). Hal tersebut membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih semangat dalam memberikan kritik sosial. Bukti nyata dari hal tersebut adalah merebaknya berbagai kritik sosial yang dilakukan masyarakat di berbagai media, yang paling utama adalah media sosial (Khasanah & Solichin, 2023). Kritik di media sosial banyak diminati karena dianggap ampuh dalam menyatakan salah satu pihak yang menjadi objek kritik. Seperti halnya dalam kebebasan berpendapat di Indonesia yang memperbolehkan masyarakat untuk mengkritik segala kebijakan pemerintah yang dianggap kurang sesuai. Hal tersebut dilakukan karena urgensi komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemimpin dalam satu negara. Seorang pemimpin negara juga perlu untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk berdiskusi terkait kebutuhan dan kekurangan dalam sistem pemerintahan (Aprianto et al., 2023).

Menurut konsep sosiologi yang diusung oleh Gillin dan Gillin dalam (Safitry and Tjahjono, 2023) menyatakan bahwa kritik sosial didasarkan pada masalah yang muncul dalam masyarakat dan dianggap sebagai gejala patologis. Dalam konteks pengembangan konsep masalah sosial menurut Gillin dan Gillin, kritik sosial dapat dikelompokkan menjadi sembilan jenis, yaitu politik, ekonomi, pendidikan, keluarga, moral, gender, kebiasaan, agama, dan teknologi. Kritik sosial politik adalah pendekatan analitik yang menitikberatkan pada evaluasi dan kritik terhadap elemen-elemen politik dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan analisis, pemahaman, serta penilaian terhadap berbagai aspek politik, termasuk struktur institusi politik, dinamika proses politik, kebijakan publik, dan peran pemerintah dalam penggunaan kekuasaan (Cantona and Alfirdaus, 2022).

Salah satu topik yang ramai diperbincangkan hari ini adalah topik terkait genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Sejak terjadinya peristiwa tanggal 7 Oktober yang menimbulkan kemarahan pemerintahan Israel, serangan-serangan terus berdatangan dari Israel. Dalam menanggapi fenomena serangan antara Israel dan Palestina masyarakat digital banyak berbeda pendapat. Berbagai pendapat dan pandangan disampaikan dalam berbagai media massa. Seperti ramai di media youtube melalui video dan media lainnya seperti instagram dan twitter. Instagram dan Twitter adalah media sosial yang paling ramai digunakan dalam memberikan kritik oleh masyarakat, karena media tersebut mudah dijangkau dan digunakan (Fitrah et al., 2019).

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Palestina oleh Tentara Israel yang menjadi topik perbincangan hampir tiap tahun (Yuliantiningsih, 2009; Zhafira, 2023). 14 November 2023 adalah saksi bagaimana tindakan keji IDF (*Israel Defense Forces*) terhadap salah satu rumah sakit di Gaza. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit As-Syifa. Israel melakukan pengeboman terhadap kompleks Rumah Sakit As-Syifa dengan menggunakan fosfor putih yang sebenarnya dilarang secara internasional. Sebagaimana jika kita merujuk kepada *the rules of International Humanitarian Law* dalam aturan 2 dinyatakan tentang larangan melakukan teror terhadap penduduk sipil (Zagoto et al., 2023) dan aturan 3 yang menyatakan bahwa semua anggota angkatan bersenjata salah satu pihak yang berkonflik adalah kombatan, kecuali tenaga medis dan keagamaan (Jean-Marie Henckaerts dalam Fadly, n.d.). 39 anak-anak bahkan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif terancam meninggal di RS Al-Shifa karena persediaan oksigennya hampir habis sebagaimana keterangan dari Mai al-Kaila selaku Menteri Kesehatan Palestina (Mayadeen, 2023).

Pasca penyerangan Rumah Sakit as-Syifa oleh tentara Israel tersebut, kondisi rumah sakit sangat memprihatinkan. Berdasarkan keterangan Menteri Kesehatan Palestina, Rumah Sakit As-Syifa mengalami kekurangan oksigen dan air, sehingga banyak pasien yang mengalami kehausan. Mai al-Kaila selaku Menteri Kesehatan Palestina menambahkan bahwa kondisi di Rumah Sakit as-Syifa tersebut sangat memprihatinkan, mengingat rumah sakit tersebut saat ini sedang menampung lebih dari 650 pasien, 500 staf medis, dan 5000 pengungsi (BBC, 2023c).

Penyerbuan tentara Israel terhadap kompleks Rumah Sakit as-Syifa bukan tanpa sebab. Israel beralasan bahwa penyerbuan tersebut karena sebagaimana klaim Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Hamas dan Jihad Islam menggunakan Rumah Sakit as-Syifa sebagai pusat komando. Menanggapi tuduhan tersebut, pada tanggal 15 November 2023 Hamas menyeru PBB untuk membentuk komite internasional dalam rangka menginvestigasi semua rumah sakit untuk menguak kepalsuan narasi Israel dan sekutunya yakni Amerika Serikat (Nugroho, 2023).

Peristiwa penyerbuan pasukan IDF terhadap Rumah Sakit as-Syifa di atas sangat patut untuk dikritik. Munculnya kritik sosial disebabkan karena masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tersebut kemudian memicu kritikan atau tanggapan dari masyarakat, karena beranggapan sistem yang sedang berlangsung di masyarakat mengalami ketidakselarasan antar aspek.

Menurut Gillin & Gillin, kritik sosial terjadi karena adanya gejala patologis dalam masyarakat (Safitry & Tjahjono, 2023:49-50). Begitu juga ketika memandang peristiwa penyerbuan Rumah Sakit as-Syifa oleh penjajah Israel, peneliti memandang bahwa hal tersebut merupakan bentuk ketidakselarasan antar aspek. Peristiwa memalukan itu tidak selaras dengan aspek kemanusiaan. Kemudian menurut Gillin & Gillin, kritik sosial diklasifikasikan menjadi 9 macam yakni politik, ekonomi, pendidikan, keluarga, moral, gender, kebiasaan agama, serta teknologi (Safitry & Tjahjono, 2023: 50).

Terdapat beragam cara dan media untuk menyampaikan kritik sosial. Penyampaian tersebut dapat melalui ungkapan-ungkapan sindiran melalui komunikasi personal maupun sosial melalui pertunjukan sosial, hingga kesenian dalam komunikasi publik, seni sastra, dan media masa (Mas'ood dalam Safitry & Tjahjono, 2023 h. 50). Salah satu bentuk kritik terhadap perlakuan keji Israel tersebut adalah kritik dalam bentuk karikatur. Peneliti meneliti 2 karikatur yang memuat kritik tersebut. Masing-masing karikatur itu berjudul *افتحام مستشفى الشفاء بغزة مخزاة اخرى تضاف لمخزاي الاحتلال اليرائيلي* yang diunggah di *Instagram* oleh akun @hajjaj_cartoons pada tanggal 15 November 2023 dan karikatur serupa tetapi tanpa disertai judul diunggah oleh akun Instagram yang sama pada tanggal 18 November 2023.

Untuk menganalisis kritik sosial yang ada dalam dua karikatur tentang serangan IDF terhadap Rumah Sakit As-Syifa, peneliti menggunakan pendekatan semiotika perspektif Roman Jakobson. Definisi semiotika secara umum adalah ilmu yang berkaitan erat dengan mempelajari tanda dan sistemnya (Jakobson, 1960) seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya (Santoso, 2003:01). Menurut Jakobson (Jia, 2019), terdapat 6 unsur yang saling berkaitan dalam semiotika yakni *addresser* (pengirim pesan), *addresse* (penerima pesan), *context* (konteks), *code* (kode), *contact* (kontak), dan *message* (pesan) (Nugroho dalam Nurdinsyah, 2023:17).

Penggunaan teori semiotika Roman Jakobson ini tidak lain karena dapat memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana pesan yang diwakili dalam karikatur tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca, serta bagaimana konteks politik, sosial, dan budaya mempengaruhi pemahaman tersebut. Dalam konteks karikatur yang menggambarkan serangan IDF terhadap rumah sakit As-Syifa Palestina, analisis semiotika dapat memperjelas bagaimana bahasa visual karikatur tersebut mengandung fungsi-fungsi ini, misalnya referensial dalam representasi objek dan kejadian, ekspresif dalam ekspresi emosi, konatif dalam upaya untuk memengaruhi pemirsa, dan sebagainya.

Dengan memanfaatkan teori semiotika Jakobson dalam konteks dua karikatur yang ada di akun @hajjaj_cartoons, kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap karya-karya tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengenali bagaimana simbol-simbol, ekspresi wajah, atau teks yang terdapat dalam karikatur digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spesifik. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan bagaimana konteks sosial dan politik dapat memengaruhi cara kita menginterpretasikan karikatur-karikatur tersebut.

Berdasarkan keterbatasan data dalam sumber yang tersedia, kami akan menyusun teori dengan lebih fokus dan hanya akan memilih dua aspek kritik sosial yang paling mencolok untuk dianalisis, yaitu 1)

kritik sosial politik dan 2) kritik sosial moral. Pemilihan dua aspek kritik sosial ini didasarkan pada kesesuaian dengan makna yang disampaikan oleh karikaturis. Dalam dua gambar tersebut, terdapat kritik sosial politik dan kritik sosial moral yang dapat diidentifikasi.

Kritik sosial politik digunakan untuk menganalisis bagaimana karikatur mengkritik atau menggambarkan aspek-aspek politik dalam situasi yang dihadapi. Ini termasuk pengamatan terhadap bagaimana kebijakan, kekuasaan, atau institusi politik tertentu direpresentasikan dalam gambar. Misalnya, karikatur dapat menggambarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau tindakan politik yang kontroversial. Sedangkan kritik sosial moral melibatkan pemahaman tentang bagaimana karikaturis menyoroti masalah-masalah moral atau keadilan sosial dalam karya mereka. Misalnya, karikatur dapat menggambarkan ketidakadilan, ketidaksetaraan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang digunakan untuk membandingkan kajian-kajian atau penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Terdapat 4 kajian terdahulu yang menggunakan semiotika perspektif Roman Jakobson sebagai pendekatan penelitian (Nugraha, 2022; Munjiah, Haque, dan Mutholib, 2022; Amrulloh & Arifandi, 2022; Nurdinsyah, 2023). Terkait dengan karikatur, peneliti menemukan 6 penelitian yaitu (Amal, 'A ; Baha'uddin, B ; Yusra, 2022; Aritonang, 2022; Tania, Sakinah, Rusmana, 2022; Ali, 2023; Nurdinsyah, 2023; Syaputra & Santoso, 2023).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Terdapat 1 kajian terdahulu yang sama-sama menggunakan pendekatan semiotika Roman Jakobson untuk menganalisis karikatur sebagai objek penelitian (Nurdinsyah, 2023). Tiga kajian terdahulu sama-sama menggunakan semiotika Roman Jakobson sebagai pendekatan penelitian, tetapi ketiga kajian terdahulu tersebut berbeda dalam objek penelitian atau tidak menggunakan karikatur sebagai objek penelitian (Nugraha, 2022; Munjiah, Haque, dan Mutholib, 2022; Amrulloh & Arifandi, 2022). Tiga kajian terdahulu menggunakan semiotika perspektif Charles Sanders Pierce (Tania, Sakinah, dan Rusmana, 2022; Aritonang, 2022; Syaputra & Santoso, 2023). Satu kajian terdahulu mengkaji karikatur dari sisi semiotika warna (Ali, 2023). Dan satu kajian terdahulu menggunakan semiotika perspektif Roland Barthes untuk meneliti karikatur (Amal, Baha'uddin, dan Yusra, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah untuk (1) mengungkapkan representasi kritik sosial dalam karikatur serangan IDF terhadap Rumah Sakit as-Syifa Gaza yang diunggah oleh akun instagram @hajjaj_cartoons pada tanggal 15 November 2023 dan karikatur lainnya oleh akun instagram yang sama yang diunggah pada tanggal 18 November 2023, dan (2) mengungkap apa faktor yang melatarbelakangi pembuatan karikatur tersebut.

Kerangka Pemikiran

Teori Semiotika Roman Jakobson

Penelitian ini menggunakan teori semiotika Roman Jakobson sebagai pisau analisis. Roman Jakobson adalah seorang linguis terkenal Amerika yang lahir pada tahun 1896 di Moskow. Jakobson adalah linguis yang sangat menonjol karena ia telah mengembangkan teori strukturalis di barat dalam kajian bahasa. Penemuannya tersebut yang menjadikan Jakobson diingat sebagai linguis yang mencetuskan teori-teori dasar linguistik. Lebih dalam dari sekadar mengkaji ilmu linguistik, Roman Jakobson juga menulis rinci tentang Semiotika —(PENG & LI, 2016). Menurut Roman Jakobson semiotika adalah kunci utama untuk memahami segala jenis komunikasi dalam berbagai media. Hal tersebut yang membuat Roman Jakobson sering disebut sebagai bapak semiotika. Jakobson berpendapat bahwa semiotika memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan linguistik. Berdasarkan pandangannya kajian dalam ilmu semiotika dapat mencakup komunikasi verbal ataupun non verbal dan langsung ataupun tidak langsung (Kareem, 2020). Pada dasarnya Roman Jakobson mengklasifikasikan teori semiotikanya ke dalam 7 bagian diantaranya: 1) teori pertinensi, 2) teori binarisme dan ciri pembeda, 3) teori seleksi dan kombinasi, 4) teori metafora dan metonimi, 5) teori kode dan pesan, 6) teori fungsi semiotik, dan 7) teori penandaan (Hambardzumyan, 2005)z.

Definisi semiotika secara umum adalah ilmu yang berkaitan erat dengan mempelajari tanda dan sistemnya (Jakobson, 1960) seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya (Santoso, 2003:01). Menurut Jakobson (Jia, 2019), terdapat 6 unsur yang saling berkaitan dalam semiotika yakni *addresser* (pengirim pesan), *addressee* (penerima pesan), *context* (konteks), *code* (kode), *contact* (kontak), dan *message* (pesan) (Nugroho dalam Nurdinsyah, 2023:17).

Addresser (pengirim) merupakan pihak yang berusaha menyampaikan gagasan, sedangkan *addressee* (penerima) adalah penerima baik pembaca atau pendengar khalayak sebagai objek yang dituju. Adapun konteks adalah faktor dalam memahami amanat yang diberikan, sedangkan *message* (amanat) yaitu amanat yang harus dapat tersampai kepada target (penerima). Kontak yaitu untuk memahami pembicaraan maka penyampai pesan harus menghubungkan ujaran dengan yang diminatinya, dan yang terakhir kode yaitu penerima pesan atau target yang harus memahami sistem atau bentuk ujaran dari pengirim (Khoer dalam Nugraha, 2022:141).

Kritik Sosial Gillin dan Gillin

Gillin dan Gillin mengkategorikan kritik sosial berdasarkan konsep sosiologi yang dialami Masyarakat berlandaskan konsep Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pada hakikatnya masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat bukanlah sesuatu yang dikehendaki atau bisa disebut sebagai gejala patologis. Gillin dan Gillin menyatakan bahwa gejala sosial patologi adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap element dalam fungsi masyarakat harusnya senantiasa tolong menolong dalam membangun keberlangsungan hidup yang lancer. Saat

elemen-elemen tersebut bertabrakan maka gejala patologis ini akan muncul dan menghambat keberlangsungan hidup kelompok yang menghasilkan masalah sosial (Gillin & Gillin, 1949).

Berdasarkan uraian di atas maka kritik sosial pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi sembilan aspek yang berasal dari pengembangan konsep masalah sosial menurut Gillin dan Gillin yaitu meliputi politik, ekonomi, kebiasaan, pendidikan, keluarga, moral, gender, agama, dan teknologi. Berdasarkan keterbatasan data dalam sumber data yang diperoleh, teori akan dikerucutkan dan hanya akan diambil dua aspek kritik sosial yang paling menonjol untuk dikaji yaitu 1) kritik sosial politik dan 2) kritik sosial moral. Dua aspek kritik sosial tersebut digunakan karena sesuai dengan apa yang dikotorsasikan oleh karikaturis. Di dalam dua gambar tersebut diperoleh kritik sosial politik dan kritik sosial moral.

Metode Penelitian

Penelitian tentang kritik sosial dalam karikatur tentang serangan IDF terhadap Rumah Sakit as-Syifa Gaza Palestina ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Abdussamad, 2021; Moleong, 2005). Peneliti mengamati 2 karikatur dari akun instagram @hajjaj_cartoons tentang serangan Tentara IDF atas rumah sakit di Gaza itu sebagai suatu fenomena sosial.

Teknik pengumpulan data adalah *screenshot*, baca, dan catat. Peneliti melakukan *screenshot* terhadap karikatur yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Setelah melakukan *screenshot*, peneliti mengumpulkan data tentang fenomena yang berkaitan dengan karikatur melalui teknik baca. Berbagai berita yang berkaitan dengan karikatur serangan IDF terhadap as-Syifa *Hospital* dan artikel-artikel yang berkaitan dengan semiotika dibaca peneliti untuk digunakan sebagai data. Setelah melakukan kegiatan baca, peneliti mencatat hal-hal yang perlu untuk dimuat dalam penelitian, sehingga pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data melalui proses reduksi data. Peneliti mereduksi data, peneliti mereduksi data agar penelitian menjadi terarah. Proses reduksi data dilakukan dengan cara membagi karikatur menjadi beberapa sub untuk memudahkan dan menyederhanakan data penelitian, sub-sub tersebut dianalisis menggunakan semiotika perspektif Roman Jakobson. Setelah melakukan reduksi data, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk tabel beserta analisisnya, kemudian data-data yang disajikan tersebut disimpulkan. Pada tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan bentuk komparasi antara analisis semiotika Roman Jakobson pada dua karikatur yang digunakan sebagai objek dengan realita yang terjadi di lapangan mengenai kasus penyerbuan terhadap rumah sakit as-Syifa tersebut (Miles & Huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Representasi Kritik Sosial Dalam Karikatur Serangan IDF Terhadap Rumah Sakit As-Syifa Gaza Berdasarkan Teori Kritik Sosial Gillin dan Gillin

Pada bagian ini, peneliti akan menganalisis representasi kritik sosial yang terdapat dalam karikatur ber-*caption* *افتحام مستشفى الشفاء بغزة مخزاة اخرى تضاف لمخزاي الاحتلال اليرائيلي* yang diunggah di *Instagram* oleh akun @hajjaj_cartoons pada tanggal 15 November 2023 dan karikatur serupa tetapi tanpa disertai judul diunggah oleh akun *Instagram* yang sama pada tanggal 18 November 2023. Pada bagian ini juga akan dijelaskan apa saja faktor yang melatarbelakangi pembuatan dua karikatur tersebut.





Karikatur 1



Gambar Karikatur 01.

Karikatur di atas merupakan karikatur yang diunggah oleh akun *Instagram* @emad hajjaj yang memiliki kurang lebih 78.600 *follower* pada tanggal 05 Januari 2024. Karikatur yang diunggah oleh Emad Hajjaj tersebut ber-*caption* *افتحام مستشفى الشفاء بغزة مخزاة اخرى تضاف لمخزاي الاحتلال اليرائيلي* dan disukai sebanyak 474 pengguna *Instagram* pada tanggal 11 Desember 2023. Karikatur itu menyinggung tentang penyerbuan IDF (*Israel Defense Forces*) terhadap Rumah Sakit as-Syifa Gaza, Palestina. Berikut ini adalah analisis karikatur berdasarkan semiotika perspektif Roman Jakobson.

Tabel 1: Analisis karikatur berdasarkan perspektif Roman Jakobson

<p>Simbol 1</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Wajah bengis Pasukan IDF dengan helm perang berbendera Israel</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>	<p>Simbol 03</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Anak-anak kecil tertusuk tongkat infus</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>
<p>Simbol 02</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Pasukan IDF yang mencabut paksa tongkat infus</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>	<p>Simbol 04</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Pasukan IDF berdiri di atas bangunan Rumah Sakit as-Syifa</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>

Sumber: Olahan peneliti (2024)

a. Kritik Sosial Politik

Kritik Sosial Politik merupakan system utama yang harus dijalankan dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Diperlukan kritik sosial politik yang adil dan bijaksana demi menciptakan pemerintahan yang baik dan layak bagi semua rakyatnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan demi kepentingan sendiri maupun golongan (Gillin & Gillin, 1949). Kritik sosial politik yang ditemukan dalam karikatur pertama yang diunggah oleh @hajjaj_cartoons dapat dilihat dari data berikut:

1) Simbol Pertama

Simbol pertama menunjukkan kode Tentara IDF yang berwajah bengis menggunakan helm perang berbendera Israel. Pengirim dari simbol tersebut adalah akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Kode tersebut menunjukkan konteks situasional, Tentara Israel dengan mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia secara membabi buta menyerang rakyat sipil Palestina. Dalam simbol tersebut terkandung pesan kecaman terhadap IDF. Dari simbol yang digambarkan dalam karikatur terlihat jelas bagaimana sang karikaturis ingin menggambarkan seberapa bengisnya tentara Israel yang melakukan penyerangan terhadap rumah sakit yang seharusnya dilarang dalam protokol pelaksanaan perang.

Seperti yang disebutkan dalam prinsip hukum humaniter internasional pada poin prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan bahwa hanya prajurit yang terlibat dalam pertempuran yang boleh dijadikan sasaran perang (Sekartaji et al., 2021). Hukum Internasional dengan tegas mengatakan bahwa setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dianggap sebagai kejahatan perang. Hukum humaniter internasional melarang penggunaan senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil dan prajurit militer. Tanpa prinsip pembedaan ini, tidak akan ada batasan pada metode perang. Dengan kata lain, prinsip ini menjadi dasar untuk kebutuhan adanya pembatasan metode perang (Bakry, 2019). Hal ini sejalan dengan kritik sosial politik yang diungkapkan oleh Gillin dan Gillin bahwa dalam berpolitik, sebuah negara harus adil dan bijaksana demi menciptakan pemerintahan yang baik dan layak bagi semua rakyatnya (Safitry & Tjahjono, 2023). Penyerangan yang dilakukan oleh tentara IDF sangat berkebalikan dengan hal tersebut.

2) Simbol Ketiga

Simbol ketiga menunjukkan kode anak-anak kecil yang tertusuk tongkat infus. Pengirim dari simbol tersebut adalah akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Dalam kode tersebut menunjukkan konteks situasional, anak-anak kecil tak berdosa banyak menjadi korban dari penyerbuan Tentara IDF terhadap kompleks Rumah Sakit as-Syifa Gaza. Pada simbol tersebut terkandung pesan

kecaman terhadap Tentara IDF.

Seperti yang dijelaskan oleh seorang jurnalis bahwasanya tentara Israel telah menyerbu rumah sakit As-Syifa dengan target dan tujuan untuk menemukan maskas, infrastruktur, dan senjata hamas. Padahal di dalam rumah sakit tersebut terdapat ribuan orang masyarakat sipil yang menggantungkan nyawanya. Bahkan sebagaimana yang dilaporkan oleh BBC bahwa tentara IDF memasuki setiap ruang rumah sakit untuk menggeledah dan menginterogasi setiap orang yang ada di dalam rumah sakit. Tak berhenti sampai di sana, tentara Israel bahkan memasuki unit gawat darurat dan membawa tank untuk turut serta melakukan penyerangan "(BBC, 2023a).

Penyerangan tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan bahwa Hamas menjalankan pusat komandonya di bawah rumah sakit seraya mengatakan bahwa operasi yang mereka jalankan adalah untuk menjaga warga sipil dan meminimalisir kerugian mereka dengan adanya hamas. Namun, hal tersebut langsung diklarifikasi oleh seorang ahli bedah yang mengatakan bahwa ia belum pernah sekali pun melihat kehadiran tentara hamas, persenjataannya, atau bahkan keberadaan markas di dalam rumah sakit. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebengisan penyerangan yang dilakukan hamas adalah tindakan yang tidak berdasar dan telah melanggar hukum perang internasional (America, 2023). Pelanggaran yang dilakukan oleh IDF terhadap Masyarakat Palestina juga pelanggaran yang sesuai dengan kritik social politik oleh Gillin dan Gillin Dimana dalam melakukan hubungan politik internasional diperlukan citra bai kantar negara guna membangun kepercayaan yang baik dan bijaksana. Namun, penyerangan yang dilakukan oleh IDF telah menciptakan citra buruk Israel di mata dunia.

b. Kritik Sosial Moral

Moral pada dasarnya ada dua yaitu moral baik dan moral buruk. Memiliki moral atau perilaku yang buruk bisa mengganggu orang lain dan menyebabkan masalah baru bahkan dalam sebuah masyarakat atau mungkin tatanan yang lebih besar lagi (Gillin & Gillin, 1949). Kritik sosial moral dalam karikatur yang dibuat @hajjaj_cartoons dapat dilihat dari data berikut:

1) Simbol Kedua

Simbol kedua menunjukkan kode Pasukan IDF yang mencabut paksa tongkat infus. Simbol tersebut dikirimkan oleh akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Dalam kode tersebut menunjukkan konteks situasional Tentara IDF dengan teganya mencabut paksa tongkat infus. Pada simbol tersebut terkandung pesan kecaman terhadap Tentara IDF. Karikaturis menggambarkan betapa kejinya penyerangan yang dilakukan oleh tentara IDF. Selain membahayakan masyarakat sipil, serangan yang dilakukan oleh tentara IDF telah membahayakan seluruh pasien yang ada di dalam rumah sakit.

Selain melanggar hukum internasional, penyerangan tersebut juga telah melanggar prinsip kemanusiaan. Seperti yang dijelaskan bahwa situasi pasca-serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 telah menciptakan spiral kekerasan yang merugikan warga sipil, termasuk anak-anak, di wilayah Palestina. Serangan-serangan Israel yang semakin sering telah menyebabkan korban jiwa yang signifikan dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Pada 23 oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 5.087 warga [Palestina](#) tewas terbunuh oleh serangan udara [Israel](#) termasuk 2.055 anak-anak, Selain itu, sebanyak 15.273 warga sipil lainnya luka-luka (Kompas.tv, 2023). Serangan-serangan ini merupakan bentuk pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional, yaitu prinsip perbedaan antara warga sipil dan kombatan. Pihak Israel tidak membedakan objek militer sah yang dapat diserang. Banyak warga sipil termasuk anak-anak yang belum mengerti apapun, tewas terbunuh akibat serangan roket atau rudal dari Israel (News, 2023). Seperti yang dijelaskan Oleh Gillin dan Gillin, kritik sosial moral yang dilakukan oleh @hajjaj_cartoons juga menyoroti tindakan ketidakmanusiaan yang dilakukan oleh tantara IDF terhadap masyarakat Palestina.

2) Simbol Keempat

Simbol keempat menunjukkan kode Tentara IDF yang berdiri di atas bangunan Rumah Sakit as-Syifa, Gaza. Pengirim simbol tersebut adalah akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Dalam kode tersebut menunjukkan konteks situasional Tentara IDF yang melakukan penyerbuan terhadap bangunan Rumah Sakit as-Syifa, Gaza. Terdapat pesan kecaman terhadap Tentara IDF dalam simbol tersebut.

Simbol tersebut menggambarkan tentara Israel yang tidak memandang antara tempat mana yang diperbolehkan melakukan penyerangan atau tempat mana yang tidak diperbolehkan. Seharusnya, tentara IDF bisa lebih menyesuaikan operasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan garis pembeda antara kombatan dan non-kombatan. Namun alih-alih demikian tentara IDF melakukan penyerangan yang tak kenal bulu. Khader Al-Zaanoun, seorang warga sekaligus jurnalis yang berada di rumah sakit As-Syifa berkata pada wartawan Rushdi Abu Alouf bahwa tentara IDF menembakkan bom asap yang menyebabkan orang-orang yang menghirupnya akan mati lemas. Para tentara IDF juga memerintahkan seluruh pria berusia antara 16 hingga 40 untuk meninggalkan gedung rumah sakit dan berkumpul di halaman rumah sakit (CNN, 2023). Tindakan keji yang dilakukan oleh tantara IDF ini sesuai dengan kritik social moral yang dilakukan oleh Gillin dan Gillin karena tantara IDF tidak hanya mengganggu masyarakat bahkan mereka merampas hak hidup yang dimiliki masyarakat Palestina.





Karikatur 2



Gambar Karikatur 2.

Karikatur di atas adalah karikatur yang diunggah oleh akun Instagram @hajjaj_cartoons pada tanggal 18 November 2023. Karikatur tersebut disukai oleh 642 pengguna Instagram pada tanggal 05 Januari 2024. Berikut ini adalah analisis karikatur berdasarkan perspektif Roman Jakobson.

Tabel 2: Analisis karikatur berdasarkan perspektif semiotika Roman Jakobson.

<p>Simbol 01</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Pasukan IDF memantau sasaran yang tidak lain adalah Rumah Sakit As-Syifa Gaza beserta pasien di dalamnya</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>	<p>Simbol 03</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Tank IDF yang terus berjalan dan menargetkan serangan terhadap Rumah Sakit As-Syifa</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>
<p>Simbol 02</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Moncong tank IDF yang diarahkan ke Rumah Sakit as-Syifa beserta pasien di dalamnya</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>	<p>Simbol 04</p> 	<p>Pengirim : @hajjaj_cartoons</p> <p>Kode : Pasien Rumah Sakit as-Syifa yang berbaring dalam keadaan diinfus (disimbolkan dengan bendera Palestina) dalam ancaman serangan Tentara IDF.</p> <p>Konteks : Konteks situasional</p> <p>Kontak : Media Massa</p> <p>Pesan: Kecaman terhadap IDF</p> <p>Penerima: Tentara IDF</p>

Sumber: Olahan peneliti (2024)

a. Kritik Sosial Politik

Kritik Sosial Politik merupakan system utama yang harus dijalankan dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Diperlukan kritik sosial politik yang adil dan bijaksana demi menciptakan pemerintahan yang baik dan layak bagi semua rakyatnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan demi kepentingan sendiri maupun golongan (Gillin & Gillin, 1949). Kritik sosial politik yang ditemukan dalam karikatur pertama yang diunggah oleh @hajjaj_cartoons dapat dilihat dari data berikut:

1) Simbol Pertama

Simbol pertama pada karikatur di atas menunjukkan kode Pasukan IDF yang memantau sasaran penyerbuan yang tidak lain adalah Rumah Sakit as-Syifa Gaza beserta pasien rumah sakit tersebut. Simbol tersebut dikirimkan oleh akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Dalam kode tersebut menunjukkan konteks situasional Tentara IDF dengan congkak mengarahkan serangan terhadap. Pada simbol tersebut terkandung pesan kecaman terhadap Tentara IDF.

Pada simbol pertama terdapat pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh karikaturis dalam karikturnya. Sang karikatur memberikan gambar dimana tentara IDF melakukan pemantauan sebelum melaksanakan penyerangan rumah sakit As-Syifa. Hal tersebut menunjukkan bahwa benar adanya bahwa tentara IDF memang menargetkan penyerangan pada wilayah-wilayah yang dilarang untuk diserang dalam perang seperti yang tertulis dalam hukum perang Internasional "(Siddiqui et al., 2023). Tindakan pengintaian yang dilakukan oleh tantara IDF dilakukan secara illegal dan melanggar peraturan perang yang ditetapkan oleh PBB. @hajjaj_cartoons dalam kritik yang dilakukannya menyoroti hal ini guna menunjukkan Gerakan-gerakan illegal yang semakin bertambah intensitasnya. Sebagaimana laporan yang dikeluarkan oleh media un-press-org Palestina telah mendeklarasikan kemerdekaannya, hingga Oktober 2023, 138 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui kedaulatan Palestina (Masyrofah, 2016). Pengakuan ini mencerminkan dukungan internasional terhadap hak Palestina untuk menjadi sebuah negara Merdeka dan menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak politik yang dilanggar oleh tentara IDF terhadap Palestina.

2) Simbol Kedua

Simbol kedua pada karikatur di atas menunjukkan kode moncong tank pasukan IDF yang diarahkan ke Rumah Sakit as-Syifa Gaza beserta pasien rumah sakit tersebut. Simbol tersebut dikirimkan oleh akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Dalam kode tersebut menunjukkan konteks situasional Tentara IDF tanpa pandang bulu menargetkan serangan terhadap Rumah Sakit as-Syifa di Gaza beserta para pasien yang ada di dalamnya. Pada simbol tersebut terkandung pesan kecaman

terhadap Tentara IDF.

Pada simbol kedua yang merupakan kode dengan moncong tank yang diarahkan pada rumah sakit As-Syifa di Gaza menggambarkan bagaimana tentara Israel memang mengarahkan serangan pada wilayah-wilayah non-perang. Penyerangan yang dilandaskan pada dugaan penggunaan rumah sakit As-Syifa sebagai markas militer tentara Hamas hanya omong kosong belaka. Tudingan tak berdasar tersebut telah dibantah secara resmi oleh tentara Hamas, sedangkan IDF hingga saat ini tak juga bisa membuktikan kebenaran dugaan mereka. Tak hanya berhenti di rumah sakit As-Syifa, tentara IDF masih melanjutkan serangan pada rumah sakit lain yang ada di Gaza, seperti halnya rumah sakit Indonesia di Gaza yang diserang pada tanggal 20 November lalu. Tentara IDF masuk tanpa aba-aba dan meluncurkan tembakan di dalam rumah sakit (Arab, 2023). Tindakan ini juga merupakan pelanggaran hak-hak politik yang harus dipenuhi antar negara satu dengan negara yang lainnya. Dugaan yang diberikan tentara IDF tidak membenarkan penyerangan yang dilakukan. Penyerangan dan pengintaian yang dilakukan terhadap satu negara harus berdasarkan izin resmi yang dikeluarkan oleh PBB sebagaimana invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak atas dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal (Luga, 2023).

b. Kritik Sosial Moral

Moral pada dasarnya ada dua yaitu moral baik dan moral buruk. Memiliki moral atau perilaku yang buruk bisa mengganggu orang lain dan menyebabkan masalah baru bahkan dalam sebuah masyarakat atau mungkin tatanan yang lebih besar lagi (Gillin & Gillin, 1949). Kritik sosial moral dalam karikatur yang dibuat @hajjaj_cartoons dapat dilihat dari data berikut:

1) Simbol Ketiga

Pada simbol ketiga pada karikatur tersebut terdapat kode tank IDF yang terus berjalan dan berusaha mengarahkan sasarannya terhadap Rumah Sakit as-Syifa Gaza. Pengirim simbol tersebut adalah akun instagram @hajjaj_cartoons dengan penerimanya adalah Tentara IDF melalui kontak media massa. Konteks yang terkandung adalah konteks situasional, IDF yang terus berusaha merangsek dan mengarahkan serangan terhadap rumah sakit di Kota Gaza itu. Pada simbol ini terkandung pesan kecaman atau kutukan terhadap sikap IDF.

Pada simbol ketiga yang berupa gambaran di mana tank dari IDF enggan berhenti untuk melakukan penyerangan mengandung kecaman dan protes akan aksi tersebut. Karikaturis @hajjaj_cartoons ingin menggambarkan seberapa keji dan kejamnya tentara tersebut dalam melakukan penyerangan. Dalam melakukan penyerangan terhadap rumah sakit terbesar di Gaza tersebut, tentara IDF banyak melakukan pelanggaran hukum. Diantaranya adalah menembaki ruang pasien, menangkap staf rumah sakit, menahan direktur rumah sakit, dan menghambat jalannya pengobatan yang berlangsung di dalam rumah sakit. Pada Sabtu, 16

Desember Hamas mengatakan bahwa tentara IDF telah melakukan pembantaian yang mengerikan dalam rumah sakit As-Syifa. Mereka melakukan penahanan dan berdasar pada masyarakat sipil, menghancurkan tenda-tenda pengungsian, dan meratakan wilayah sekitar dengan bulldoser hingga menyebabkan tingginya angka kematian (CNBC, 2023). Penyerangan brutal yang dilakukan oleh tentara IDF sangat bertentangan dengan hukum perang yang berlaku. @hajjaj_cartoons ingin mengkritik hal tersebut dengan menggambarannya menggunakan tank perang yang terus melaju tanpa belas kasihan.

2) Simbol Keempat

Simbol keempat pada karikatur tersebut terdapat kode Pasien Rumah Sakit as-Syifa yang berbaring dalam keadaan diinfus (disimbolkan dengan bendera Palestina) dalam ancaman serangan Tentara IDF. Adapun pengirim simbol tersebut adalah akun Instagram @hajjaj_cartoons dan penerimanya adalah IDF. Kontak antara pengirim dan penerima terjadi melalui media massa yakni Instagram. Konteks yang terkandung adalah konteks situasional yakni situasi pasien Rumah Sakit as-Syifa yang dibombardir serangan Tentara Israel atau yang dikenal dengan IDF. Pesan yang terkandung pada simbol ini adalah kecaman atau kutukan kepada Tentara IDF atas kebiadaban mereka menyerang objek vital yakni rumah sakit (Indiraphasa, 2023).

Pada simbol terakhir di karikatur yang kedua lebih menekankan pada penggambaran situasi saat penyerangan berlangsung. Sang karikaturis menggunakan elemen pasien yang berbaring dengan segala perlengkapan medis yang menyangga hidupnya, sedangkan di sekelilingnya terdapat banyak asap yang menggambarkan masifnya penyerangan IDF. Dapat dilihat pada gambar pasien tersebut seberapa parah luka yang dialaminya, hal tersebut digambarkan dengan penggunaan perban yang hampir menutupi seluruh tubuh pasien. Di samping hal tersebut, sang karikaturis juga memberikan gambaran bagaimana fasilitas kesehatan yang kurang layak dan kurang memadai. Hal tersebut digambarkan dengan selimut rumah sakit yang digunakan pasien tampak kotor dan lusuh. Bahkan, infus yang memberikan nutrisi dan kehidupan pada pasien harus terputus akibat adanya serangan dari tentara IDF tersebut (Islam, 2023).

Gambaran tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh sumber medis di Gaza bahwa mereka mengalami 17 kematian pasien akibat mesin oksigen yang berhenti bekerja. Dengan dikelungnya kompleks rumah sakit As-Syifa di Gaza yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut disertai dengan serangan drone dan ancaman bulldoser, menyebabkan terjadinya pemadaman listrik yang mengancam nyawa para pasien.

Kementerian Kesehatan, Ashraf Al-Qudra mengumumkan bahwa 7 pasien telah tewas dan lainnya terluka akibat penyerangan tersebut. Bahkan, 36 bayi yang lahir prematur harus

memhadapi ancaman kematian setiap saat karena mereka tidak bisa dievaluasi ke rumah sakit yang lebih aman, hal tersebut dikarenakan larangan tentara IDF terhadap mobilitas keluar masuk rumah sakit As-Syifa (Republika, 2023). Aspek pelanggaran yang dilakukan oleh tentara IDF di atas sangat pantas dikritik menggunakan teori kritik sosial moral Gillin dan Gillin yang menyebutkan bahwa manusia harusnya bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk, namun tidak dengan tentara IDF.

Faktor yang Menjadi Latar Belakang Pembuatan Karikatur

Faktor utama yang menjadi latar belakang dari pembuatan karikatur tentang serangan IDF terhadap Rumah Sakit as-Syifa tersebut adalah Tentara Israel yang melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina. Apa yang dilakukan *Israel Defense Forces* tersebut bertentangan dengan *the rules of International Humanitarian Law*, dalam aturan 2 dinyatakan tentang larangan melakukan teror terhadap penduduk sipil dan aturan 3 yang menyatakan bahwa semua anggota angkatan bersenjata salah satu pihak yang berkonflik adalah kombatan, kecuali tenaga medis dan keagamaan (Jean-Marie Henckaerts dalam Fadly, n.d.).

Dalam konvensi Den Haag, objek sipil yang tidak dapat dijadikan sebagai sasaran serangan militer salah satunya adalah rumah sakit. Sebagaimana tertera pada Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907 bahwa objek sipil yakni bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit) (Unsulangi, 2021:161). Sehingga penyerbuan terhadap rumah sakit adalah tindakan yang tidak etis meskipun dalam suasana perang.

Sebagaimana yang diajukan dalam gugatan pemerintah Afrika Selatan pada Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag (Belanda) pada 11 Januari 2024, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Israel adalah genosida. Di bawah hukum internasional, genosida didefinisikan sebagai satu tindakan atau lebih dengan tujuan menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama. Hal tersebut yang tengah dilakukan oleh IDF saat ini, merek menyerang masyarakat sipil, mulai dari anak-anak yang tak berdosa hingga lansia yang tak ikut campur dalam ranah militer – (BBC, 2023b).

Dalam aksi tuntutan nya, Afrika Selatan telah menyusun gugatan setebal 84 halaman yang menyebutkan aksi-aksi keji Israel yang merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan orang-orang Palestina di Gaza secara substansial. Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang menghancurkan orang-orang Palestina secara komunitas dan menyeluruh (Republika, 2023).

Hingga saat ini, menurut data kementerian kesehatan Hamas, lebih dari 23.350 orang – sebagian besar perempuan dan anak-anak – tewas terbunuh di Gaza, sejak pecahnya peperangan pada 7 Oktober 2023. Mahkamah Internasional belum memutuskan putusan apapun untuk gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ini (Tirto.id, 2024). Keabu-abuan yang dihadirkan selama sidang kasus antara Palestina

dan Israel ini membuat publik dan masyarakat global geram. Penyerangan yang dilakukan oleh IDF bahkan sangat jelas menggambarkan genosida terhadap masyarakat Palestina, karena penyerangan tersebut bukanlah peperangan. Salah satu bukti nyatanya adalah bagaimana IDF melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah sipil non-perang. Seperti yang coba digambarkan oleh sang karikaturis dalam karikturnya di media sosial @hajjaj_cartoons.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis kedua karikatur menemukan 4 simbol dengan pesan kecaman terhadap IDF. Simbol pertama menunjukkan Tentara IDF berwajah bengis dan agresif, simbol kedua adalah Pasukan IDF mencabut paksa tongkat infus, simbol ketiga adalah anak-anak yang terluka, dan simbol keempat adalah Tentara IDF di atas Rumah Sakit as-Syifa, Gaza. Pesan yang disampaikan adalah kecaman terhadap tindakan IDF. Pada karikatur kedua, terdapat 4 simbol lainnya dengan pesan kecaman yang serupa terhadap IDF. Simbol pertama adalah Pasukan IDF memantau sasaran penyerbuan, kode kedua adalah moncong tank IDF diarahkan ke rumah sakit, simbol ketiga adalah tank IDF bergerak menuju Rumah Sakit as-Syifa, dan simbol keempat adalah Pasien Rumah Sakit as-Syifa dalam ancaman serangan IDF. Kedua karikatur tersebut menyoroti pelanggaran terhadap hak asasi bangsa Palestina dengan penyerbuan terhadap rumah sakit sebagai objek sipil, yang bertentangan dengan aturan humaniter internasional. Tindakan Tentara IDF dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Faktor yang menjadi latar belakang penciptaan karikatur oleh karikaturis hajjaj adalah serangan IDF terhadap banyak wilayah di Gaza setelah fenomena 7 Oktober. Serangan yang dilakukan oleh tentara Israel melanggar hukum humaniter International yang membahas bagaimana batas-batas dalam pelaksanaan perang. Pelanggaran hukum paling vital yang dilakukan oleh IDF adalah penyerangan terhadap penduduk sipil dan wilayah-wilayah yang dilarang untuk diserang seperti rumah sakit dan tenda-tenda pengungsian.

Penelitian ini mengungkap sindiran politik dalam karikatur Emad Hajjaj. Dua karikatur ini bisa dianalisis dengan teori Roman Jakobson, yang berbeda dari teori semiotika lain yang hanya fokus pada tulisan, bukan gambar. Kritik politik tak hanya bisa tersampaikan secara langsung, tapi juga lewat penciptaan karikatur seperti yang dilakukan oleh kedua seniman ini. Penelitian ini juga terbatas hanya pada dua karya karikatur milik Emad Hajjaj yang menggambarkan penyerangan tentara IDF terhadap rumah sakit As-Syifa di Gaza. Peneliti selanjutnya juga bisa mengkomparasikan antara karikatur milik Emad Hajjaj dengan karya karikatur milik karikaturis lain agar memperoleh banyak sudut pandang terkait penyerangan yang dilakukan oleh tentara IDF terhadap rumah sakit As-Syifa. Untuk meluaskan cakupan penelitian, disarankan peneliti berikutnya memperbanyak variasi objek yang direpresentasikan. Penelitian yang menggunakan karikatur sebagai fokusnya sebaiknya memilih karikatur dengan banyak

simbol. Objek penelitian juga bisa lebih beragam, seperti komik, ilustrasi, atau animasi yang mengangkat topik serupa.

Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang menggunakan semiotika perspektif Roman Jakobson sebagai pendekatan penelitian dan karikatur, khususnya berkaitan dengan kajian Timur Tengah. Adapun kontribusi secara empiris adalah dengan menggunakan semiotika Roman Jakobson sebagai pendekatan penelitian, kita dapat menganalisis representasi kritik sosial yang terkandung dalam sebuah karikatur. Khususnya 2 karikatur yang digunakan sebagai objek penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan penelitian semiotika perspektif Roman Jakobson, peneliti dapat mengupas representasi kritik sosial yang terkandung dalam 2 karikatur milik Emad Hajjaj tentang serangan IDF terhadap Rumah Sakit as-Syifa Palestina. Yang mana dalam penelitian ini, banyak ditemukan tindakan-tindakan IDF yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, khususnya tindakan-tindakan tidak etis Israel melalui unit militernya yakni IDF yang di luar batas demi mewujudkan ambisi politiknya.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press.
- Ali. (2023). بالمنوفية العربية اللغة كلية مجلة "فكس—مان يونتان وكمسمن يونتن" الإسرائيلي كريكاتير في الألوان سيميائية. 38(1), 2142–2174. <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/bfam.2023.313240>
- Amal, 'A., Baha'uddin, B., & Yusra, B. (2022). دراسة الكاريكاتورية الرسوم خلال من الص—حي الاجتماعي الواقع تجليات 2021 جويلية 15 : من الممتدة الفترة خلال 19 كورونا فيروس انتشار فترة خلال بوخالفة باقي رسومات من لعينة سيميائية إلى 08 أوت 2021. Kasdi Merbah University Ouargla.
- America, V. of. (2023). Israel Sebut "Aktivitas" Militer di Rumah Sakit Gaza Berakhir.
- Amrulloh, A.Y., & Arifandi, F. (2022). Ma'na al-Hub Fi Kitaab al-Hub fi al-Qur'an al-Karim bi Qalam M. Said Ramadhan al-Buthi Istinadan Ila al-Mandzur al-Siimiiya'iy li Roman Jakobson. Afshaha: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, 1 (2) , 1 2 4 – 1 3 6 . <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/afshaha.v1i2.17606>
- Aprianto, Y., Kumorotomo, W., & Rajiyem, R. (2023). Komunikasi Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi Pemerintah. Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia. <https://doi.org/10.22146/jmki.83297>
- Arab, T. N. (2023). WHO, former Israeli PM, cast doubt on Israel's narrative of Al-Shifa Hospital.
- Aritonang, A. (2022). Kritik Sosial Dalam Karikatur (Analisis Semiotika Terkait Kritik Sosial dalam Postingan Instagram Gejayan Memanggil). Jurnal SCRIPTURA, 12(2), 123–133. <https://doi.org/10.9744/scriptura.12.2.123-133>
- Bakry, U. S. (2019). Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar. Kencana.
- BBC. (2023a). Palestina: Tentara Israel 'serbu' RS Al-Shifa di Gaza dengan tank.

- BBC. (2023b). Sidang Mahkamah Internasional: Israel bantah gugatan Afrika Selatan tentang genosida Palestina di Gaza – Kenapa Indonesia tidak bisa ikut menggugat?
- BBC. (2023c). Tentara Israel serbu RS Al-Shifa, Menkes Palestina minta bukti keberadaan markas Hamas. BBC NEWS INDONESIA.
- Cantona, S. R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Kritik Sosial Politik dalam Musik: Studi Kasus Grup Musik Efek Rumah Kaca. *Jurnal LIB Universitas Negeri Semarang*, 11(1), 1–24.
- CNBC. (2023). Serang RS Al-Shifa, Israel Benar-benar Kena Batunya.
- CNN. (2023). Kenapa Israel Gempur dan Kepung Rumah Sakit di Gaza?
- Fadly, M. . (n.d.). *Rules of War in Islam and International Humanitarian Law*. Direktorat Pendidikan Dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Fitrah, A. A., Wahyuni, H. I., & Putra, I. G. N. (2019). Social media & organizational management of contemporary socio-cultural movement: An instrumental case study of akademi berbagi in Indonesia. *Romanian Journal of Communication and Public Relations*. <https://doi.org/10.21018/rjcpr.2019.3.282>
- Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1949). *Cultural Sociology*. In *Phylon (1940-1956)* (Vol. 10, Issue 1). The Macmillan Company. <https://doi.org/10.2307/272241>
- Hambardzumyan, D. (2005). Literary Translation as Semiotic Interpretation in the Light of Philological Hermeneutics. *Armenian Folia Anglistika*. <https://doi.org/10.46991/afa/2005.1.1-2.116>
- Heru Dwi Waluyanto. (2000). *Karikatur Sebagai Karya Komunikasi Visual Dalam Penyampaian Kritik Sosial*. Nirmana.
- Hieu, H. N. (2021). Kritik Sosial Dalam Cerpen Mereka Mengeja Larangan Mengemis Karya Ahmad Tohari (Kajian Sosiologi Sastra). *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i1.6138>
- Indiraphasa, N. S. (2023). Tank Israel Kepung RS Al-Shifa, Nyawa Ratusan Pasien dan Puluhan Bayi Prematur Terancam.
- Islam, S. (2023). Tak Peduli Larangan Hukum Internasional, Penjajah Israel Serang RS As-Syifa di Gaza.
- Itiqomah, N., & Sofyan, I. (2015). Kritik Sosial Politik Dalam Karikatur (Analisis Semiotik Karikatur Clekit “Program 100 Hari Jokowi” pada Surat Kabar Jawa Pos Edisi Oktober-Januari 2015). *Jurnal Komunikasi*.
- Jakobson, R. (1960). *Closing Statement: Linguistics and Poetics*. Cambridge: MIT Press.
- Jia, H. (2019). Semiospheric translation types reconsidered from the translation semiotics perspective. *Semiotica*, 2019(231), 121–145. <https://doi.org/10.1515/sem-2017-0151>
- Kareem, N. H. (2020). Text Theory in Contemporary Semitic Lingual Investigate “Speculate of the Questionable of the Conception, Definition and Term.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201511>
- Khasanah, L. I., & Solichin, M. B. (2023). Kritik Sosial dalam Novel “Dua Barista” Karya Ning Najhaty Sharma. *Narasi: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya*. <https://doi.org/10.30762/narasi.v1i1.896>

- Kompas.tv. (2023). Sudah 5.087 Warga Sipil Palestina Dibunuh Israel, Termasuk 2.055 Anak-Anak akibat Serangan ke Gaza. KompasTV.
- Luga, I. (2023). Analisis Terhadap Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak Dari Sudut Pandang Hukum Internasional. *SPICES: Social Political Sciences Journal*, 1(1 SE-Articles), 29–38. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/spices/article/view/10208>
- Masyrofah, M. (2016). Fakta Perjanjian Damai Dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2243>
- Mayadeen, A. (2023). "Israel" bombing al-Shifa Hospital with white phosphorus: MoH. Al Mayadeen English.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode-metode baru. UI-Press.
- Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munjiah, M., Haque, A., & Mutholib, A. (2022). تحليل في الجديد الاتجاه: والبلاغة جاكوبسون بين السيميائي الانتماء. القرآنية الآيات. Presented at The 4th Annual International Conference on Language, Literature and Media (AICOLLIM 2022), 21-22 Sep 2022, Malang, Indonesia.
- News, B. (2023). Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan Tahun.
- Nugraha, E. (2022). The Form And Meaning Of Nahyi In The Quran Surah Albaqarah: A Review Of Roman Jakobson's Semiotics. *Lughawiyah*, 4(2), 139–152.
- Nugroho. (2023). Hamas Bantah Klaim AS Soal Gunakan RS Al-Shifa. RRI.Co.Id.
- Nurdinsyah, M. (2023). جاكوبسون رومان سيميائية دراسة: إنستغرام كاريكاتير في إسرائيل لهجمات الفلسطينيين مقاومة. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- PENG, Y., & LI, D. (2016). The Analysis of Literary Signs in Terms of Dualism of Roman Jakobson and Roland Barthes—The Analysis of Dyads and Triads of Semiotics. *DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science*. <https://doi.org/10.12783/dtssehs/icssd2016/4707>
- Republika. (2023). Dokter RS Al Syifa: Warga Palestina Benar-Benar Dibiarkan Mati.
- Rizkyaningtyas, R., Taufiq, W., & Qonit, A. A. (2018). Karikatur dalam Koran Online Al-Riyadh (Kajian Semiotika). *Hijai - Journal on Arabic Language and Literature*. <https://doi.org/10.15575/hijai.v1i1.3173>
- Safitry, S., & Tjahjono, T. (2023). Kritik Sosial Dalam Novel Re Dan Perempuan Karya Maman Suherman (Kajian Sosiologi Sastra Gillin Dan Gillin). *BAPALA*, 10(2), 48–59.
- Salim, V., & Sukendro, G. G. (2021). Representasi Kritik Sosial dalam Film Parasite (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Koneksi*. <https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10387>
- Santoso, R. (2003). Semiotika Sosial Pandangan Terhadap Bahasa (Cetakan I). Pustaka Eureka & JP Press.
- Sekartaji, A. D., Firdaus, F., Istiqomah, I., & Susilowati, I. (2021). Efektivitas Hukum Humaniter

- Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah. JOURNAL of LEGAL RESEARCH. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.22814>
- Septiani, R., & Nuraeni, R. (2022). Representasi Kritik Sosial Film Dokumenter Vice “Indonesia's First All-Trans Girlband: Amuba” (Analisis Semiotika Roland Barthes). E-Proceeding Of Management.
- Siddiqui, U., Pietromarchi, V., & McCready, A. (2023). Israel-Hamas war updates: Al-Shifa Hospital 'horror scene' after siege.
- Syaputra, A.m & Santoso, P. (2023). Analisis Semiotika Karikatur Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke 24 Pada Postingan Akun Instagram Jokowi. Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik, 2 (3) , 1 8 3 – 1 8 8 . <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/keskap.v2i3.17508>
- Tania, N. R., Sakinah, R. M. N., & Rusmana, D. (2022). Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce pada Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 16-22 September 2019. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya, 2 (2) , 1 3 9 – 1 4 9 . <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/humayafhisip.v2i2.2578>
- Tirto.id. (2024). Isi Gugatan Afrika Selatan Terhadap Israel tentang Palestina.
- Unsulangi, J. (2021). PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL DAN BENTUK KEWAJIBAN NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Lex Administratum, IX(4), 160–170.
- Waluyanto, H. D. (2000). Karikatur Sebagai Karya Komunikasi Visual Dalam Penyampaian Kritik Sosial. Nirmana.
- Wulandari, S. R., & Hayati, Y. (2023). Kritik sosial dalam novel Komsa karya E.S ITO: Kajian sosiologi sastra. Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya). <https://doi.org/10.26555/jg.v5i1.7555>
- Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum, 9(2), 110–118. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.219>
- Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amelia, M. G., & Manurung, E. (2023). Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina. Advanced In Social Humanities Research, 1(7), 922–933.
- Zhafira, A. (2023). Berdirinya Negara di atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina oleh Israel yang Membawa pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia. AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum, 1(1), 15–22.

Shared Identity and Trust among the Furry Fandom: A Narrative Review

Rifqi Zuhdi Amarta

| Department of Sociology, Universitas Gadjah Mada.
Email: rifqi.zuhdi3003@mail.ugm.ac.id

Dilah Ratna Kartika

| Department of English Language and Literature,
Universitas Pendidikan Indonesia.
Email: dilahratnak@upi.edu

ABSTRAK

Shared identity berperan penting dalam pembentukan fandom di era digital, dimana interaksi online menjadi mode yang mendominasi interaksi sosial antar individu. Interaksi online intrakelompok di dalam furry fandom dapat dijelajahi melalui proses identity and trust development, menyoroti peran platform virtual dalam mendorong kohesi dalam komunitas. Artikel ini mengulas literatur lampau mengenai furry fandom dari empat aspek Social Exchange Theory (SET), yaitu kepercayaan, komitmen, timbal balik, dan kekuasaan. Metode narrative review digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek ini berkontribusi terhadap ketahanan identitas dan kepercayaan dalam fandom furry. Tinjauan yang dilakukan terhadap enam artikel ilmiah seputar tema interaksi dalam fandom furry menggarisbawahi keyakinan umum tentang bagaimana individu yang mengidentifikasi diri sebagai furry memiliki kesamaan identitas, yang menumbuhkan rasa percaya dan persahabatan dalam fandom. Identitas bersama ini berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan intrakelompok yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kohesi di dalam fandom. Artikel ini menyarankan penelitian selanjutnya untuk melaksanakan analisis yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepercayaan dan keberlangsungan interaksi intrakelompok di lingkup era digital.

Keywords: Fandom; Furry; Digital Trust; Shared Identity; Social Exchange Theory

Introduction

Fandom communities serve as unique spaces for individuals to explore and express their identities, fostering a sense of belonging through shared experiences and values (He et al., 2021; Neville & Reicher, 2018). The furry fandom, explored by scholars like Satinsky & Green (2016), Reysen et al. (2023), Heinz (2020), Plante et al. (2015), and Mock et al. (2013), uniquely blends identity exploration, artistic expression, and an all-encompassing embrace of diverse interests. According to Gerbasi et al. (2008), the furry fandom is a form of subculture built around an interest in anthropomorphic animals or animals that exhibit human characteristics. Centered around anthropomorphic animals, this subculture provides a space for artistic expression, connection, and self-discovery, whether through fursuits, artwork, music, or online communities (Heinz, 2020; Reysen et al., 2023; Satinsky & Green, 2016).

As a fandom, furry traces its roots back to the United States in the 1970s when popular media-

based subcultures such as Star Trek and Comic-Con were gaining prominence among the youth. In the following years, the fandom grew more extensive, spreading its influence abroad through exposure to anthropomorphic media (Dunn, 2021). The growing prominence of furry as a fandom led to various interests from the academic community. The International Anthropomorphic Research Project (IARP), led by Dr. Sharon Roberts, spearheaded the research on furry fandom, producing various scholarly works that laid the groundwork for further research on the fandom (Roberts et al., 2024). One of their work is titled *FurScience!: A Summary of Five Years of Research International Anthropomorphic Research Project* (2016), presents a series of data from various aspects of the fandom, such as “fursona” or “furry persona”.

The core concept of “fursona” acts as gateways for individuals to explore their inner selves, express non-normative identities, and shape their community persona, promoting an atmosphere of acceptance and inclusivity (Heinz, 2020; Mock et al., 2013; Satinsky & Green, 2016). As Peacey (2020) noted, fandom is characterized by mutual support and recognition in personal and professional lives, strengthening relationships and fostering trust. This supportive and accepting environment, where individuals are valued for their contributions and embraced for who they are, fosters trust, mutual respect, and a strong sense of belonging within the furry fandom.

Throughout its history and development, the fandom has faced constant stigmatization and misconceptions due to its interest in anthropomorphism and anthropomorphic characters. This interest is falsely generalized with zoophilia, a sexual paraphilia on animals that are considered illegal and morally defiant (Jeansonne, 2012; Mao, 2022). In popular media, this stigma is reinforced through stereotyping, where furies are portrayed as a group of people engaged in sexually deviant behavior; one such example is from The popular American crime drama series CSI: Crime Scene Investigation. One of its episodes titled “Fur and Loathing” which was aired on October 30th, 2003 portrays the furry fandom as a fandom that's only focused on acts of sexual satisfaction and immoral behavior (Lewis, 2003). However, despite misconceptions and media portrayals, its unique blend of identity exploration, artistic expression, inclusivity, and mutual support continues to attract individuals seeking a safe space to connect with like-minded souls and embrace their inner identity, both online and offline, while avoiding stigmatization that came from public eyes (Mock et al., 2013; Reysen et al., 2015).

The open-armed embrace that defines the furry fandom fosters a sense of belonging and safety, encouraging members to engage in open communication and shared experiences (Peacey, 2020; Satinsky & Green, 2016). This bond, built on shared values and mutual respect, lays the foundation for trust to flourish (Bruckner, 2016; Osburg & Heinecke, 2019). Unlike anonymous online spaces, the furry fandom leverages the concept of fursonas – personalized animal avatars that bridge the gap between online and offline personas (Satinsky & Green, 2016).

The core values of acceptance and inclusion woven into the furry culture create a positive and supportive online environment (Heinz, 2020). This emphasis on mutual respect and understanding

encourages reciprocity – an essential aspect of trust-building (Osburg & Heinecke, 2019). When members feel valued and supported, they are more likely to reciprocate with positive interactions, further solidifying the bonds of trust within the community. As individuals engage in online interactions and share their experiences within the furry fandom, they develop a sense of shared identity. This shared identity, fueled by positive future expectations and the potential for collective action (Kou, 2021; Shafirova & Kumpulainen, 2021), fosters a sense of community and belonging that further strengthens trust and reinforces the positive feedback loop within the group.

The furry fandom presents a fascinating case of trust and connection forged in the digital realm. While online anonymity can breed negativity, the furry community thrives on a remarkable trust nurtured through online interactions. To unravel this enigma, we took on the lens of social psychology, more specifically through the perspective of Social Exchange Theory (SET), which recognizes social interactions as a continuous exchange of actions and reactions. SET emphasizes four key elements – trust, commitment, reciprocity, and power – that interact with individuals' assessment of costs and rewards to influence their decisions and behaviors within social exchanges (Blau (1964) & Emerson (1976), as cited in Cook et al., 2013). This theory provides a valuable lens for understanding how online interactions contribute to the development and resilience of shared identity and trust within the furry fandom. By analyzing the furry fandom through this lens, we seek to understand: How do online interactions, characterized by trust, commitment, reciprocity, and power dynamics, contribute to the development and resilience of shared identity and trust within the furry fandom?

This research explores the intricate interplay between online interactions, shared identity, and trust within the furry fandom. By meticulously examining how the four pillars of SET manifest in online spaces, this research aims to provide an understanding on the mechanisms of cooperation and trust that bind this unique community. This paper further explores the furry fandom's remarkable resilience as a social group while offering valuable insights applicable to fostering trust and collaboration in online spaces. Therefore, with the tools of SET in hand, this study seeks to understand the dynamic of online communities in the current age, where trust can be shaped even without primary face-to-face interaction. Theoretically, this study validates the applicability of SET theory in understanding online communities. Practically, the findings can inform strategies for fostering trust and shared identity in online communities. Thus, this study will be beneficial in the context of online-based fandoms and social groups that are becoming more popular in the current social sphere.

Theoretical Framework

Social Exchange Theory

Social Exchange Theory (SET) is not a singular entity but rather a multifaceted framework for understanding the intricacies of social interactions. It acts as a prism, refracting the perspectives of

diverse scholars like Homans (1958), Thibaut & Kelley (1959), Blau (1964), and Emerson (1976), each offering a unique lens through which to view the complex dynamics of exchange (Cook et al., 2013; Frieder, 2018).

As mentioned in Cook et al. (2013), Homans (1958) laid the groundwork for SET by framing social behavior as a calculated exchange driven by anticipated rewards. His work, drawing on principles of reinforcement, provided a foundational understanding of the underlying mechanisms at play in these transactions. Building upon this, Thibaut and Kelley (1959) honed their focus on smaller social units, where interdependence between individuals played a major role in group dynamics, resulting in mutual dependency that could lead to cooperation or conflict within the group. Blau (1964) sought a broader perspective by introducing an economic lens to SET. He advocated for considering the individual motivations within the exchange and the emergent properties and power dynamics that shape the larger social context. Blau enriched the theory's landscape with this crucial dimension by recognizing the often-overlooked role of power in shaping interactions. Finally, Emerson (1976) took a panoramic view, envisioning SET not as a singular voice but as a vibrant forum for dialogue. He positioned it as a meta-framework, fostering communication and debate between various micro and macro theories, all within the realm of social exchange. His emphasis on reciprocity further underscored the importance of balanced interactions in building successful relationships.

According to Blau (1964, as cited in Cook et al., 2013), trust is a cornerstone of cooperation and positive social interactions within social exchange theory. It embodies the belief that an exchange partner will behave fairly and avoid exploiting any temporary advantage they may hold. This trust is built gradually through repeated interactions that showcase the partner's reliability and honesty. Additionally, social group norms and values play a significant role in shaping trust expectations. Ultimately, trust fosters the confidence that one can rely on their partner to act mutually beneficial, rather than resorting to opportunism.

Research by Molm et al. (2009) and Schilke et al. (2021) further highlights the importance of trust in social exchange by demonstrating its ability to promote reciprocal behavior and positive outcomes within social interactions. By understanding the dynamics of trust, we gain valuable insights into how social interactions are structured and maintained over time.

Blau (1964, as cited in Cook et al., 2013) highlights that Social Exchange Theory views commitment as the willingness to invest time, resources, and effort into maintaining a relationship over time. This commitment goes beyond a general fondness for social interaction and signifies a dedication to a specific partnership. The level of commitment hinges on two key factors: satisfaction within the relationship and the perceived attractiveness of alternatives. When individuals experience high satisfaction and limited appealing options outside the relationship, they are more likely to be committed and invest heavily. Conversely, low satisfaction or many attractive alternatives can lead to decreased commitment and a potential withdrawal of resources (Cook et al., 2013).

Commitment plays a vital role in the long-term sustainability of exchange relationships (Blau (1964), as cited in Cook et al, 2013). Furthermore, uncertainty and risk within social exchanges can encourage commitment (Cook, 2015; Emerson (1978), as cited in Cook et al., 2013). This commitment discourages seeking alternative partners and helps mitigate power imbalances within the exchange and its surrounding network. Uncertainty also influences perceptions of trustworthiness, highlighting the link between commitment and reliable behavior within social interactions (Cropanzano et al., 2017; Schilke et al., 2021).

Blau (1964, as cited in Cook et al., 2013) argues that reciprocity is key to successful social interactions. This "balanced exchange" ensures fairness through direct repayment, indirect exchanges, or future promises. The strength of reciprocity depends on the group's norms and values. In groups where reciprocity holds high importance, individuals are more likely to engage in mutually beneficial exchanges that persist over time. Reciprocity goes beyond a simple tit-for-tat exchange; it encompasses the broader concept of fairness and maintaining a sense of balance within the relationship (Cook, 2015). Social exchange theorists argue that this exchange of benefits and costs forms the bedrock of lasting relationships (Gouldner (1960), as cited in Frieder, 2018). However, individual perceptions of reciprocity can vary, potentially leading to conflict or misunderstandings within social exchanges (Molm et al., 2009). Understanding reciprocity is crucial for deciphering social interactions, power dynamics, and the social norms and expectations that govern them.

Blau (1964, as cited in Cook et al., 2013) defines power as the ability to influence others. Power imbalances can lead to unequal exchange relationships. Sources of power include resources, expertise, and social status. Power distribution affects relationship stability, longevity, and satisfaction. Social Exchange Theory defines power as an actor's ability to influence outcomes and behavior in social interactions. This influence can stem from controlling resources like social status, information, or physical force (Emerson (1976), as cited in Cook et al., 2013). Power imbalances are theorized to lead to unequal benefits and outcomes within exchanges, potentially creating conflict and jeopardizing the relationship. However, the absence of power imbalances does not guarantee the absence of conflict, as disagreements over the nature and amount of exchange can still arise (Molm et al., 2009).

By interweaving these viewpoints, a deeper appreciation for the multifaceted character of SET emerges. The foundational principle of mutual benefit resonates throughout, influencing the dynamics of social interactions across varied contexts. From small group settings to intricate inter-organizational relations, SET offers a valuable lens for comprehending the nuanced landscape of trust, commitment, reciprocity, and power that defines social exchanges.

Fandom Studies

Among various academic studies, fandom studies emerged as an emerging branch in the realm of social sciences. Fandom studies is the academic field focusing on fans, fandom, and fan culture. This encompasses all fan-related activities, from online interaction to real-life conventions. It emphasizes

studying groups of people with a shared interest in a particular work of fiction or pop culture products (Kington, 2015; Lamerichs, 2018). Expanding on that ground, fandom is a heavily online-based community where members of said fandom, or the “fans,” are connected through social media platforms (He et al., 2022).

Studying fandom is more than just studying a group of people and their interests. Fandom works as a form of identity construction and emancipation. Gray et al. (2007) conceptualize fandom as a communal movement that allows people of the same interests to unite and represent themselves coherently within the public sphere. Fans actively engage in the fandom, forming a bond that seeks to explore, challenge, and redefine established norms. By actively engaging, individuals break free from the confines of mainstream narratives, constructing identities that resonate within their chosen fandoms.

Fandom studies differ from other contemporaries through the use of ethnographic approaches. Using ethnography as a tool gives fandom studies an upper hand in studying fandom as a cultural phenomenon. Ethnographic methods led research on subjects in their natural environment, where they can present themselves as who they are (Harrington & Bielby, 2007; Kusuma et al., 2020). Fandom studies facilitate people of various fandoms by providing a channel to showcase who they are, combating negative stigmas among the public and media. Fandom studies act as agents of change, giving marginalized people the platform to show and voice themselves.

Fandom studies have established itself as an emerging branch of study that delves into a growing cultural phenomenon (Jenkins, 2014). With the widening scope of the internet and rising connectivity, fandoms of all kinds grew more extensive and more robust; this demands an academic inquiry into the world of fandom. Fandom shapes itself into an intersection between social groups, identity formation, and power play. Fandom studies transcend beyond the study of shared interests as they dig deeper into the intricate relationship between individuals and their identified fandoms, paving the way for a growing cultural landscape (Gray et al., 2007).

Collective Identity

Exploring group identity and its influence on interactions entails examining the crucial link between collective identity and social trust. As Neville and Reicher (2018) emphasize, social identities are constructed as models of one's position within social relationships, projecting how the world is and how it should be organized. These identities are statements of intent, inherently prospective, and moral constructs. At the core of this connection lies the powerful sense of belonging and community fostered by collective identity (Finuras, 2023; Neville & Reicher, 2018).

Fandoms offer fertile ground for individuals to explore and express their multifaceted identities, transcending mere shared interests. Peacey (2020) emphasizes the positive space fandoms cultivate for collective identity development. Shared passions, like TV shows or books, serve as the foundation for community building, fostering shared values, culture, and language, aligning with Neville and Reicher's

(2018) notion of social identities as projects for how the world should be.

This sense of belonging strengthens individual and collective identities, allowing members to explore and express themselves within a safe and affirming space, as highlighted by Neville and Reicher (2018). Moreover, fandoms can challenge societal norms and provide opportunities to redefine mainstream constructs of identity, reflecting the dynamic nature of identity.

The concept of social identity plays a central role in understanding fan engagement and motivation. Kou (2021) examines how "Fandom Girls" leveraged social identity theory to mobilize collective action during an epidemic. Through shared identity construction and redefined group categorization, they transformed from passive fans into organized agents of change, illustrating the potential of identity to fuel collective action.

Finuras (2023) further sheds light on the connection between social identity and trust. Shared similarities within a group form the bedrock of trust, creating a sense of "common ground" that facilitates interpersonal connections and social interactions, resonating with Neville & Reicher's (2018) emphasis on the interdependence inherent in collective identity. Fandoms, with their shared interests and values, provide fertile ground for trust-building and supportive relationships, as Peacey (2020) further emphasized, illustrating the profound influence of social identities on trust dynamics within communities.

The proposed topics – Social Exchange Theory, Fandom Studies, and Collective Identity – offer multiple perspectives on human interaction. Each theory presents a distinct lens, yet they also interweave to create a richer understanding of our social landscape. To contribute to these important topics, this study investigates the impact of online interactions, characterized by trust, commitment, reciprocity, and power dynamics, on the development and resilience of shared identity and trust within the furry fandom.

Method

This research utilized a narrative review approach to explore the intricate interplay between online interactions, shared identity, and trust resilience within the furry fandom. Narrative review was chosen as it provided the researchers with a flexible and fluent path to explore an emerging topic while providing a wider scope of analysis (Sukhera, 2022). This method is relevant when analyzing the topic of furry fandom that is still rarely explored in the academic landscape and continues to emerge globally. In addition, as presented by Ferrari (2015), the narrative review method is suitable for research on the furry fandom using SET theory because it can synthesize existing literature and describe the current state-of-art, further contributing to the development of practice guidelines. Narrative reviews embrace the qualitative depth of existing studies, enabling a profound exploration of the underlying mechanisms and motivations that shape social interactions (Dixon-Woods et al., 2005). This qualitative strength aligns

perfectly with the research objective, which transcends mere summarization of findings.

This narrative review utilized the four core pillars of SET – trust, commitment, reciprocity, and power – to explore how shared identity manifests and navigates within the online spaces frequented by furries (Blau (1964) & Emerson (1976), as cited in Cook et al., 2013). This exploration delves beyond into the realm of meaning-making, uncovering the unspoken bonds of trust that solidify shared identity and the intricate mechanisms that foster resilience in the face of online negativity among furries.

The data was collected from six open-access journals and written by North American authors, with one paper on the topic of furry fandom from the last 10 years taken from each journal. The papers were selected based on their direct exploration of the shared identity within the furry fandom. The six collected papers were downloaded and scrutinized. Then, each paper was explored to find out which of the core pillars were depicted in the paper. It is important to note that one paper may contain more than one SET core pillar, and one core pillar may be present in more than one paper. The depiction of SET core pillars in each paper was further linked with the depiction in other papers. The overall findings were then synthesized into a discussion on how the online interaction of furries contributes to the development and resilience of shared identity and trust within fandom. A few other literatures in the field of social psychology were also utilized to support the discussion.

This study aims to interpret the existing literature within the unique context of the furry fandom and the established theoretical framework of Social Exchange Theory (SET) by exploring the question of: How do online interactions, characterized by trust, commitment, reciprocity, and power dynamics contribute to the development and resilience of shared identity and trust within the furry fandom?

It is essential to acknowledge that the limited scope of the reviewed literature, encompassing only six scholarly articles, necessitates an exploratory approach. Consequently, the findings of this study may not be generalizable to other fandoms in the digital world. However, the exploratory nature of this research paves the way for future studies to build upon these initial insights and offer a more comprehensive understanding of the furry fandom and its unique social dynamics.

Results and Discussion

Peacey (2020) highlights that within online fan communities, trust is not just about friendliness; it is the bedrock of powerful bonds forged through shared passions and collaboration. This trust fuels close friendships, a sense of belonging, and a supportive ecosystem where fans acknowledge each other's skills and foster positive relationships. Trust's transformative power extends beyond the personal, acting as the catalyst for collective action, from fan projects to conventions, showcasing its potential when united by a common purpose (Bruckner, 2016; Osburg & Heinecke, 2019). By nurturing open communication, shared values, and collaboration, fan communities offer a blueprint for cultivating and capitalizing on trust to create vibrant and impactful online spaces. Understanding and harnessing

this trust can enrich individual experiences and shape a more connected digital landscape (Osburg & Heinecke, 2019).

According to Neville and Reicher (2018), trust is the root of where fandoms stem and grow. Trust became the basis for fostering communal identity, where people construct their identity about others. At the same time, shared identity fosters trust, shaping social interactions and influencing our landscape (Finuras, 2023; Neville & Reicher, 2018). This shared sense of belonging, fueled by history, culture, and beliefs, creates interdependence and emotional investment (Neville & Reicher, 2018). Interdependence refers to where members of the furry fandom rely on each other for emotional support, creative inspiration, and a sense of belonging. This interdependence creates a web of connections within the community, where individuals lean on each other to achieve their goals and meet their needs. Emotional investment is when members deeply invest their feelings and energy into the furry fandom, forming strong attachments to the group and its shared experiences. This emotional investment is fueled by the sense of belonging that the community provides, fostering a profound connection and commitment to its well-being. More commonalities make trust easier, assuming shared understanding and predictability (Finuras, 2023). Participants in the furry community engage in interactions that offer them mutual benefits, whether it is emotional support, creative fulfillment, recognition for their talents, or opportunities for collaboration. This aligns with the core idea of Social Exchange Theory (Emerson (1976), as cited in Cook et al., 2013), where individuals seek out relationships and interactions that provide rewards, contributing to a positive and supportive social environment within the furry fandom.

This table summarizes the key insights from six scholarly articles examining how trust is fostered within the furry fandom through the lens of Social Exchange Theory. All six scholars highlight the significance of shared experiences, shared values, and online and offline communities in building a resilient foundation for trust and camaraderie within this unique online community.

Table 1. Key Factors in Fostering Trust within the Furry Fandom

Scholar(s)	Key Factors Fostering Trust
Satinsky & Green (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Conventions, online groups, and forums create community and connection. - Creativity and acceptance reinforce trust and a positive environment. - Foster trust through connection and shared experiences.
Reysen et al. (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Non-judgmental and supportive environment. - Increased sense of belongingness and social identification contribute to trust development.
Reysen et al. (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Increased well-being and social connectedness linked to trust. - Furry-themed identities, "fursonas," facilitate authentic expression and trust.
Heinz (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Role-playing, gaming, conventions, and meetups build trust through physical interactions. - Art and fursonas encourage creativity and belonging. - Emphasis on mutual respect creates a safe space for acceptance and trust.
Plante et al. (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Creativity and acceptance contribute to trust and social identification. - Online and offline communities become central aspects for connection and trust -building.
Mock et al. (2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Anthropomorphic animals, create belonging and shared identity. - Creativity, acceptance, openness foster trust. - Online forums, conventions offer connection and interaction.

Scholars like Satinsky & Green (2016), Reysen et al. (2015, 2023), Plante et al. (2015), and Mock et al. (2013) emphasize the importance of shared spaces and experiences in building trust. Conventions, online forums, and other gatherings create a sense of belonging and social identification, fostering trust through connection and shared understanding.

Studies by Reysen et al. (2023) and Heinz (2020) highlight the role of acceptance and self-expression in trust development. Fursonas, the often animal-based personas adopted by members, facilitate authentic expression, while a non-judgmental environment encourages open communication and vulnerability, contributing to trust.

Heinz (2020) and Plante et al. (2015) mention the significance of positive social interactions in building trust. Role-playing, gaming, and creative activities foster mutual respect and understanding, creating a safe space for interaction and trust-building.

Though nuances may differ, analyzed works consistently link shared experiences, belonging, and acceptance to trust and security within the furry fandom, boosting its cohesion and resilience. This echoes Social Exchange Theory's four pillars: trust among furries, commitment to being a furry, reciprocity between furries, and the power of furry fandom. By diving deeper into these pillars, this research unveils the intricate interplay of shared elements and social exchange principles that weave the unique and resilient fabric of the furry online world.

A. Trust Among Furries

Acceptance, support, and empathy play a major role in the overall interaction of the furry fandom. It is fundamental in shaping a friendly and open atmosphere, making members comfortable about revealing their true selves to fellow furries. This positive social atmosphere aligns with Social Exchange Theory (SET), where trust emerges from favorable exchanges (Blau (1964), as cited in Cook et al., 2013; Schilke et al., 2021). Furries experience mutual benefits within the community, fostering trust and long-term, stable relationships. Satinsky and Green's (2016) paper on furry identity and its survey underline the positive attitude shared among furries regarding their fandom, most of them supported the notion of furry fandom as a warm and welcoming space where everyone can express themselves freely. In conjunction with that, Heinz (2020) states that the construction of space in furry fandom paves the way for highly valued relationships and intimate relationships to flourish, one that involves trust.

The construction of a safe space led to members opening their true selves to others; this move created a mutual act of trust. Furries trusted the fandom as a safe space to share their personal experiences, believing they would not be judged or persecuted for being themselves. This resonates with fandom studies, where individuals actively engage with their shared interests, forming bonds that challenge societal norms (Gray et al., 2007). Furries use fursonas to explore identity and find acceptance, reflecting the role of fandoms in identity construction (Kington, 2015; Lamerichs, 2018). They confidently discuss their struggles, anxieties, and experiences, knowing their fellow furries will listen without prejudice. This openness fosters a deeper connection and understanding among members, solidifying the bonds of trust (Lamerichs, 2018).

The pervasive culture of acceptance, empathy, and mutual support within the furry fandom cultivates a strong sense of trust among its members (Satinsky & Green, 2016). It emboldens open and vulnerable communication, enabling furries to express their thoughts, feelings, and experiences without

fear of judgment or prejudice. The sense of trust fosters the development of strong, supportive relationships, providing a source of solace and camaraderie within a stigmatized community. Most importantly, this unwavering trust creates a haven for free and authentic self-expression, allowing furries to explore their identities, engage in creative pursuits, and thrive in a safe and affirming environment.

B. Commitment to be a Furry

Being a part of a fandom is not just an act of participation, it is also an act of identification. Identifying oneself as part of a group requires strong interest and commitment. The recent research conducted by Reysen et al. (2023) found that furries joined the fandom voluntarily through personal identification with the fandom. Complimenting that, two studies by Reysen et al. (2015) and Plante et al. (2015) showcase significant attachment and commitment from furries towards the fandom. Furries saw their fandom as a haven where they become attached with a sense of belonging, so they seek to keep it thriving and protected from outside interference.

For furries, the positive outcomes of being in their fandom's haven include self-expression, belonging, and community thriving. This commitment resonates with fandom studies (Gray et al., 2007), where fans actively engage in their community, forming bonds that challenge and redefine established norms. Furries use fursonas to negotiate their identities and find acceptance within the community, reflecting fandom's role in identity construction and emancipation (Kington, 2015; Lamerichs, 2018).

As furries lay their commitment to the fandom, they acquire rooms to contribute towards the fandom. In doing so, they can develop themselves and attain personal growth catered to their interest, which they cannot perform outside the fandom. By committing themselves to the fandom, furries reap two benefits: acquiring a space to express themselves freely while also keeping that space thriving and expanding. Furthermore, the solid collective identity within the fandom, fostered by shared values and experiences (Peacey, 2020), aligns with Neville and Reicher's (2018) conceptualization of social identity as a model for belonging and shared understanding. This common ground (Finuras, 2023) facilitates trust and supportive relationships, as seen in the increased well-being associated with greater fandom involvement. This resonates with SET's emphasis on trust (Emerson (1976), as cited in Cook et al., 2013), where positive social interactions and perceived support reinforce commitment.

Despite encountering external stigma, furries forge unwavering bonds within their community, transforming it into a sanctuary, a catalyst for personal growth, and a source of profound fulfillment. As shown in both articles by Satinsky & Green (2016) and Reysen et al. (2023), the dedication born from a deep-seated sense of belonging and self-acceptance underscores the transformative power of the fandom, not just in fostering supportive networks, but also in shaping the identities and trajectories of its members. This resilient expression of selfhood within a stigmatized group offers valuable insights into the profound impact of finding acceptance and belonging, ultimately reshaping individual lives and challenging societal perceptions.

C. Reciprocity Between Furies

Furry fandom is decentralized in how it is being constructed and maintained. Instead of relying on a single entity for its main source of interest, it revolves around the general idea of anthropomorphism, which encompasses various creative products and media (Dunn, 2021; Gerbasi et al. 2018). It shaped the furry fandom into a community-based fandom, where everyone in the fandom can contribute to the growth of the fandom without needing to adhere to certain creative restrictions. This led to a culture of reciprocity, where members mutually assist each other in the fandom.

As shown in Satinsky and Green (2016), the warm and welcoming space of the fandom is shaped by mutual respect among its members, who share the same understanding as part of a group. Adding to that, Mock et al. (2013) state that fandom became a source of escape, a coping mechanism for individuals who identify as furry. A reciprocal feeling is created as they reap the benefits for themselves while at the same time giving it to others.

Furies rely on each other to maintain the integrity and growth of the fandom. Social interactions among members contribute to the fandom's growing media and cultural product. Such a case can be seen from the transactional act of buying and making commissioned art, where furies paid other furies to create art of their furry persona or fursona. Here, they laid trust in other furies to create a physician rendition of their fursona, bringing to life their second identity. Reciprocity led to trust as they entrusted each other with the thing dearest to them.

The reciprocity works on different levels. Firstly, furies find acceptance and validation within the community, knowing they can unequivocally express themselves without fear of judgment. This unconditional acceptance fosters a sense of belonging and psychological safety, reducing stress and anxiety often associated with marginalized identities. Secondly, the community functions as a reservoir of guidance and encouragement, with members readily offering support and advice to one another. This continuous exchange of emotional resources fosters resilience and strengthens individual coping mechanisms. Consequently, the reciprocal nature of support within the furry fandom emerges as a crucial factor in promoting its members' overall well-being and emotional security.

D. The Power of Furry Fandom

As a stigmatized community, power dynamics played a part in shaping the internal and external relationships of the fandom (Heinz, 2020). Internally, the furry fandom has the power to create a sense of belonging among its members, and this power leads to members committing themselves to the fandom. Members of the fandom are drawn and held in place by their shared identity and the safe space provided by the fandom (Heinz, 2020; Satinsky & Green, 2016). In this sense, the fandom became a space for empowering individuals, giving them the space and support needed to thrive.

Externally, the fandom held substantial power in combating the stigmatization and marginalization of furies in mainstream media (Reysen et al., 2015). By uniting furies under the same umbrella, they can create a strong voice of reason, helpful in countering the hoaxes and stigmatization aimed at them.

The power created by furry as a fandom helps maintain the integrity of the community, shielding its members from outside pressure. Reysen et al. (2023) showed that integration in the fandom gave way to beneficial power that supported each individual's well-being in the fandom.

Despite enduring external stigmas and complex power dynamics, the furry fandom is a remarkable case study of the transformative power of community-driven self-expression. Within this nurturing environment, individuals navigate and cope with societal challenges, cultivate enhanced well-being, and confidently embrace their authentic selves. Recognizing the inherent tensions between marginalization and self-affirmation within the fandom presents an opportunity for further growth and societal impact. By critically addressing these challenges and fostering inclusive dialogue with broader communities, the furry fandom can solidify its role as a powerful force for personal growth, artistic expression, and a more open and accepting society.

Conclusion

Scholarly articles consistently highlight factors that foster trust within the furry fandom, such as conventions, online forums, and gatherings that create a sense of community and connection. Fursonas, the personas adopted by members, facilitate authentic expression and trust. Role-playing, gathering, and creative activities build trust through interactions and mutual respect.

Being a part of the furry fandom involves strong interest and commitment, where individuals voluntarily join the fandom through personal identification. Furrries see the fandom as a haven where they feel a sense of belonging, leading to significant attachment and commitment. Being attached to the fandom constitutes a two-way relationship where individuals simultaneously give and receive benefits to the fandom.

The furry fandom operates on a culture of reciprocity, where members assist each other and contribute to the community's growth. This includes buying and creating commissioned art, where furrries trust each other to create representations of their fursonas. This act entrusted others to bring their personification to life through artistic creations.

Internally, the furry fandom empowers its members by creating a sense of belonging and providing a safe space for self-expression. Externally, the fandom has the power to combat stigmatization and marginalization, uniting members to counter hoaxes and negative portrayals.

In conclusion, trust, commitment, reciprocity, and power dynamics within the furry fandom contribute significantly to the development and resilience of shared identity and trust. The fandom provides a supportive environment where members feel accepted, valued, and empowered, leading to strong bonds, personal growth, and a collective voice against external stigma. These elements are integral to the fabric of the furry world, shaping its culture and fostering a sense of community among its members.

References

- Bruckner, B. K. (2016). *Organisationales Vertrauen initiieren*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Cook, K. S. (2015). Exchange: Social. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Second Edition) (Vol. 8, pp. 482-488). Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.32056-6: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32056-6>
- Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R., & Nakagawa, S. (2013). Social Exchange Theory. *Handbook of social psychology*, 61-88.
- Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. *Academy of management annals*, 11(1), 479-516.
- Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: a review of possible methods. *Journal of health services research & policy*, 10(1), 45-53.
- Dunn, K. I. (2021). *Aesthetic Fandom: Furies in the 1970s*. University of Texas at Austin.
- Ferrari, R. (2015). Writing Narrative Style Literature Reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235.
- Finuras, P. (2023). Social Identity and Trust: An Evolutionary Perspective. *Journal of Intercultural Management and Ethics*, 6(3), 5-17.
- Frieder, R. E. (2018). The rules of social exchange: Unchanged but more important than ever. *Industrial and Organizational Psychology*, 11(3), 535-541.
- Gerbasi, K. C., Paolone, N., Higner, J., Bernstein, P. L., Conway, S., Privitera, A., & Scaletta, L. (2008). Furies from A to Z (Anthropomorphism to Zoomorphism). *Society & Animals*, 16(3), 197–222. <https://doi.org/10.1163/156853008X323376>
- Gray, J., Sandvoss, C., & Harrington, C. L. (2007). Introduction: *Why Study Fans?* In *Fandom: Identities and Communities in A Mediated World* (pp. 1–16). New York University Press.
- Harrington, C. L., & Bielby, D. D. (2007). Global Fandom/Global Fan Studies. In *Fandom: Identities and Communities in A Mediated World* (pp. 179–197). New York University Press.
- He, H., Li, X., Tavsels, M., & Zhou, R. (2022). A Literature Review on Fans' Identity Construction. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 638, 419–423.
- Heinz, M. (2020). “There's A Little Bit of That Magic Where I'm Becoming Something Else”: LGBT+ Furry Identity Formation and Belonging Online. *Journal for Undergraduate Ethnography*, 10(2), 21-37.
- Jeansonne, S. A. (2012). Breaking Down Stereotypes: A Look at the Performance of Self-Identity within the Furry Community [Master Thesis]. Texas State University-San Maros.
- Jenkins, H. (2014). Fandom studies as I see it. *Journal of Fandom Studies*, The, 2(2), 89–109. https://doi.org/10.1386/jfs.2.2.89_1
- Kington, C. S. (2015). Con Culture: A Survey of Fans and Fandom. *Journal of Fandom Studies*, 3(2), 211–228. https://doi.org/10.1386/jfs.3.2.211_1

- Kou, J. (2021, November). Collective Action of the “Fandom Girls” in Fighting the Epidemic—Based on the perspective of social identity theory. In *2021 International Conference on Culture-oriented Science & Technology (ICCST)* (pp. 651-655). IEEE.
- Kusuma, A., Putri Purbantina, A., Nahdiyah, V., & Khasanah, U. U. (2020). A Virtual Ethnography Study: Fandom and Social Impact in Digital Era. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 238–251. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.10898>
- Lamerichs, N. (2018). Shared Narratives: *Intermediality in Fandom*. In *Productive Fandom*. Amsterdam University Press.
- Lewis, R. J. (Director). (2003, October 30). Fur and Loathing. In *CSI: Crime Scene Investigation*.
- Mao, Y. (2022). Destigmatization in the Furry Fandom: A Case Study on the X University Self-organization in China. *Proceedings of the 2022 International Conference on Sport Science, Education and Social Development (SSESD 2022)*, 52–60. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-13-8_7
- Mock, S. E., Plante, C. N., Reysen, S., & Gerbasi, K. C. (2013). Deeper leisure involvement as a coping resource in a stigmatized leisure context. *Leisure/Loisir*, 37(2), 111-126.
- Molm, L. D., Schaefer, D. R., & Collett, J. L. (2009). Fragile and resilient trust: Risk and uncertainty in negotiated and reciprocal exchange. *Sociological Theory*, 27(1), 1-32.
- Neville, F. G., & Reicher, S. D. (2018). Crowds, social identities, and the shaping of everyday social relations. *Political psychology: A social psychological approach*, 231-252.
- Osburg, T., & Heinecke, S. (Eds.). (2019). *Media trust in a digital world: Communication at crossroads*. Springer Nature.
- Peacey, B. (2020). *You're the only one who knows my true identity: how fandoms create new identities for constructed language learners* (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
- Plante, C. N., Reysen, S., Roberts, S. E., & Gerbasi, K. C. (2016). FurScience! A Summary of Five Years of Research from the International Anthropomorphic Research Project. *FurScience*.
- Plante, C. N., Roberts, S. E., Snider, J. S., Schroy, C., Reysen, S., & Gerbasi, K. (2015). 'More than skin-deep': Biological essentialism in response to a distinctiveness threat in a stigmatized fan community. *British Journal of Social Psychology*, 54(2), 359-370.
- Reysen, S., Plante, C. N., Packard, G., Siotos, D., Roberts, S. E., & Gerbasi, K. C. (2023). Acculturation strategies as predictors of fandom identification in the fanfiction, Star Wars fan, and furry communities. *The Journal of Social Psychology*, 1-13.
- Reysen, S., Plante, C. N., Roberts, S. E., & Gerbasi, K. C. (2015). Ingroup bias and ingroup projection in the furry fandom. *International Journal of Psychological Studies*, 7(4), 49.
- Roberts, S. E., Davies-Kneis, C., Gerbasi, K., Fein, E., Plante, C., Reysen, S., & Côté, J. (2024). Seeding the Grassroots of Research on Furies: Lessons Learned from 15 Years of Creative Knowledge Mobilization, Valuing Community Partnerships, and Correcting the Record on Stigmatized Communities with Evidence-Based Scholarship. *Deviant Behavior*, 45(1), 50–79.

<https://doi.org/10.1080/01639625.2023.2237634>

- Satinsky, E., & Green, D. N. (2016). Negotiating identities in the furry fandom through costuming. *Critical Studies in Men's Fashion*, 3(2), 107-123.
- Shafirova, L., & Kumpulainen, K. (2021). Online collaboration and identity work in a brony fandom: Constructing a dialogic space in a fan translation project. *E-learning and Digital Media*, 18(3), 269-289.
- Schilke, O., Reimann, M., & Cook, K. S. (2021). Trust in social relations. *Annual Review of Sociology*, 47(1), 239-259.
- Sukhera, J. (2022). Narrative Reviews: Flexible, Rigorous, and Practical. *Journal of Graduate Medical Education*, 14(4), 414-417.

Komunikasi Inovasi Studi Implementasi Aplikasi I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi)

Sulis	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: sulisnasran@gmail.com
Fitria Ayuningtyas	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: -
Munadhil Abdul Muqsith	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Email: -

Abstrak

In support of SDGs program no. 2 Zero Hunger, the fulfillment of food supply, especially the availability of rice for national food, must be considered. The government through Kementerian Pertanian RI with Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) appointed PT Pupuk Indonesia and released an application, namely the integration of Pupuk Bersubdi (i-Pubers). Launching i-Pubers is a form of communication of innovations from government programs. The acceptance of the application is a TAM model with an innovation diffusion approach so that i-Pubers can answer the needs of farmers about the effective and efficient redemption process of subsidized fertilizers. The purpose of this study is to describe and explain the implementation of the TAM model innovation in the i-Pubers application in the subsidized fertilizer redemption process. This research uses a qualitative research method with descriptive analysis, while the data collection method is through interviews, document studies, and observations with informants of a partner owners, farmers, and farmer. The results of the research with these informants show that the Barito Kuala community consisting of Farmers, Agricultural Extension Officers, and Subsidised Fertiliser Kiosk Owners or Kiosk Partners are coils that each other has a role to succeed in using i-Pubers. Community acceptance of the i-Pubers application is a form of acceptance because the application is easy and useful in supporting fertilizer needs in Barito Kuala Regency.

Keywords: *Diffusion of Innovation, TAM, i-Pubers*

Pendahuluan

Pupuk subsidi sebagai pendukung keberhasilan penen padi bagi Petani maka kebutuhan pupuk untuk mendukung keberhasilan Panen harus terpenuhi dengan baik. Sejalan dengan tujuan *United Nations Development Program* yang tercantum pada program *Suitainable Development Goals* (SDGs) nomor dua (2) yakni *Zero Hunger* atau menekan angka kelaparan dengan menciptakan ketahanan pangan maka produktivitas komoditas padi sebagai sumber pangan di Indonesia harus sejalan sesuai dengan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan.

Masa tanam komoditas padi pada periode 2023/2024 yang jatuh pada 1 November 2023 lalu

mendapatkan perhatian khusus oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan). Pasalnya keberhasilan panen padi mempengaruhi pasokan pangan nasional dalam hal ini ketersediaan beras. Peran pemerintah dalam meyukseskan panen padi didukung dengan ketersediaan pupuk bersubsidi.

Alur peredaran pupuk bersubsidi di Indonesia merupakan bagian kerjasama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini menunjuk distributor pupuk. Pupuk tersebut disediakan oleh penyedia atau produsen yang sudah terafiliasi dengan pemerintah.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi berbasis *website* dan *playstore*. Aplikasi tersebut merupakan suatu terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemerataan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selain itu, aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam distribusi pupuk agar tepat sasaran dan tepat guna secara langsung kepada petani yang sudah terdaftar dengan identitas kependudukannya. Aplikasi tersebut di kenalkan oleh Kementan dengan istilah I-PUBERS atau Integrasi Pupuk Subsidi. Yang mana dalam aplikasi tersebut sudah terintegrasi data petani yang bersangkutan dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Aplikasi I-Pubers merupakan penggabungan simluhtan dan aplikasi penebusan pupuk dengan kartu Tani. Hadirnya I-PUBERS sebagai Langkah awal dalam memberikan suatu inovasi kekinian, yaitu dengan penghapusan kartu tani digital. Bagi ketiga provinsi yang disebutkan diatas, Poktan atau Petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan menyebutkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang telah terdaftar sebelumnya pada aplikasi Simluhtan.

Melalui *website* <https://app3.pertanian.go.id/simluh/monpetanikec.php> tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permenten) No 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menyebutkan bahwa setoap petani yang memiliki lahan 2 ha dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan catatan telah terdaftar sebagai Kelompok Tani (Poktan) melalui aplikasi Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Poktan didampingi oleh Penyuluh Pertanian untuk mendaftar sebagai anggota Poktan di aplikasi Simluhtan. Penyuluh Pertanian memiliki kecakapan untuk melakukan dan mendikte petani untuk mendaftarkan indentitasnya sesuai yang dibutuhkan dalam aplikasi. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan data kependudukan sehingga terjadi sinkronisasi data yang digunakan untuk mengoptimalisasi kegunaan aplikasi ini.

Aplikasi Simluhtan dapat mempermudah pendataan kebutuhan pupuk di masing-masing wilayah Indonesia. Pengembangan aplikasi tersebut berupa penebusan pupuk yang lebih mudah dan efisien bagi petani. Saat ini telah diterapkan di tiga (3) provinsi yakni Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara (Sumut). Tepatnya tanggal 26 Juni 2023 lalu, Pemerintah melalui kebijakan Kementan telah memberlakukan proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (I-PUBERS). Aplikasi I-PUBERS merupakan integrasi dari aplikasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yakni PT Pupuk Indonesia.

Skema yang diatur pada I-PUBERS dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yakni dengan Petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) komoditas tanaman padi dengan memiliki luas lahan 2 ha. Selanjutnya petani melakukan penginputan data sesuai KTP petani yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian sesuai dengan pengajuan tahun anggaran di masa tanam tersebut. Setelah *upload* data, petani menunggu hasil verifikasi untuk pengalokasian jumlah pupuk sesuai dengan komoditasnya. Proses verifikasi dilakukan oleh pemilik kios dengan mencocokkan NIK sesuai di I-PUBERS. Prosesnya bagi petani yang akan menebus pupuk bersubsidi dicocokkan datanya sesuai dengan distribusi pupuk pada tahun pengadaan pupuk subsidi dengan syarat pengambilan pupuk di kios Tani.

Melalui aplikasi I-PUBERS petani tidak khawatir atas ketersediaan pupuk dikarenakan pada aplikasi tersebut terdapat jumlah pasokan pupuk sesuai dengan kebutuhan di daerah. Petani yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang teknologi tetap dapat menggunakan aplikasi I-PUBERS, hal ini karena didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Peran Penyuluh dan Pemilik Kios menjadi penting karena masing-masing memiliki peran dalam pendampingan dan memberikan informasi penting dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Penggunaan *Information Communication and Technology* (ICT) dalam proses penebusan pupuk bersubsidi sebagai salah satu langkah strategis untuk penyerapan subsidi pupuk di kalangan petani. Penggunaan ICT dalam sektor pertanian sebagai upaya untuk penerimaan inovasi baru atau dalam hal ini disebut sebagai *diffusion innovation* (difusi inovasi). Konteksnya melalui terobosan pengembangan modernisasi Masyarakat yang lebih maju dengan penggunaan ICT untuk menunjang kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi.

Menurut (Davis, 2014) penggunaan teknologi merupakan sebuah sikap penerimaan terhadap teknologi atau yang dikenal dengan model *Technology Acceptance Model* (TAM). Menurutnya, Aplikasi I-Pubers dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memenuhi kriteria *Perceived usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. Hadirnya Aplikasi I-PUBERS memudahkan pemilik Kios dalam proses komunikasi dengan Poktan yang akan menebus pupuk bersubsidi. Pendataan yang telah terintegrasi melalui NIK sebagai kemudahan yang diperoleh pemilik kios untuk menghindari kecurangan dalam proses penebusan. Cara lampau masyarakat menebus pupuk dengan membawa berkas *hardfile* berupa identitas pribadi saat ini mulai bermigrasi dengan lebih *simple*, mudah, dan akurat dengan mengakses aplikasi I-PUBERS.

Pemilik kios sebagai operator atau kontroler dapat menggunakan aplikasi I-PUBERS dengan mengoperasikan aplikasi melalui memasukan jumlah transaksi penebusan dan selanjutnya petani menandatangani bukti transaksi. Pada saat melakukan transaksi Petani melakukan swafoto secara langsung. Didalam foto tersebut dilengkapi informasi lokasi dan waktu transaksi secara *realtime*.

Implementasi I-PUBERS dilakukan di beberapa Provinsi di Indonesia. Salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala. Penggunaan I-PUBERS di kabupaten tersebut telah

mendapatkan predikat pengelolaan I-PUBERS terbaik. Selain itu, di Kalimantan Selatan juga memiliki peningkatan dalam produktivitas ketahanan pangan pada komoditas tanaman padi. Seperti halnya yang disampaikan oleh (Masganti et al., 2020) dalam proses peningkatan ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan memerlukan adanya perbaikan sistem kelembagaan pertanian, petani dan kios penyedia sarana produksi pertanian yang memadai berupa ketersediaan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penting dilakukan penelitian berkaitan dengan Komunikasi Inovasi dalam Implementasi Penggunaan Aplikasi I-PUBERS untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi. Petani Barito Kuala memiliki tantangan yakni dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi I-PUBERS untuk penebusan pupuk. Efektivitas aplikasi I-PUBERS juga dapat dilihat dari petani yang mampu menggunakan aplikasi sesuai dengan Bahasa pemrograman atau user interface yang tersedia pada aplikasi penyedia pupuk tersebut. Konsep komunikasi yang terbangun dalam pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan komunikasi searah. Hingga terbangun komunikasi dua arah yakni dengan adanya bantuan penyuluh pertanian yang menerjemahkan kepada petani.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Wahyu, n.d.), dengan judul “Efektifitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten SIAK (Studi Kasus Kelompok Tani Kec. Tualang). Hasil penelitian tersebut menjabarkan bahwa belum adanya upaya yang efektif terhadap implementasi program pupuk bersubsidi dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. Penelitiannya menyebutkan bahwa pada sasaran program tidak tepat target dan sasarannya, maka penelitian tersebut mengusulkan adanya peningkatan kemampuan petani dalam menebus pupuk bersubsidi dapat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan guna terjadi peningkatan dalam ketersediaan ketahanan pangan.

Sedangkan implementasi *diffusion of innovations* telah dilakukan oleh (Fahlevi et al., n.d.) dengan judul penelitian yakni “Analisis Aplikasi iJateng dengan menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM)”. Analisisnya menyebutkan bahwa di kalangan masyarakat Jawa Tengah telah mampu mengadopsi aplikasi iJateng sesuai dengan kebutuhan ditengah masyarakat. Pemanfaatan teknologi modern menurut (Septiandika et al., 2022) diyakini dapat memudahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik secara *administrative* dalam bentuk kearsipan maupun pemberian layanan kelembagaan kepada setiap masyarakat. Pelayanan publik dapat disinkronisasikan dengan seluruh bidang kehidupan masyarakat. Seperti halnya arah penyelenggaraan pelayanan publik yang berkembang dengan menelusuri perkembangan teknologi dan mengedepankan standar pelayanan yang prima.

Efektivitas *diffusion of innovations* menjadi sebuah kunci untuk kemajuan peradaban Masyarakat. Penggunaan teknologi memudahkan Masyarakat dalam pemenuhan keberlangsungan kehidupan. Ditengah gempuran kecanggihan teknologi Masyarakat berada pada sisi pemanfaatan teknologi untuk kecakapan penggunaannya. Menurut (Fatonah et al., 2008) dalam risetnya membuktikan bahwa difusi inovasi dapat mempengaruhi anggota disebuah komunitas dalam penerimaan sebuah produk teknologi.

Berangkat dari kepentingan Masyarakat yakni para petani dengan komoditas padi dalam penggunaan aplikasi I-PUBERS maka perlu dilakukan riset terkait Komunikasi Inovasi Pada Implementasi I-PUBERS dalam Proses Penebusan Pupuk Bersubsidi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implementasi inovasi model TAM pada aplikasi I-PUBERS dalam proses penebusan pupuk bersubsidi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan menggabarkan tentang proses penerimaan *diffusion innovation* pada pemanfaatan aplikasi I-PUBERS.

Signifikansi pada penelitian ini secara praktis dapat digunakan dalam mengembangkan difusi inovasi yang relevan dengan fenomena di Masyarakat. Khususnya pada Masyarakat Barito Kuala yang sebagai pilot project pemerintah dalam serapan pupuk bersubsidi melalui penggunaan aplikasi I-PUBERS. Sedangkan dari segi akademisi, penelitian ini memiliki signifikansi dalam berkontribusi pada disiplin ilmu komunikasi, teknologi dan Informasi, dan Pembangunan Masyarakat yang berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran

Diffusion Inovation Theory

Diffusion Inovation Theory berasal dari kata Difusi dan Inovasi. Difusi merupakan sebuah proses yang mana inovasi dapat ditransmisikan ke anggota suatu sistem dari waktu ke waktu. Inovasi adalah pengenalan sesuatu yang baru. Proses pengambilan keputusan inovasi merupakan proses evolusi yang dilalui seseorang mulai dari penemuan awal suatu inovasi hingga penerapannya. Seseorang dianggap inovatif dan mampu menjadi pembuat perubahan jika mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan cenderung menerimanya lebih cepat dibandingkan anggota sistem lainnya. Menurut (Littlejohn & Foss, 2009) tingkat adopsi dinilai dari tingkat penerimaan suatu inovasi, yang ditentukan oleh seberapa cepat inovasi tersebut diadopsi.

Ide difusi inovasi pertama kali diperkenalkan oleh Gabriel Tarde, seorang sosiolog dan sarjana hukum Perancis. Ia merumuskan dan menyempurnakan ide-ide yang menjadi dasar penelitian difusi, seperti model *opinion leader* dan *S-shape Curva*. Penelitian Tarde dilanjutkan oleh antropolog seperti Clark Whistler, yang menganalisis perbedaan *diffusion-horse* di antara suku Indian Dataran Rendah. Ini adalah praktik inovatif yang memungkinkan mereka melakukan peperangan hampir terus-menerus dengan suku-suku tetangga.

Semua elemen yang terkait dengan paradigma penelitian modern tentang difusi inovasi disatukan dalam sebuah studi tahun 1942 oleh Bruce Ryan dan Neil Gross yang menyelidiki bagaimana pengenalan benih jagung hibrida dapat menyebar ke petani di Iowa, Amerika Serikat. Para petani bertanya-tanya mengapa teknologi ini, mampu menghasilkan peningkatan hasil hingga 20% per hektar. Ryan dan Gross menemukan bahwa petani harus mengubah cara menanam jagung, termasuk membeli benih jagung dari perusahaan dibandingkan menggunakan benih jagung dari jagung yang dipanen sebelumnya.

Studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat adopsi sebagian besar inovasi mengikuti kurva berbentuk lonceng atau S, dengan adopsi oleh beberapa orang terlebih dahulu, diikuti oleh adopsi massal, dan kemudian ketika proses difusi dan adopsi menjadi lebih berhasil. Studi ini menjadi model bagi banyak studi penyuluhan yang dilakukan oleh Sosiolog pedesaan yang menyelidiki banyak inovasi pertanian lainnya pada tahun 1950an.

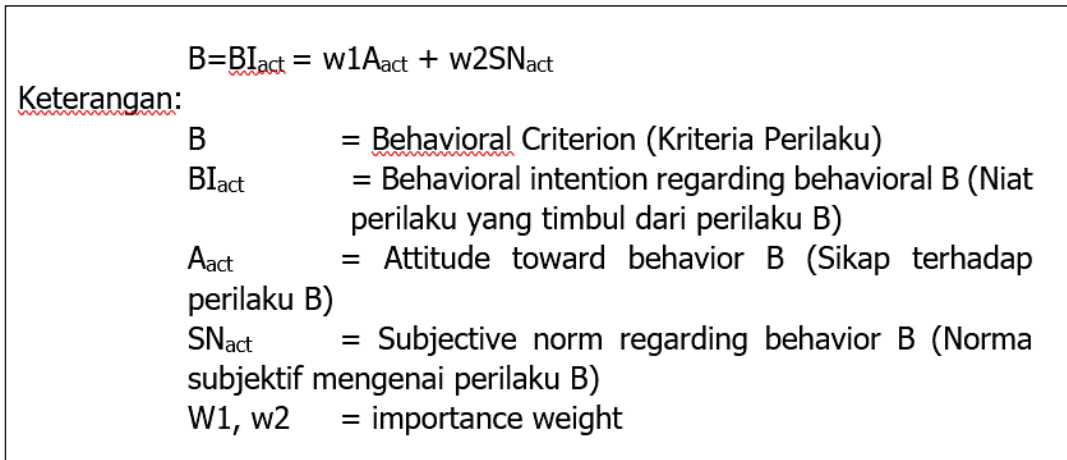
Sementara itu, pendekatan difusi bergerak melampaui sosiologi pedesaan untuk mempengaruhi ilmu-ilmu sosial lainnya, termasuk sosial lainnya, termasuk pemasaran, ilmu politik, pendidikan, geografi, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Dorongan utama untuk penelitian difusi dalam ilmu-ilmu sosial adalah karya Everett Rogers di mana studi tentang difusi jagung hibrida dilakukan; disertasinya merangkum apa yang telah dilakukan. *Diffusion of Innovations*, yang diterbitkan pada tahun 1962, dimana Rogers memberikan model umum difusi, yang sesuai untuk berbagai disiplin ilmu dan paradigma penelitian.

Difusi inovasi adalah proses komunikasi. Pertama, inovasi diketahui melalui saluran komunikasi yakni jika individu tidak dapat mengetahui tentang suatu inovasi, difusi tidak dapat. Media massa dan komunikasi massa terlibat dalam proses tersebut karena mereka berkontribusi pada kesadaran tentang ide atau produk baru.

Komunikasi interpersonal juga sangat penting dalam proses difusi. Keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi sangat bergantung pada diskusi dengan rekan-rekan yang telah mengevaluasi dan membuat Keputusan apakah akan mengadopsi inovasi tersebut. Karena kebaruan dari inovasi tersebut, individu mengalami tingkat ketidaktahuan yang tinggi tentang ketidakpastian tentang hal itu. Oleh karena itu, studi tentang perubahan sikap, pengurangan ketidakpastian, dan pengambilan keputusan ikut berperan dalam proses difusi, terutama karena mereka berdampak pada perubahan perilaku karena difusi pada akhirnya adalah tentang mengadopsi perilaku baru.

Technology Acceptance Model (TAM)

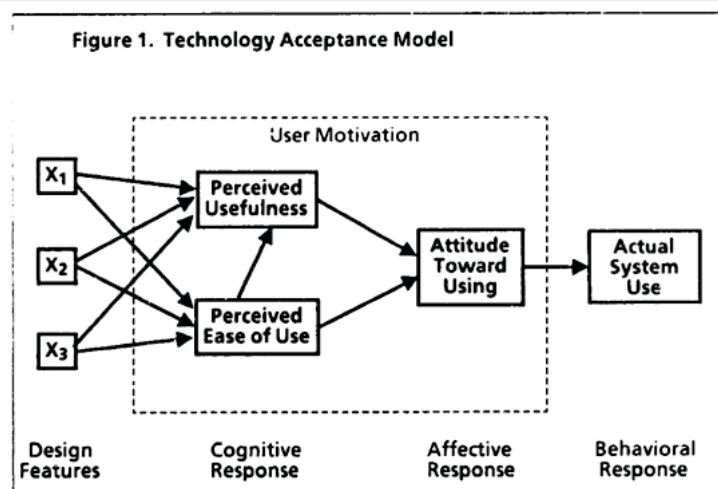
TAM adalah sebuah gagasan yang digunakan untuk memahami bagaimana pengguna dapat menerima dan menggunakan teknologi. Pertama kali TAM dikembangkan oleh (Davis, 2014) melalui penelitiannya yang berjudul “*A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information System*”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu (B_{act}) adalah determinan kausal (sebab-akibat) langsung dari kinerja nyata dalam melakukan perilaku tersebut (B), dan bahwa niat individu ditentukan secara bersama-sama oleh sikapnya dalam melakukan perilaku tersebut. Perilaku (Act) serta pengaruh sosial yang dirasakan dari orang-orang yang penting bagi individu tersebut (S_{Nact}).



Gambar 1 Skema Perilaku Manusia terhadap Penerimaan TAM

Motivasi untuk berperilaku (B) didefinisikan sebagai niat individu yang mungkin cenderung subyektif untuk melakukan perilaku tertentu. Sikap yang mengacu pada individu yang memiliki pengaruh untuk menilai perilaku orang lain kepadanya. Sedangkan norma subyektif mengacu pada asumsi setiap orang dengan memiliki nilai yang berpengaruh terhadap perilakunya. Persamaan keduanya memiliki arti bahwa sikap individu terhadap suatu hal tertentu merupakan fungsi dari konsekuensi yang dirasakan.

Model TAM menurut Davis di definisikan dalam sebuah diagram (Gambar 1) yang menunjukkan anak panah mewakili hubungan sebab akibat. Menurut Davis sikap keseluruhan calon pengguna terhadap penggunaan sistem tertentu dapat menjadi kunci utama apakah dia benar-benar menggunakannya atau tidak. Sikap terhadap penggunaan teknologi pada dasarnya merupakan keyakinan terhadap manfaat dan kemudahan yang dapat dirasakan.



Gambar 2 Alur Penerimaan TAM

Dalam konteks komunikasi, khususnya untuk komunikasi organisasi, dukungan TAM sebagai

alternatif terlaksananya proses komunikasi yang efektif. TAM dapat digunakan dalam berbagai konteks pengembangan perangkat lunak dalam proses komunikasi organisasi.

Perceived Usefulness (Presepsi Kegunaan)

Presepsi Kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja penggunaannya. *Perceived usefulness* dipengaruhi oleh kegunaan teknologi dan kemampuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Menurut (Davis, 2014) mendefinisikan *perceived usefulness* sebagai berikut:

1. Efektivitas teknologi yakni kualitas teknologi, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan teknologi.
2. Keuntungan teknologi meliputi biaya, produktivitas, kualitas produk, dan kemudahan akses.
3. Keterikatan teknologi dengan fungsinya yakni fungsionalitas, kemampuan teknologi, mempercepat tugas.
4. Ketersediaan teknologi adalah kebutuhan pengguna, konteks penggunaan, fitur dan fungsi teknologi, ketersediaan teknologi.

Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan)

Persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dapat membantu secara keseluruhan. *Perceived of Use* dipengaruhi oleh kemudahan pengguna teknologi dan ketersediaan sumber daya. Berikut adalah indikator untuk mengukur *Perceive Ease Of Use* yaitu sebagai berikut:

1. Kemudahan belajar
Merupakan sebuah persepsi individu tentang sejauh mana teknologi mudah dipelajari oleh setiap individu yang menggunakan teknologi tersebut.
2. Kemudahan Penggunaan
Presepsi individu mengenai teknologi yang mudah dipelajari dan memiliki efisiensi dan kemudahan navigasi antar muka.
3. Ketersediaan dukungan teknis
Merupakan persepsi individu tentang ketersediaan bantuan teknis jika pengguna mengalami kesulitan.
4. Ketersediaan sumber daya
Sebagai sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya perangkat lunak dan internet untuk mendukung teknologi dapat dimaksimalkan dalam penggunaannya.

Teknologi dapat digunakan oleh masing-masing individu jika memiliki kriteria kemudahan penggunaan yakni sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan adopsi dan penggunaan teknologi oleh TAM.
2. Dapat membantu pengambilan keputusan secara strategis.
3. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan teknologi.

4. Dapat meminimalkan risiko kegagalan dalam penggunaan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Penyuluh Pertanian, Pemilik Kios dan Petani di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Pengumpulan data menurut (Craswell, at all. 2018) langkah-langkah pengumpulan data termasuk menetapkan batasan untuk penelitian melalui pencarian informan dan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur, observasi dan wawancara terstruktur, dokumen, dan materi visual. Lokasi atau individu yang dipilih secara sengaja untuk studi yang diusulkan yang paling membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian.

Pemilihan infoman dan lokasi mungkin mencakup empat aspek yang diidentifikasi oleh (Milesandhuberman1994, n.d.) yaitu Mlatar (yaitu di mana penelitian akan dilakukan), aktor (yaitu, siapa yang akan diamati atau diwawancarai), peristiwa (yaitu, apa yang akan diamati atau yang akan diamati atau diwawancarai), dan proses (yaitu, sifat evolusi dari peristiwa yang dilakukan oleh para aktor dalam latar tersebut).

Peneliti menggunakan sumber data berupa observasi, metode wawancara dan studi dokumen. Kriteria informan meliputi pemilik Penyuluh Pertanian, Pemilik Kios dan Petani di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kabupaten tersebut sebagai salah satu Kabupaten dengan capaian pengelolaan I-PUBERS terbaik di Kementerian Pertanian.

Pada penelitian ini dipilih 4 Informan atau narasumber untuk diwawancarai dengan pertanyaan yang masing-masing sama. Menurut (Campion, 1997) dalam wawancara terstruktur dapat menggunakan tiga informan sebagai proses validasi data melalui pertanyaan yang diajukan sesuai dengan studi kasus yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Aplikasi I-PUBERS sebagai aplikasi yang dipakai oleh Mitra Kios Pupuk Lengkap untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital. Aplikasi ini merupakan integrasi data di e-alokasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian BUMN melalui PT Pupuk Indonesia. Aplikasi ini dinilai memudahkan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan Petani hanya menggunakan KTP untuk memindai (Nomor Identitas KTP (NIK) dalam proses penebusan pupuk. Pemilik kios melakukan pemindaian NIK untuk mengetahui jumlah transaksi pupuk yang ditebus sesuai dengan penginputan data yang telah dilakukan sebelumnya oleh Penyuluh Pertanian.



Gambar 3. Dokumen di Lapangan Tata Cara Penebusan Melalui Aplikasi i-Pubers
Sumber: Dokumentasi peneliti (2023)

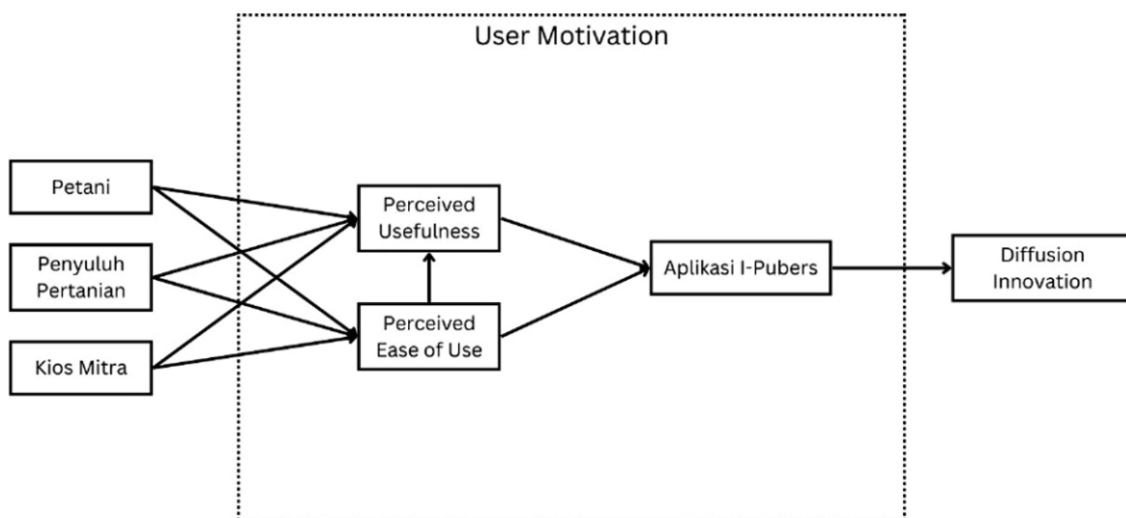
Gambar 3 merupakan petunjuk penebusan pupuk bersubsidi yang ditemukan ketika observasi di lapangan yakni di kios Pupuk Bersubsidi Kios “S” Pertanian di Kabupaten Barito Kuala diketahui bahwa pihak kios dalam mendukung proses difusi inovasi turut memebrikan diseminasi literasi informasi proses dan cara penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers. Gambar 3 diketahui cara penebusan pupuk diawali dengan petani menunjukkan KTP untuk dipindai NIK untuk mengakses data di e-alokasi. Kedua, Pemilik Kios atau pengecer menginput jumlah transaksi penebusan pupuk bersubsidi tersebut. Ketiga, Petani menandatangani bukti transaksi pada aplikasi I-PUBERS. Keempat, KTP di Foto menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan geotagging dan timestamp, hal tersebut digunakan apabila terdapat ketidaksesuaian data di KTP maka perlu dilampirkan surat keterangan dari Kelurahan setempat. Kelima, bukti transaksi tersimpan secara digital untuk sewaktu-waktu dibuthkan dapat digunakan sesuai keperluan. Keenam, setelah melakukan transaksi Petani dan Pupuk yang ditebus dilakukan foto Bersama sebagai bukti telah melakukan transaksi.

Proses yang dilakukan oleh Petani dan Pemilik Kios dapat diketahui sebagai proses difusi inovasi pada sektor pertanian khususnya dalam penebusan pupuk bersubsidi. Integrasi penggunaan teknologi

digital merupakan proses yang Panjang. Diawali dengan digitalisasi data petani melalui Kartu Tani Digital sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.21-/B/11/2022 yang disebutkan bahwa penebusan pupuk subsidi dilakukan oleh Petani dengan menunjukkan Kartu Tani Digital.

Penggunaan Kartu Tani Digital kemudian bermigrasi, tepatnya pada pertengahan tahun 2023, melalui surat Keputusan Menteri Pertanian yang menyebutkan bahwa terdapat inovasi baru dalam integrasi data penebusan pupuk bersubsidi yakni melalui aplikasi i-Pubers. *Pilot project* dalam penggunaan aplikasi i-Pubers yakni wilayah yang memiliki produktifitas hasil pertanian yang tinggi. Salah satunya di Kalimantan Selatan, sebagai wilayah yang menjadi uji coba tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam sosialisasi dan pengaplikasian kepada Penyuluh Pertanian, Pemilik Kios, dan Petani.

Penggunaan inovasi ICT tersebut seperti yang dilakukan oleh (Davis, 2014) merupakan sebuah model TAM. Studi tentang TAM merupakan pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Berikut adalah bagan tentang penggunaan ICT yang dapat diterima sebagai model TAM.



Gambar 4. Bagan Motivasi Penggunaan TAM

Sumber: Olahan peneliti (2023)

Model TAM didefinisikan sebagai sikap keseluruhan calon pengguna terhadap penggunaan sistem tertentu menjadi penentu utama apakah dia benar-benar menggunakannya atau tidak. Sikap terhadap penggunaan teknologi pada dasarnya merupakan keyakinan terhadap manfaat dan kemudahan yang dapat dirasakan. Penggunaan aplikasi I-PUBERS melibatkan Petani, Penyuluh Pertanian, dan Kios Mitra atau Pengecer Pupuk. Ketiganya sebagai sebuah rantai yang dapat membentuk pemahaman tentang Kegunaan Aplikasi I-PUBERS dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi I-PUBERS.

Manfaat dalam model TAM dikenal dengan istilah *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Persepsi Kegunaan (*Perceived usefulness*) didefinisikan disini sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja penggunanya. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan mengarah pada sebuah pemahaman sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem aplikasi I-PUBERS telah dirancang dan didesain sesuai dengan kebutuhan untuk menopang maupun membantu secara keseluruhan kebutuhan pupuk di Masyarakat Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Proses penelitian menemukan bahwa pengguna aplikasi i-Pubers dalam penelitian ini meliputi Penyuluh Pertanian, Pemilik Kios, dan Kelompok Tani yang kemudian disebut sebagai informan. Oleh Peneliti diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian daftar informan

Nama	Profesi	Lokasi
ABA	Penyuluh Pertanian	Kec. Mataraman
NA	Penyuluh Pertanian	Kec. Martapura Barat
TR	Pemilik Kios	Kec. Rantau Badauh
JW	Petani	Kec. Mandastana

Sumber: Olahan data lapangan (2023)

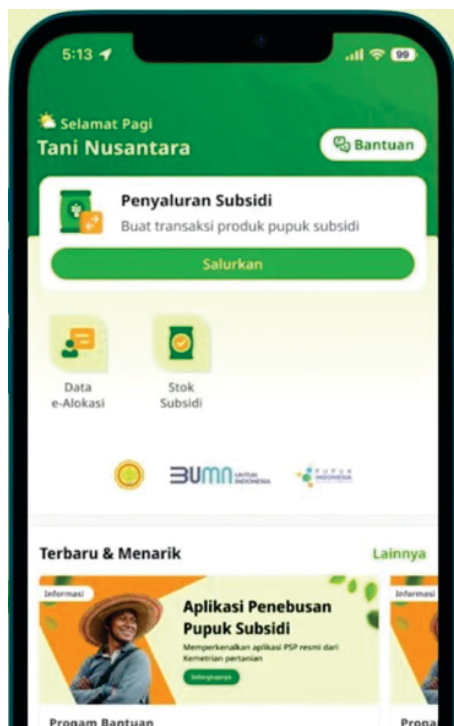
Guna mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan Wawancara dilakukan secara *virtual* atau dalam jaringan (*daring*) dan obeservasi lapangan. Dapat diketahui bahwa difusi inovasi implementasi model TAM pada aplikasi i-Pubers dikategorikan dapat memenuhi kriteria model TAM. Penjabarannya sebagai berikut:

1. *Usefulness Perceived* (Persepsi Kebermanfaatan)

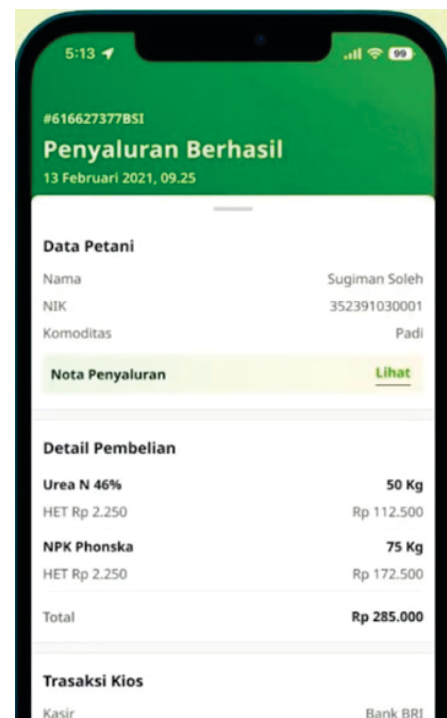
Peneliti melakukan wawancara kepada dua (2) Penyuluh Pertanian. Sebagai bagian hilir, Penyuluh Pertanian memiliki tugas, pokok, dan fungsi (*tupoksi*) untuk menginput NIK Petani yang telah memenuhi kriteria memiliki lahan garapan 2 ha. Penginputan data sesuai NIK lebih mudah dan efisien dalam pengolahan data identitas Petani karena telah tersistem dan dapat disimpan secara digital. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung serta menopang efektivitas penggunaan I-PUBERS. Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi *transfer knowledge* secara kontinyu kepada Petani agar memudahkan dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Selain itu menurut Penyuluh Pertanian yang diwawancarai peneliti menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi I-PUBERS sangat memudahkan untuk mengetahui *ploting* alokasi dosis pupuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk meng-*cover* lahan para petani.

Mendukung SDGs nomor 2 yakni *zero hunger*, keberlanjutan pangan berupa beras yang berkualitas harus sejalan dengan ketersediaan pupuk sebagai faktor pendukung hasil panen komoditas padi. Dalam proses difusi terbentuk dari proses literasi yang diberikan oleh Penyuluh Pertanian yang ditransmisikan kepada anggota kelompok Tani dari waktu ke waktu sehingga Petani dapat memahami pentingnya penggunaan aplikasi I-PUBERS. Inovasi I-PUBERS memudahkan Petani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Sejalan dengan pemilik Mitra Kios atau pengecer Pupuk yang merasa terbantuan dengan model aplikasi I-PUBERS pada proses penebusan Pupuk Bersubsidi.

Hubungan yang terjadi antara Penyuluh Pertanian, Mitra Kios Pupuk dan Petani, menurut (Littlejohn & Foss, 2009) sebagai komunikasi interpersonal yang proses tersebut memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap pesan (informasi) yang di berikan. Petani dibantu oleh Pemilik Kios atau pengecer pupuk dalam memberikan validasi transaksi pupuk sesuai dengan data yang diinput. Penginputan tersebut berupa unggah foto pada saat penebusan dan tanda tangan digital. Masing-masing Petani yang sudah terdaftar pada e-alokasi akan mendapatkan jumlah pupuk sesuai data di I-PUBERS.



Gambar 5 Tampilan Aplikasi I-PUBERS



Gambar 6 Tampilan Dosis Pupuk

Tampilan Gambar 5 merupakan *interface* dari aplikasi I-PUBERS. Pemilik Kios memiliki *data base* kebutuhan pupuk sebagai dengan luas hektara dari Para Petani. Pada Aplikasi tersebut terdapat kolom data dari e-Alokasi dan Jumlah dosis yang didapatkan. Sedangkan aplikasi gambar nomor 6, merupakan tampinal atau interest dari jumlah penyaluran pupuk yang dibutuhkan di

nasyarakat. Terdapat nama dan NIK sebagai identitas utama pemilik *account*.

Penggunaan aplikasi sebagai salah satu media elektronik tergolong dalam media massa baru dan komunikasi massa yang terlibat antara Penyuluh Pertanian, Petani, dan Mitra Kios atau Pengecer Pupuk dalam proses tersebut karena mereka berkontribusi pada kesadaran tentang ide atau produk baru berupa penggunaan I-PUBERS. Keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi yang dilakukan oleh Petani, dan Mitra Kios atau Pengecer Pupuk sangat bergantung pada penyampaian informasi yang jelas oleh Penyuluh Pertanian.

Petani di Kabupaten Barito Kuala mendapat sosialisasi dari Penyuluh Pertanian sebelum menggunakan aplikasi I-PUBERS. Sejalan dengan literasi yang diterima oleh pemilik Mitra Kios atau Pengecer Pupuk dalam memberikan tanggapan atau *feedback* kepada petani jika terdapat informasi yang belum sesuai dengan alur sesuai aplikasi I-PUBERS.

Pengetahuan tentang alur dan informasi untuk pengajuan pupuk subsidi sudah tersedia dengan poster yang ditempel dikios-kios penyalur pupuk yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Pertanian dan Penyedia Pupuk. Sehingga dalam mendukung penggunaan model TAM dalam aplikasi I-PUBERS dapat digunakan secara efektif dan efisien. Baik untuk digunakan oleh Kios dan Petani yang mengajukan Pupuk.

Pola komunikasi interpersonal yang terbangun antara Penyuluh Pertanian, Petani dan Pemilik Kios menjadi sebuah keberhasilan dalam proses pengajuan pupuk subsidi. Menurut (Littlejohn & Foss, 2009) Interpersonal Communication Theory (IPC) merupakan komunikasi yang terjadi diantara orang-orang dalam suatu hubungan. Kriteria komunikasi interpersonal yang terbangun antara Petani dan Penyuluh Pertanian dalam penggunaan Aplikasi I-PUBERS meliputi kriteria; Jumlah Petani yang terlibat dalam proses Komunikasi Interpersonal dengan Penyuluh, Saluran atau Media yang digunakan dalam menyampaikan informasi penebusan pupuk, Umpan Balik antara Penyuluh Pertanian dan Petani, Privasi, Tujuan Komunikasi, Tipe Hubungan yakni antara Penyuluh dan Poktan, dan Pengetahuan tentang alur dan informasi untuk pengajuan pupuk subsidi.

Efektivitas penggunaan teknologi menjadi indikator kemudahan yang diperoleh Petani dan Kios Mitra atau Pengecer dalam menggunakan aplikasi I-PUBERS. Petani JW asal Kecamatan Mandastana menyebutkan jika keberadaan aplikasi I-PUBERS memudahkan dalam penebusan pupuk bersubsidi. Menurutnya pola komunikasi mudah terbangun dengan *simple* karena pemilik Kios Mitra atau Pengecer dapat mendistribusikan pupuk sesuai dengan kebutuhan Petani. Sehingga nilai pupuk yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Fitur yang terdapat dalam aplikasi I-PUBERS memberikan manfaat kepada Petani dan Pemilik Kios Mitra atau Pengecer Pupuk, pasalnya masing-masing dapat menerima kemudahan dalam proses komunikasi yang efektif. Diskusi yang terbangun antara keduanya telah mengevaluasi dan mendapatkan keputusan untuk mengadopsi inovasi I-PUBERS. Karena kebaruan dari inovasi penebusan pupuk bersubsidi, Petani yang mengalami tingkat ketidaktahuan yang tinggi tentang

ketidakpastian tentang penebusan pupuk bersubsidi telah terbantu oleh Penyuluh Pertanian dan Pemilik Mitra Kios atau Pengecer Pupuk.

Perubahan sikap Pemilik Kios dalam memberikan pelayanan kepada Petani sebagai bentuk difusi inovasi dalam mengimplementasikan kegunaan aplikasi penebusan pupuk bersubsidi. Pengurangan ketidakpastian dan pengambilan keputusan ikut berperan dalam proses difusi, terutama karena mereka berdampak pada perubahan perilaku dari sebuah sikap difusi yang pada akhirnya adalah tentang mengadopsi perilaku baru Petani dan Pemilik Mitra Kios atau Pengecer Pupuk di Kabupaten Barito Kuala dalam penggunaan aplikasi I-PUBERS untuk penebusan pupuk bersubsidi.

2. ***Ease of Use Perceived (Persepsi Kemudahan)***

Persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dapat membantu secara keseluruhan. *Perceived of Use* dipengaruhi oleh kemudahan pengguna teknologi dan ketersediaan sumber daya. Berikut adalah indikator untuk mengukur *Perceive Ease Of Use*:

- a. Petani di Kabupaten Barito Kuala dapat menebus pupuk secara individu dengan menunjukkan KTP yang datanya telah terintegrasi pada aplikasi i-Pubers.
- b. Model TAM hasil integrasi aplikasi pengajuan pupuk tersebut. Sehingga ketercapaian penyerapan pupuk sesuai dengan penerima yang sudah mendaftar di aplikasi i-Pubers.
- c. Petani dan pemilik kios menyebutkan bahwa alur komunikasi terbangun dengan baik. Artinya informasi yang disampaikan Pemilik kios terkait alur penebusan atau pengambilan pupuk subsidi dipahami dengan baik oleh Petani. Sehingga petani melakukan alur atau prosedur tersebut.
- d. Penggunaan aplikasi i-Pubers oleh Pemilik Mitra Kios dan Petani di Barito Kuala sebagai model TAM hasil integrasi aplikasi pengajuan pupuk tersebut. Sehingga ketercapaian penyerapan pupuk sesuai dengan penerima yang sudah mendaftar di aplikasi i-Pubers.

Difusi inovasi dalam hubungan antara pemilik kios dan petani di Kabupaten Barito Kuala membentuk komunikasi dua arah yang satu sama lainnya dapat memberikan *feedback* atas pembaruan teknologi melalui sistem yang terorganisir. Pemilik Kios dan Petani saling silang dalam memberikan data informasi sehingga ketercapaian penyerapan pupuk dapat terlaksana dengan baik. Para petani di kabupaten Barito Kuala bisa menerima dan mendukung aplikasi i-Pubers.

Kendala yang terjadi dalam menggunakan i-Pubers yakni apabila terdapat ketidaksesuaian data petani dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala maka peran Penyuluh Pertanian untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Proses diskusi anatar pemangku kebijakan yakni Penyuluh Pertanian dan Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala jika disepadankan dengan

Selain itu, kemudahan penggunaan inovasi i-Pubers sebagai salah satu terobosan yang

memudahkan jika terdapat kebaruan informasi kependudukan.(Hall, 2009) sebagai sebuah upaya untuk saling mengevaluasi atas keputusan dalam mengadopsi suatu inovasi. Oleh karenanya, studi tentang perubahan sikap, pengurangan ketidakpastian, dan pengambilan keputusan Masyarakat pertanian di Barito Kuala sebagai proses difusi, terutama karena mereka berdampak pada perubahan perilaku karena difusi pada akhirnya adalah tentang mengadopsi perilaku baru

Sejalan *Perceived Usefulness* dan *Ease of Use* merupakan acuan dalam proses penerimaan model difusi inovasi aplikasi i-Pubers di Kabupaten Barito Kuala. Masyarakat pertanian yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Pemilik Kios Resmi atau Mitra, dan Petani menjadi sebuah kesatuan atau kelompok yang kemudian mampu mendorong diterimanya aplikasi tersebut.

Kesimpulan

Masyarakat Barito Kuala yang terdiri dari Petani, Penyuluh Pertanian, dan Pemilik Mitra Kios atau Pengecer merupakan rantai yang satu sama lainnya memiliki peran untuk menyukseskan penggunaan I-PUBERS. Kesesuaian Masyarakat terhadap aplikasi I-PUBERS sebagai bentuk penerimaan karena aplikasi tersebut mudah dan berguna dioperasikan dalam menunjang kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala.

Petani dan Pemilik Kios Mitra atau Pengecer Pupuk dapat mengadopsi dan penggunaan teknologi aplikasi I-PUBERS dikarenakan aplikasi tersebut memiliki fitur dan kecanggihan teknologi sehingga mudah digunakan dan memiliki kebermanfaatannya. Selain komunikasi yang terjalin antara Petani dan Pemilik Kios Mitra atau Pengecer Pupuk sangat efektifitas dan efisien dalam penggunaan teknologi aplikasi I-PUBERS.

Saran dan kritik juga disampaikan kepada Penyuluh Pertanian karena keadaan demografis Barito Kuala yang di beberapa daerah yang masih terkendala akses internet. Jadi diperlukan adanya keseimbangan antara *supporting* jaringan internet dalam kegiatan mengadopsi teknologi baru. Sejalan dengan (Alkemade & Castaldi, 2005) yang menyampaikan bahwa *social network* yakni internet menjadi bagian dari difusi inovasi aplikasi I-PUBERS guna mengoptimalkan serapan pupuk bersubsidi.

Daftar Pustaka

- Alkemade, F., & Castaldi, C. (2005). Strategies for the diffusion of innovations on social networks. *Computational Economics*, 25(1–2), 3–23. <https://doi.org/10.1007/s10614-005-6245-1>
- Aplikasi i-Pubers melalui website admin PT Pupuk Indonesia Persero : <https://ipubers.pupuk-indonesia.com/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F>
- Campion, M. A. P. D. K. , & C. J. E. (1997). A Review Of Structure In The Selection Interview. *Personnel Psychologi*, 50(3), 553–746.

- Davis, F. D. (2014). *A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems*. <https://www.researchgate.net/publication/35465050>
- Fahlevi, P., Octaviani, A., & Dewi, P. (N.D.). *Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (Tam)*.
- Fatonah, S., Subhan, /, Jurusan, A., Komunikasi, I., Upn, F., Veteran, ", Yogyakarta, ", & Babarsari, J. (2008). Difusi Inovasi Teknologi Tepat Guna Di Kalangan Wanita Pengusaha Di Desa Kasongan Yogyakarta. In *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 6, Issue 2). [Www.Kasongan-Revival.Com/](http://www.Kasongan-Revival.Com/)
- Fifth Edition Research Design creswell*. (n.d.)
- Hall, B. H. (2009). Innovation and Diffusion. In *The Oxford Handbook of Innovation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.001>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesi tentang kebijakan penggunaan aplikasi Simluhtan : <https://app3.pertanian.go.id/simluh/monpetanikec.php>
- Littlejohn, S., & Foss, K. A. (2009). *COMMUNICATION THEORY ENCYCLOPEDIA OF*.
- Masganti, M., Susilawati, A., & Yuliani, N. (2020). Optimasi Pemanfaatan Lahan untuk Peningkatan Produksi Padi di Kalimantan Selatan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 14(2), 101. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v14n2.2020.101-114>
- milesandhuberman1994*. (n.d.)
- Penggunaan aplikasi i-Pubers dengan peran Penyuluh Pertanian di Kabupaten Barito Kuala : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/11/27/petani-batola-kesulitan-pakai-aplikasi-beli-pupuk-bersubsidi-harus-gunakan-i-pubers>
- Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023, n.d.)
- Septiandika, V., Fitria, N., & Tantri, R. A. (2022). *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara Sistem Pelaporan Pajak Dengan E-Filling Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dengan Prinsip Penerapan Technology Acceptance Model (Tam) Ar Tic Le In For M Ati On Ab Str Ac T* (Vol. 12, Issue 01).
- Wahyu, M. (N.D.). Efektivitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani Kecamatan Tualang). *Cross-Border*, 5(1), 848–861.

MONOKULTURALISME DALAM TAYANGAN WEB SERIES ANIMASI ANAK NUSSA

Muhammad Alzaki Tristi

| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
Email: muhammad.alzaki.t@mail.ugm.ac.id

Rani Attiqah Gusbet

| Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
Email: rani.attiqah.gusbet@mail.ugm.ac.id

Abstrak

The objective of this study is to demonstrate how the concepts of monoculturalism are evident in the Nussa children's web series animations. Utilizing a qualitative approach, the research involved content analysis of five specific episodes from the Nussa Official YouTube channel. The analysis employed a semiotic approach to uncover both explicit and implicit meanings. The study's framework for monoculturalism is based on the concepts outlined in "Golden Truth" from the publication "The Danger of Monoculturalism in the XXI Century" and Indonesia's Broadcasting Law No. 32/2002, particularly Articles (2) and (36). These concepts highlight four key points: (1) The prevalence of a homogeneous society; (2) An inadequate portrayal of tolerance; (3) Insufficient diversity; and (4) A lack of communicative interaction and representation through cultural symbols. The findings reveal that the Nussa animated content does not adequately depict societal and cultural variety in each episode. Additionally, the Nussa production team fails to incorporate dialogues and symbols that reflect Indonesia's rich cultural diversity. In conclusion, it is recommended that future episodes of Nussa's animated web series should incorporate greater diversity.

Keywords: Children's Animated Web Series; monoculturalism; nussa; qualitative content analysis

Pendahuluan

Media yang diakses oleh masyarakat memiliki keterkaitan dengan cara masyarakat memandangnya, termasuk dalam konteks media hiburan. Setiap elemen yang terkait dengan kata "hiburan" sulit untuk tidak dihubungkan dengan aspek "sosial" dan pembentukan nilai-nilai tertentu (Gray, 2008; dalam Irawanto, 2021). Selain mempertimbangkan isi kontennya, media hiburan fiksi memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana orang membentuk dan mengubah pandangan serta pandangan mereka mengenai isu-isu sosial yang kontroversial. Ini telah banyak dianalisis melalui pendekatan teori-teori tentang efek media (Green, 2002).

Penonton yang terpapar pada cerita hiburan cenderung mengartikan isu atau karakter sesuai dengan ide-ide yang tersirat dalam cerita, hal ini sudah dibahas oleh Green (2000); Slater & Long (2006); Strange & Leung (1999); dalam Zhang & Min (2012). Meskipun memiliki pesan ideologis tertentu, media

hiburan juga menyajikan konten informasional yang umumnya mencakup tema, pandangan, dan sudut pandang yang biasa. Fenomena ini memberikan dasar bagi istilah "Informasi bagi mereka yang tidak mencari informasi" dan mendasari pandangan media hiburan sebagai kekuatan ideologis yang kuat dalam masyarakat (Barnouw & Kirkland, 1992).

Kehadiran konten hiburan yang diarahkan kepada anak-anak dalam bentuk web series dengan judul NUSSA, yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2018, memberikan peluang untuk melakukan analisis mendalam terhadap isi kontennya. Hal ini mencerminkan pentingnya melihat apa yang disajikan oleh konten animasi ini. Terbukti, animasi anak ini berhasil memikat perhatian audiens dengan jumlah total tayangan (*views*) mencapai 2.107.211.767 dan total jumlah pelanggan (*subscriber*) sekitar 8,49 juta hingga tanggal 3 Oktober 2021 di saluran YouTube resmi "NUSSA Official". Seperti yang dilaporkan oleh media online Kompas.com, animasi ini semakin populer ketika ditayangkan di stasiun TV swasta NET TV pada bulan Mei 2019, terutama menjelang waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan. Meskipun kemudian pindah ke saluran berbayar untuk beberapa waktu, animasi ini akhirnya kembali ke stasiun TV gratis, Trans TV, pada tahun 2020. Namun, seperti yang diwartakan oleh cnnindonesia.com, pada 1 Januari 2021, animasi Nussa resmi dihentikan penayangannya akibat dampak domino dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Perdebatan tentang jenis tayangan yang sesuai untuk anak-anak menjadi aspek sentral dalam mengamati fenomena ini. Pendekatan yang disampaikan oleh Wicks (2000) mengenai peran media dalam masyarakat kontemporer adalah memberikan akses kepada informasi di luar lingkungan sehari-hari kita. Bahasa sebagai sistem memberikan alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dikenali bersama oleh anggota budaya. Gagasan-gagasan ini dapat mencakup konsep-konsep abstrak seperti demokrasi, multikulturalisme, dan bahkan ateisme (Wicks, 2000).

Banyak riset telah mengamati keterkaitan yang kuat antara tingkat perhatian dan pemahaman, atau harapan pemahaman, terhadap materi yang dikonsumsi oleh anak-anak. Cara anak-anak menilai sejauh mana konten televisi dapat dimengerti memengaruhi berapa banyak perhatian yang mereka berikan pada materi yang dipresentasikan (Lorch, Anderson, & Levin, 1979; Pingree, 1986; dalam Evra, 2004). Mengacu pada pandangan Geiger (1923), ketidakmatangan dalam memahami representasi gambar menghambat kemampuan imajinatif atau spontan dalam berkreasi. Isi yang mencurigakan secara moral dalam banyak film dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh emosional dan penanaman pesan-pesan yang antisosial dan amoral (Luke, 1990). Tentu saja, hal ini dapat lebih lanjut dianalisis dalam konteks teori efek media.

Kehadiran web series animasi anak Nussa memiliki peran yang signifikan dalam menggambarkan dunia yang ingin disajikan dalam setiap episode. Sebagai contoh, hasil penelitian Luviani & Delliana (2020) mengindikasikan bahwa tayangan web series ini mempengaruhi anak-anak usia 4-5 tahun untuk meniru perilaku yang ditampilkan dalam tayangan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa episode "Cuci Tangan Yuk" dari Nussa Official di YouTube memiliki dampak 18,2% terhadap perilaku imitasi anak usia 4-

5 tahun di Bekasi Utara (Luviani & Delliana, 2020).

Berdasarkan hubungan antara isi konten animasi Nussa dan upaya untuk merangkai narasi monokulturalisme, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain: bagaimana animasi web series anak Nussa mempengaruhi pemahaman anak tentang multikulturalisme? Bagaimana pola interaksi, dialog, dan penggambaran karakter dalam animasi web series anak Nussa membentuk kesan monokulturalisme? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dari monokulturalisme yang tersirat dalam konten animasi web series anak Nussa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong pemikiran kritis dari para orang tua sebagai penonton untuk lebih mendalam memahami setiap tayangan yang ditonton oleh anak-anak.

Kerangka Pemikiran

a. Anak-anak dan Tontonannya

Stasiun televisi dan industri film terus menghasilkan representasi ulang tentang realitas yang mempengaruhi persepsi kita, dengan mengontrol gambaran yang kita terima (Littlefield, 2008; seperti yang dijelaskan dalam Wormer & Juby, 2015). Saat anak-anak tumbuh dan semakin terampil dalam hal pengetahuan serta pengalaman televisi atau teknologi seperti gadget, aspek kognitif dalam program-program menjadi semakin penting. Mereka cenderung menggunakan kemampuan konseptual yang lebih tinggi untuk membimbing perhatian dan tanggapan mereka terhadap isi konten (Evra, 2004).

Wormer & Juby (2015) menekankan bahwa analisis konten dapat mengungkap pesan tersembunyi yang ada dalam film-film Disney yang populer, yang tak boleh diabaikan. Bagi anak-anak, peristiwa sinematik dan tampilan layar mampu menciptakan kesan yang mendalam karena mereka tidak hanya mengingat informasi tetapi juga menyerapnya seperti spons; batas yang memisahkan antara realitas dan fantasi sering kali kabur bagi mereka (Buijzen & Valkenburg, 2005; dalam Wormer & Juby, 2015).

Lee & Choi (2018) juga memberikan interpretasi mendalam terhadap pesan yang tersirat dalam serial animasi anak Korea Selatan "Pororo si Pinguin Kecil". Penelitian ini menemukan bahwa animasi Pororo mencerminkan struktur patriarki dalam budaya Konfusianisme dan dinamika gender dalam keluarga, dengan mengatur karakter anak-anak dan dewasa dalam kerangka keluarga tradisional Korea yang patriarkis (Lee & Choi, 2018). Lebih lanjut, Lee & Choi (2018) menjelaskan perlunya perhatian dari industri media dan kebijakan pendidikan terhadap dampak besar tontonan animasi terhadap anak-anak, terutama terkait dengan pembentukan identitas dan pembelajaran norma-norma sosial.

Penelitian khusus yang dilakukan oleh Alsaraireh & Hajimia (2020) menemukan adanya representasi gender yang mencerminkan karakter perempuan Anna dan Elsa dalam film animasi Frozen sebagai individu yang rapuh, tidak memiliki daya, dan kurang ajar. Ini berdiri dalam kontras dengan karakter pria Kristoff yang digambarkan sebagai pahlawan (Alsaraireh & Hajimia, 2020). Demikian pula,

penelitian yang mengeksplorasi ideologi nasionalisme dalam tayangan animasi anak telah dijalankan oleh Seman, Noordin, dan Razak (2018) pada serial Upin & Ipin. Hasil menarik dari penelitian ini mengindikasikan bahwa episode tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.

Namun, keempat studi yang dilakukan oleh Wormer & Juby (2015), Lee & Choi (2018), Alsaraireh & Hajimia (2020), dan Seman, *et al* (2018) belum secara spesifik menyelidiki aspek keragaman budaya. Kajian-kajian tersebut belum merambah ke dalam pemahaman mendalam mengenai kebutuhan akan variasi konten yang cocok untuk tayangan anak-anak serta elemen-elemen budaya yang tersembunyi di balik konten tersebut. Karena itu, penelitian ini berusaha untuk memperluas perspektif dengan mengenalkan sudut pandang monokulturalisme melalui pendekatan analisis isi.

b. Monokulturalisme dan Representasi Budaya

Masyarakat yang menganut monokulturalisme menyatakan bahwa budaya mereka adalah satu-satunya budaya yang benar dan dapat diterima. Selain itu, mereka mungkin mengakui keberadaan orang-orang dari agama, etnis, dan budaya lain, namun budaya-budara tersebut dianggap tidak sesuai dalam kerangka budaya nasional (Adelaja, 2017). Beberapa penelitian telah membahas tema monokulturalisme dalam konteks diskusi dan isi teks yang ditujukan untuk anak-anak. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sun & Kwon (2019) mengenai Representasi Monokulturalisme dalam Buku Teks Bahasa Warisan Cina dan Korea untuk Anak-anak Imigran, ditemukan bahwa walaupun budaya-budaya dibandingkan dan dijelaskan dalam posisi yang berbeda, setiap budaya dianggap seragam.

Dalam analisis terhadap dua seri buku teks, pengenalan terhadap keragaman budaya terutama terbatas pada representasi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tertentu. Hampir semua ilustrasi dan foto menampilkan karakter dengan kulit putih, dan setiap negara hanya dikaitkan dengan karakteristik yang terpilih. Cara penyajian ini memberikan peluang yang terbatas bagi siswa untuk mengenali keragaman dalam demografi serta untuk mengembangkan pemahaman mengenai dunia yang multibahasa dan multikultural (Jo & Kwon, 2019; Xiong & Yuan, 2018; dalam Sun & Kwon, 2019).

Penelitian analisis teks yang dilakukan oleh Hofmann (2018) menyatakan bahwa film pendek animasi memiliki potensi untuk digunakan dalam pengajaran karena visual yang sangat ekspresif mendorong siswa untuk aktif menggunakan bahasa asing. Selain itu, penemuan lainnya mengungkapkan bahwa masih banyak film budaya populer yang belum dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran, meskipun film animasi telah memainkan peran penting dalam pendidikan dan sosialisasi anak-anak dan remaja (Roller, 2006; seperti yang dijelaskan dalam Hofmann 2018).

Lebih lanjut, dalam penelitian yang difokuskan pada representasi gender dalam film animasi layar lebar dari Pixar Animation Studio, Decker (2010) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara peran laki-laki dan perempuan dalam sebagian besar film Pixar, termasuk Toy Story, A Bug's Life, Toy Story 2, Monster's Inc, Finding Nemo, The Incredibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, dan Up.

Namun, penelitian ini mengindikasikan kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif audiens.

Meskipun demikian, studi yang dilakukan oleh Sun & Kwon (2019), Hofmann (2018), dan Decker (2010) telah menganalisis peran teks dan bahasa dalam film animasi anak serta representasi yang dihadirkan. Ketiga penelitian ini memiliki perbedaan dalam konten yang dianalisis dan metode analisis yang digunakan.

c. Teori Identitas Budaya

Penelitian ini menerapkan Cultural Identity Theory (Teori Identitas Budaya) sebagai kerangka kerja untuk menganalisis cara budaya dikonstruksi dalam konten web series animasi anak Nussa. Pendekatan teori ini berkaitan dengan pemahaman tentang siapa yang bertanggung jawab dalam membentuk identitas kelompok budaya dan bagaimana identitas tersebut diutarakan (Littlejohn, 2017). Teori ini juga memiliki potensi untuk memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana identitas budaya tertentu dibangun, diekspresikan, dan dibentuk, serta memberikan ruang bagi peninjauan kritis terhadapnya.

Metode Penelitian

a. Analisis Konten Kualitatif

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode analisis isi kualitatif yang bersifat deduktif/terarah (directed content analysis). Pendekatan penelitian ini lebih menekankan pada aspek kualitatif dan diuraikan dengan pendekatan deskriptif. Pilihan untuk menggunakan directed content analysis bertujuan untuk memvalidasi atau memperluas kerangka teori yang telah ada guna mengarahkan pertanyaan penelitian (Hsieh & Shannon, 2005). Dalam metode ini, peneliti memulai dengan mengidentifikasi konsep atau variabel utama sebagai kategori awal untuk pengkodean, yang kemudian didefinisikan secara operasional dengan merujuk pada teori yang relevan (Potter & Levine-Donnerstein, 1999, dalam Hsieh & Shannon, 2005).

Penelitian ini dimulai dengan melakukan telaah pustaka yang kemudian diikuti dengan analisis sumber data utama, yaitu lima episode konten dari web series animasi anak Nussa yang terdapat di saluran resmi Nussa Official di YouTube (<https://www.youtube.com/c/NussaOfficialSeries>). Tinjauan literatur dilakukan untuk menyelidiki segala aspek terkait informasi mengenai web series Nussa dan untuk mengumpulkan analisis terkait konsep monokulturalisme yang muncul dalam tayangan hiburan, yang akan diuraikan secara mendalam dalam kajian konseptual.

Sejumlah lima episode dipilih berdasarkan isi kontennya yang melibatkan dialog dan penampilan karakter-karakter lain selain tokoh utama (Nussa dan Rarra), di mana dialog-dialog tersebut akan dikelompokkan berdasarkan konsep yang berhubungan dengan monokulturalisme. Episode-

episode yang dipilih memiliki judul sebagai berikut: 1. "Senyum Itu Sedekah"; 2. "Belum Mahram"; 3. "Merdeka"; 4. "Tetanggaku Hebat"; dan 5. "Toleransi".

Dalam proses analisis kelima episode ini, peneliti tidak melakukan analisis keseluruhan durasi setiap episode, namun dilakukan pembagian menjadi dua bagian yaitu analisis dialog (teks subtitle) dan analisis visual berdasarkan tangkapan layar yang menggambarkan interaksi antara tokoh utama dan tokoh pendukung. Saat melakukan analisis, gambar diam (still image) yang relevan diambil menggunakan perangkat lunak Snipping Tools. Informasi tentang jumlah tayangan, suka, tidak suka, dan keterangan tidak signifikan mempengaruhi analisis, melainkan hanya menjadi metadata dan data pendukung mengenai jumlah penonton yang telah menonton tayangan.

Untuk menginterpretasikan konten monokulturalisme dalam kelima episode yang dipilih dari web series animasi anak Nussa, peneliti menerapkan prinsip analisis semiotika berdasarkan model Roland Barthes secara simpel. Analisis semiotika ini melibatkan dua tingkat makna, yaitu tingkat pertama yang melibatkan identifikasi tanda dan interpretasi makna denotatif, serta tingkat kedua yang menggali makna konotatif atau interpretasi lebih mendalam dari tanda (Shah, Riaz, & Aqeel, 2020). Hasil analisis gambar tangkapan layar dan dialog disajikan dalam bentuk tabel dengan mencantumkan judul setiap episode, waktu penayangan, dan penjabaran makna denotatif serta konotatif yang terkait.

b. Kajian Konseptual

Beberapa sumber literatur menggambarkan monokulturalisme sebagai sesuatu yang memiliki dampak negatif. Menurut Michaels (2011), monokultur dianggap sebagai pandangan tunggal yang menjadi dasar yang kuat sebagai satu-satunya pandangan dunia yang masuk akal, sehingga meredam pengakuan terhadap berbagai sudut pandang lainnya dan gagal untuk melihat monokultur dalam konteks keseluruhan, apalagi mempertanyakan hal tersebut. Nilai-nilai mendasar monokulturalisme tercermin dalam perlakuan yang tidak adil terhadap perbedaan dan variasi, dengan upaya untuk membentuk keragaman budaya dan biologis berdasarkan preferensi dari satu kelas, satu ras, dan satu jenis kelamin dari satu spesies saja (Shiva, 1993).

Monokulturalisme, sesuai dengan pandangan Adelaja (2017) dalam *The Danger of Monoculturalism in The XXI Century*, dipandang sebagai hal yang sangat berisiko. Dengan tegas, Adelaja menggarisbawahi bahwa praktik monokulturalisme telah mengakibatkan tragedi genosida, seperti yang terjadi pada Armenia yang diserang oleh Turki pada tahun 1915.

"The unwillingness to accept and tolerate the Armenians led to a real genocide which claimed the lives of 1-1.5 million Armenians. What a terrible destruction, the death of innocent people, simply because of the desire to create a monocultural society! We observed that the desire to maintain a monocultural society inevitably led to the segregation of those that differ. Ultimately the growing hatred resulted in the massacre of minority groups. This is exemplified in the Armenian genocide (Adelaja, 2017)."

Konsep monokulturalisme yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Kebenaran Emas

(*Golden Truth*) pada sub-bab “*How We Treat Those Who Are Different from Us*” di dalam bukunya Adelaja (2017) dengan penyesuaian khusus pada tayangan anak-anak. Poin-poin Kebenaran Emas yang dimaksud antara lain:

1. Masyarakat monoton di mana hanya ada satu kelompok tertentu yang ditemukan atau menikmati hak-hak sipil dasar disebut masyarakat monokultural.
2. Sebuah tanda yang sangat penting dari peradaban masyarakat modern adalah toleransi terhadap mereka yang berbeda.
3. Intoleransi menghasilkan keinginan untuk memisahkan orang-orang yang tampak berbeda dari masyarakat.
4. Seseorang yang tumbuh dalam masyarakat monokultural mungkin memiliki keinginan yang mendalam untuk menciptakan lingkungan yang homogen, dapat diprediksi, dan asli.
5. Upaya untuk menciptakan masyarakat monokultural diakui oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan
6. Kebencian terhadap orang yang berbeda menggantikan logika dan fakta serta kebenaran yang jelas.
7. Intoleransi dalam masyarakat monokultural merupakan tempat berkembangnya kebencian dan diskriminasi. (Adelaja, 2017).

Peneliti juga menambahkan rujukan pada UU Penyiaran no 32/2002: Pasal (2) berisi: Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Serta Pasal (36) tentang isi siaran, antara lain: Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional (Muntadliroh, 2018).

Setelah dilakukannya penyesuaian pada poin-poin Kebenaran Emas (*Golden Truth*) dan UU Penyiaran No 32/2002 Pasal (2) dan (36), peneliti menempatkan rujukan nilai-nilai monokulturalisme dalam kategori empat poin:

1. Hanya ditemukan masyarakat monoton atau satu kelompok tertentu saja di dalam tayangan, dan minimnya penggambaran tokoh dengan latar belakang budaya lain.
2. Minimnya penggambaran toleransi terhadap mereka yang berbeda, yang terlihat dalam konflik cerita dan interaksi (dialog).
3. Sedikitnya keberagaman yang ditunjukkan dari pengenalan cerita tokoh pendukung dan penggambaran visual tokoh seperti pakaian atau atribut yang menunjukkan ciri khas budaya


lain.

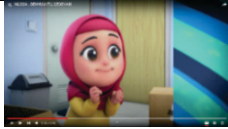

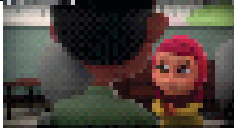
4. Kurangnya atau bahkan tidak terdapat interaksi dengan tokoh pendukung lainnya dengan latar belakang suku, agama, dan ras berbeda.

Empat aspek monokulturalisme yang terdapat dalam tayangan animasi anak-anak ini digunakan sebagai dasar konsep yang akan dijadikan kategori analisis dalam mengevaluasi isi konten dalam web series animasi anak Nussa. Keempat elemen ini dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kritik terhadap pandangan yang cenderung searah, sebagaimana yang disoroti oleh Shiva (1993) dalam konsep "*Monocultures of the Mind*".

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Analisis Isi Konten Episode "Senyum Itu Sedekah"

No	Judul Episode	Tangkapan Layar	Menit	Denotatif	Konotatif
1	Senyum itu Sedekah		00:05	Anak laki-laki berkopiah putih, memakai baju gamis berwarna hijau, celana panjang coklat, kaki kiri menggunakan kaki prostetik.	Tokoh Nussa dihadirkan sebagai perwujudan seorang anak laki-laki muslim yang taat. Ini diperkuat oleh kemampuan tokoh dalam memahami dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam, seperti yang terlihat dalam keterampilannya dalam merujuk hadis dan berdoa dalam lingkungan animasi. Penampilannya yang mengenakan gamis hijau dan kopiah dalam setiap adegan menandakan identitas anak yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan sentuhan gaya Timur Tengah. Penggunaan gamis, yang merupakan pakaian sehari-hari umum di kalangan masyarakat Arab,


				memberikan tambahan aspek ini (Laveda, 2021). Meskipun begitu, Nussa dijelaskan sebagai seorang anak dengan disabilitas yang tetap bersemangat dan ceria dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2		0:46	Anak perempuan yang menggunakan hijab berwarna merah muda, serta gamis panjang berwarna kuning.	Karakter Rarra dihadirkan sebagai perwujudan seorang anak perempuan yang riang, ekspresif, dan masih memperlihatkan perilaku yang baik, dengan memakai pakaian yang menutup
3		1:17	Bangunan berwarna krem, terdapat plang berwarna hijau bertuliskan "Panti Asuhan Al-Ikhlas" dengan tanaman hijau di samping kanan, kiri, dan depan.	Panti asuhan ini, yang secara eksplisit dikelola dan ditujukan bagi umat Muslim, terlihat jelas dari namanya, yaitu "Al-Ikhlas". Gedung ini diproyeksikan sebagai struktur yang memberi kesan hangat dan nyaman, dengan elemen islami yang mendominasi, seperti penekanan pada tanaman dan pilihan warna hijau yang terlihat pada plang namanya.
4		1:50	Anak perempuan berjilbab merah jambu menunjukkan gerakan bersalaman <i>namaste</i> dengan seorang anak laki-laki berbaju hijau dan dua orang anak	Dalam adegan ini, kita melihat bagaimana Rarra berinteraksi dengan anak-anak di panti asuhan Al-Ikhlas tanpa ada percakapan. Meskipun tidak ada

				<p>perempuan berkerudung abu abu dengan posisi memunggungi penonton.</p>	<p>dialog, terlihat bahwa Rarra tidak berjabat tangan dengan anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh ajaran Islam yang melarang kontak fisik dengan orang yang bukan mahram, meskipun menurut hukum Islam, anak-anak seumuran Rarra belum memiliki tanggung jawab dosa. Anak-anak dari panti asuhan, sebagai karakter pendukung, dengan sengaja tidak menunjukkan wajah mereka dalam adegan ini.</p>
--	--	--	--	--	--

(sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=XHfTYWKfoZw&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=73>)

Tabel 2. Analisis Isi Konten Episode “Bukan Mahram”




No	Judul Episode	Tangkapan Layar	Menit	Denotatif	Konotatif
1	BUKAN MAHRAM		0:29	Perempuan berkerudung biru, memakai baju kurung (gamis) berwarna ungu dengan raut wajah tenang.	Umma berperan sebagai karakter pendukung, merupakan ibu dari Nussa dan Rarra. Ia menggambarkan sosok seorang ibu yang taat beragama dan mendidik dengan prinsip-prinsip Islami. Bukti terlihat dalam penggunaan panggilan "Umma", pemberian nama kucing "Anta", dan dialog-dialog yang mencakup istilah-istilah berbahasa Arab. Selain itu, Umma selalu menekankan pada pendidikan yang berbasis agama kepada anak-anaknya, mendorong

					mereka untuk tunduk pada aturan-aturan agama Islam.
2			0:32	Perempuan berhijab coklat, dengan raut wajah ekspresif dan ceria.	Tante Dewi berperan sebagai karakter pendukung yang juga merupakan adik dari Umma, ia memiliki penampilan sebagai seorang Muslimah dengan mengenakan hijab berwarna coklat. Tante Dewi diilustrasikan sebagai seorang guru PNS yang sudah lama tidak bertemu dengan Nussa dan Rarra.
3			1:54	Anak laki-laki berkopiah putih dengan tas memakai gamis hijau bersalaman dengan perempuan dengan gerakan <i>namaste</i> (tidak bersentuhan).	Nussa dalam <i>scenes</i> ini kembali menolak untuk bersalaman dengan tante Dewi dengan alasan bukan <i>mahram</i> .
4			3:13	Anak laki-laki berkopiah dengan raut wajah curiga dengan alis yang turun sebelah. Tertulis dialog yang ditayangkan dalam subjudul bertuliskan "Nussa: Salam? Kan bukan muhrim..."	Nussa bersikeras kepada Rarra membela dirinya karena tidak bersalaman dengan tante Dewi yang tidak ia kenal, dengan alasan keyakinannya karena bukan muhrim.

(Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=tPrXexNi18A&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=54>)




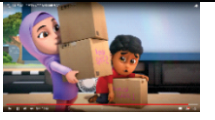
Tabel 3: Analisis Isi Konten Episode “MERDEKA!!!”

No	Judul Episode	Tangkapan Layar	Menit	Denotatif	Konotatif
1	MERDEKA!!!		0:09	Logo berbentuk huruf “n” bercorak merah putih seperti bendera Indonesia dengan siluet anak laki-laki melambaikan tangan.	Logo pembuka Nussa pada episode ini ditujukan sebagai episode khusus hari kemerdekaan Indonesia. Penyesuaian logo ini menjadi bukti kuat bahwa <i>web series</i> animasi Nussa mencoba menjadi tontonan yang representatif bagi seluruh anak di Indonesia.
2			0:32	Dua orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan berhijab sedang menghias sepeda berwarna merah muda. Anak laki-laki sebelah kiri menggunakan pakaian berwarna merah dengan perawakan rambut keriting dengan kulit gelap.	Abdul, menjadi tokoh pendukung sebagai teman bermain Nussa dan Rarra di kompleks perumahannya. Abdul merupakan seorang anak muslim yang bersahabat dekat dengan Nussa. Penggambaran tokoh Abdul juga mengikuti gaya keislaman, dengan pakaian celana panjang hingga lutut dan baju yang menutupi pinggul, sedikit lebih pendek dibanding baju gamis Nussa.
3			1:12	Seorang anak laki-laki menatap dengan mata lebar kepada seseorang, sembari bergumam dalam hati dengan dialog “Abdul: Wah sepedaku harus lebih keren dari punya Rarra, pokoknya harus menang”	Abdul dalam episode ini digambarkan sebagai sosok yang kompetitif dan tidak ingin kalah dengan Rarra. Abdul ingin memenangkan lomba menghias sepeda yang diadakan dalam memperingat acara 17 Agustusan.

4			2:35	Seorang anak laki-laki dengan raut wajah sinis sembari berdialog “Abdul: Susah nih bikinnya, nanti bisa kalah deh lombanya”	Abdul direpresentasikan dalam <i>scenes</i> ini sebagai sosok yang egois dan tidak ingin berbagi. Ia bangga dengan sepeda yang dimilikinya tanpa merasa bersalah untuk tidak meminjamkannya pada temannya.
5			2:54	Dua orang anak sedang berbincang dengan dialog “Rarra: Kok kak Abdul jadi ego-egois”	Nussa dan Rarra menyadari bahwa Abdul dalam <i>scenes</i> ini menunjukkan sikap egois dan tidak ingin kalah. Dalam hal ini Nussa merespon dengan sikap tenang tanpa marah sedikitpun.
6			3:31	Kaki anak laki-laki yang tersandung dengan latar belakang penonton anak laki-laki dengan pakaian gamis berwarna biru dan celana panjang. Selain itu terdapat penonton laki-laki dewasa dengan celana kulot.	<i>Scenes</i> ini menggambarkan suasana meriahnya 17 agustusan dengan berbagai lomba. Adegan kaki Abdul tersandung dengan latar belakang penonton seolah memberikan gambaran bahwa anak-anak lainnya juga memiliki gaya berpakaian yang sama seperti Nussa.

(Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=bmH0XkSbhAI&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTNOHfM&index=47>)




Tabel 4. Analisis Isi Konten Episode “Tetanggaku Hebat”


No	Judul Episode	Tangkapan Layar	Menit	Denotatif	Konotatif
1	TETANGG AKU HEBAT		1:11	Dua anak laki-laki sedang melihat seorang anak perempuan sedang memungut sampah sembari berdialog “Abdul: Ehemmm, kan udah ada yang bersihin juga...”	Kemunculan tokoh pendukung lainnya, yang memiliki karakter baik dan rajin, dibuktikan dengan tindakannya yang menolong tokoh-tokoh lainnya.
2		 	2:32 4:22	Seorang anak perempuan berpakaian Muslimah dengan menggunakan hijab berwarna ungu dengan dialog “Syifa: Tetangga yang baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya.”	Tokoh pendukung perempuan bernama Syifa pertama kali muncul dalam serial <i>web series</i> Nussa pada episode ini. Syifa menjadi sosok perempuan cerdas yang ditunjukkan dengan penguasaan ilmu agama yang baik dengan penggambaran tokoh yang hafal <i>hadist</i> . Karakter Syifa digambarkan sebagai sosok perempuan berdaya.
3			5:44	Seorang anak laki-laki terlihat takjub dengan seorang anak perempuan yang mengangkat beban dua kali lebih banyak dibanding dirinya.	Syifa digambarkan sebagai sosok perempuan kuat dan tangguh, ditunjukkan dengan <i>scenes</i> ketika mampu mengangkat beban dua kali lebih banyak dibanding Abdul.

(Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=wTQKB5pEJo&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=32>)

Tabel 5. Analisis Isi Konten Episode “Toleransi”

No	Judul Episode	Tangkapan Layar	Menit	Denotatif	Konotatif
1	TOLERAN SI		1:07	Seorang kurir kesulitan mengangkut paket dan dua orang anak membantu mengangkutnya ke atas motor.	Nussa dan Rara menunjukkan sikap tolong-menolong dalam episode ini. Seorang kurir dengan latar belakang suku yang berbeda. Hal ini terlihat dari warna kulit dan logat berbicara yang khas dari Indonesia bagian timur.
2			1:49 1:51	Seorang kurir berbincang dengan dua orang anak dengan dialog “Pak kurir: Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati ya.” dan <i>scenes</i> kedua menunjukkan kurir bersalaman dengan gaya <i>namaste</i> dengan anak perempuan yang membantunya dengan dialog “Pak kurir: sekali lagi terima kasih ya adek-adek.”	Kurir direpresentasikan sebagai sosok yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata dalam dialog seperti “Puji Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati”, meskipun tidak ada dialog yang banyak dan adegan yang beragam.
3			2:18	Seorang Ibu sedang menelepon seseorang di rumah dengan latar belakang kaligrafi arab. Dialog yang muncul pada <i>scenes</i> ini adalah “Umma: salam Ling dan Aloy”.	Umma sedang berbicara dengan seorang temannya yang berlatar belakang agama dan ras berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh penamaan lawan bicaranya seperti “Nci May May, Ling Ling, dan Aloy”, meskipun penggambarannya hanya melalui suara dan dialog, tidak dengan penggambaran visual.

4			<p>3:55 4:05</p>	<p>Anak perempuan dengan raut wajah sedih menyodorkan tas sekolah ungu dengan dialog “Rarra: tas ini boleh dikasih ke Ling Ling kan?” dan “Rarra: iya Umma, sekarang pasti Ling Ling ngga punya tas buat sekolah.”</p>	<p>Rarra dengan rasa iba menyodorkan tas sekolahnya untuk diberikan kepada Ling Ling yang pada episode ini menjadi korban kebakaran rumah. Rarra direpresentasikan sebagai sosok yang baik hati meskipun ia tidak mengenal Ling Ling secara fisik.</p>
---	--	---	----------------------	--	--

(Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=ve11nzHYmDM&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdY TNOHfM&index=21>)

Episode “Senyum Itu Sedekah” dipublikasikan pada tanggal 14 Desember 2018, dengan perolehan penonton sebanyak 12.858.233 *views*, dan 198 ribu *Likes*, dengan teks *caption* “Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nussa lagi sedekah senyum di panti asuhan nih. Berbagi kepada sesama manusia itu adalah salah satu cara untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yuk kita mulai bersedekah dari hal-hal yang kecil seperti tersenyum. Selamat menyaksikan episode baru Nussa ya :)#nussabisa #nussauntukindonesia”.

Dalam episode ini, Nussa dan Rarra belajar tentang memberikan bantuan kepada panti asuhan Al-Ikhlas. Selain memberikan barang-barang bekas yang tidak terpakai, Rarra juga menginisiasi memberikan senyuman sebagai bentuk sedekah, yang kemudian diikuti oleh Nussa. Melihat dari empat aspek monokulturalisme yang menjadi acuan, episode ini menampilkan poin pertama dan ketiga, di mana tokoh pendukung hanya digambarkan dalam lingkungan umat Islam tanpa menampilkan ciri-ciri seperti wajah, pakaian, atau logat yang merepresentasikan beragam ras, agama, dan latar belakang.

Situasi ini bisa dianggap sebagai kritik, di mana anak-anak yang tidak memiliki pengalaman yang beragam dalam hal ras mungkin lebih mungkin untuk menggunakan gambaran yang diberikan oleh media dalam membentuk dan menguatkan skema kognitif mereka tentang peran serta karakteristik anggota kelompok minoritas dan mayoritas (Greenberg, 1972; dalam Li-Vollmer, 2002). Secara lebih khusus, penggunaan tagar #nussauntukindonesia dalam keterangan menunjukkan bahwa tujuan tayangan ini adalah untuk anak-anak Indonesia secara umum, dan ini semakin meningkatkan ketidakrepresentatifannya.

Episode “Bukan Mahram” dirilis pada tanggal 3 Mei 2019 dengan total *views* sebanyak 22.690.815, serta *likes* sebanyak 269 ribu. Di dalam Episode ini, keluarga Umma didatangi oleh adiknya bernama tante Dewi. Cerita di episode ini menekankan pada sikap Nussa sebagai anak laki-laki yang menolak untuk bersalaman dengan perempuan yang dianggapnya asing, dan memiliki keyakinan bahwa perempuan tersebut “bukan mahram”. Namun pada akhirnya Umma memberi tahu bahwa perempuan

tersebut adalah adik kandungnya, yang merupakan tante dari Nussa dan Rarra.

Berdasarkan pada keempat poin yang merujuk pada monokulturalisme, episode ini memperlihatkan ciri dari poin ketiga, yang mengindikasikan kurangnya penggambaran yang inklusif terhadap karakter pendukung dan kurangnya visual yang mencerminkan atribut budaya yang beragam. Ini terlihat dari absennya representasi perempuan tanpa penggunaan hijab. Hal ini juga diperhatikan oleh Dill-Shackleford (2016), yang mengemukakan bahwa kemampuan penonton untuk memahami dan menangani representasi media tentang ras dan gender dapat memiliki dampak penting pada perkembangan masyarakat di masa depan.

Episode “MERDEKA!!!” dirilis pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan perolehan *views* sebanyak 21.842.126 kali tonton dengan jumlah *likes* sebesar 201 ribu. Episode ini menghadirkan tokoh pendukung lainnya, bernama Abdul, sahabat Nussa yang berwatak ceria namun dibalut dengan sifat kompetitif yang tinggi. Fokus cerita pada episode ini menunjukkan bagaimana sifat egois Abdul runtuh setelah Nussa menunjukkan sifat kesetia kawanannya, dan Abdul mengubah sikap egoisnya tersebut.

Walaupun tokoh Abdul menambahkan variasi karakter, namun penampilannya tidak sepenuhnya mencerminkan representasi dari beragam budaya yang ada di Indonesia. Ini tidak terlihat dalam cara dia berbicara ataupun dalam pakaian yang dikenakannya. Oleh karena itu, dalam episode ini, terdapat aspek ketiga yang merujuk pada poin monokulturalisme, karena pakaian yang dikenakan oleh Abdul masih serupa dengan yang dikenakan oleh Nussa, tanpa mencerminkan simbol-simbol dari beragam budaya lain. Hal ini berpotensi meningkatkan kemunculan stereotip, sesuai dengan argumen yang diungkapkan oleh Perse (2008), bahwa media massa sering kali menampilkan representasi stereotip kelompok sosial.

Episode “Tetanggaku Hebat” dirilis pada tanggal 22 November 2019, dengan perolehan *views* sebesar 12.298.824 kali tonton, *likes* sebanyak 117 ribu, dengan *caption*: “*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syifa bilang tetangga yang paling baik disisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya*”.

Pusat perhatian dalam episode ini adalah tentang kedatangan tokoh Syifa sebagai tambahan karakter pendukung dalam animasi Nussa. Tim produksi berupaya merepresentasikan Syifa sebagai anak perempuan yang pintar, baik hati, kuat, dan aktif. Meskipun demikian, penggambaran Syifa tetap dalam kelompok yang sama, yaitu sebagai seorang anak perempuan muslim yang mengenakan hijab, tanpa mencerminkan ciri khas dari latar belakang budaya yang beragam. Ini masih mengandung unsur poin pertama dan ketiga. Situasi ini mungkin dijelaskan sebagai pembatasan dalam mencakup keragaman, yaitu ketika ada batasan sadar atau tidak sadar yang bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang ada tentang ciri-ciri, budaya, nilai-nilai, keyakinan, sudut pandang, termasuk pandangan dunia, preferensi, dan perilaku orang-orang yang dianggap berbeda dari kita (Schumann, 2003).

Episode “Toleransi” dirilis pada 31 Januari 2021 dengan jumlah *views* sebanyak 6.473.873 kali

tonton dengan perolehan *likes* sebanyak 73 ribu. Fokus cerita pada episode ini menekankan bagaimana Nussa dan Rarra membantu orang-orang dengan latar belakang berbeda ketika menimpa keadaan sulit. Penggambaran tokoh kurir yang berlatar belakang suku dan agama berbeda ditunjukkan dengan dialog serta perawakan visual. Meskipun demikian, tokoh kurir tidak memiliki dialog yang banyak untuk dapat merepresentasikan latar belakangnya, dan keluarga Nci May May yang mengalami musibah tidak ditunjukkan dalam bentuk visual karakter, hanya dengan dialog via telepon bersama karakter Ibu Nussa, Umma. Hal ini seolah memberikan jarak kepada Nussa, Rarra, dan penonton untuk mengenal lebih jauh tentang karakter yang memiliki perbedaan budaya dan agama. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Evra (2004) bahwa anak kecil mengalami kesulitan membedakan konten televisi dari pengalaman dunia nyata dan mungkin terlalu menggeneralisasi.

Berdasarkan pada bagaimana langkah-langkah awal dan proses tayangan dapat membentuk stereotip dalam pikiran anak-anak, langkah pertama adalah ketika mereka menghubungkan realitas yang sama dengan semua yang mereka saksikan. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk bersifat egosentris dan menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga mereka juga berlaku secara lebih umum di keluarga lain, baik dalam kehidupan nyata maupun di televisi (Evra, 2004). Dalam kerangka keempat poin yang mengacu pada monokulturalisme, episode ini mengandung unsur poin ketiga.

Setelah melihat secara rinci dari kelima konten episode web series animasi anak Nussa yang dianalisis, tergambar penggambaran sederhana kehidupan anak-anak muslim beserta keluarga mereka, dengan karakter-karakter yang memiliki latar belakang seragam. Tidak terlihat kerumitan dalam interaksi antara tokoh utama dan tokoh-tokoh pendukung lainnya yang berasal dari budaya berbeda. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan bukti adanya multikulturalisme dalam konten web series animasi anak Nussa, baik secara eksplisit maupun implisit. Sehingga jika dianalisis lebih lanjut, setiap episode tampak menunjukkan ciri monokulturalisme dalam representasinya.

Kesimpulan

Setelah menganalisis lima episode web series animasi anak Nussa, tampaknya tim produksi memiliki sikap yang tidak seimbang dalam menggambarkan keragaman sosial dalam dunia anak-anak. Hal ini memperkuat argumen bahwa media memiliki peran kunci dalam membentuk cara individu memandang identitas (Miles, 2000; dalam Hill, 2011). Tim produksi Nussa tidak hanya tidak memasukkan dialog atau simbol-simbol yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga seolah-olah membangun dominasi Islam yang kuat dalam pandangan anak-anak yang menontonnya. Ketika memeriksa monokulturalisme dari perspektif multikulturalisme kritis, tugas orang tua adalah mendorong representasi beragam identitas sosial selama tahap perkembangan penting anak-anak (Hurtado & Silva, 2008).

Walaupun beberapa judul episode tampak memiliki potensi untuk memperkenalkan budaya yang berbeda melalui dialog dan karakter tambahan, web series animasi anak Nussa tetap tidak mampu menggambarkan keragaman yang diharapkan dalam tayangan anak-anak yang ideal. Walaupun demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak yang nyata dari lima episode yang diteliti terhadap penonton, baik anak-anak maupun orang tua. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan, dengan fokus pada perspektif audiens untuk lebih memahami interpretasi yang lebih dalam dan komprehensif. Harapannya, penelitian mendatang akan mampu menganalisis secara lebih kritis dan mendalam terkait wacana dan dominasi Islam yang eksklusif.

Daftar Pustaka

- Adelaja, S. (2017). *The Danger of Monoculturalism in The Xxi Century*. London.
- Adp. (2021, January 6). Felix Siauw Ungkap Kronologi Setop Serial Animasi Nussa. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210106122504-220-590112/felix-siauw-ungkap-kronologi-setop-serial-animasi-nussa>
- Alsaraireh, M. Y., Kaur, M., & Singh, S. (2020). Critical discourse analysis of gender representation of male and female characters in the animation movie *Frozen*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/349368010>
- Barnouw, E., & Kirkland, C. E. (1992). Entertainment. In R. Bauman (Ed.), *Folklore, cultural performances, and popular entertainments: A communications-centered handbook*. Oxford University Press.
- Decker, J. (2010). *The portrayal of gender in the feature-length films of Pixar Animation Studios: A content analysis* (Doctoral dissertation).
- Dill-Shackleford, K. E., & Dill-Shackleford, K. (2016). *How fantasy becomes reality: Information and entertainment media in everyday life*. Oxford University Press.
- Evra Van, J. (2004). *Television and child development*. Routledge.
- Geiger, J. R. (1923). The effects of the motion picture on the mind and morals of the young. *The International Journal of Ethics*, 34(1), 69–83.
- Green, M. C., Strange, J. J., & Brock, T. C. (Eds.). (2003). *Narrative impact: Social and cognitive foundations*. Taylor & Francis.
- Hill, J. A. (2011). Endangered childhoods: How consumerism is impacting child and youth identity. *Media, Culture & Society*, 33(3), 347–362.
- Hofmann, J. (2018). Pixar films, popular culture, and language teaching: The potential of animated films for teaching English as a foreign language. *Global Studies of Childhood*, 8(3), 267–280.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Hurtado, A., & Silva, J. M. (2008). Creating new social identities in children through critical multicultural

- media: The case of Little Bill. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 120, 17–30.
- Irawanto, B. (2021). Melampaui yang “Remeh-Temeh”: Media Hiburan Sebagai Bidang Kajian Ilmu Komunikasi. In M. Sulhan & L. M. Sadasri (Eds.), *Jagat Komunikasi Kontemporer: Ranah, Riset, dan Realitas*. UGM Press.
- Laveda, M. (2021, January 12). Asal-usul Sarung, Baju Koko, dan Gamis. *Republika*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/islam-digest/mozaik/qmtcpq430/asalusul-sarung-baju-koko-dan-gamis>
- Lee, C. S., & Choi, J. (2018). Early childhood and media representation: How does South Korean animation *Pororo the Little Penguin* reproduce patriarchal family ideology? *Animation*, 13(2), 116–130.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Li-Vollmer, M. (2002). Race representation in child-targeted television commercials. *Mass Communication and Society*, 5(2), 207–228.
- Luke, C. (1990). *Constructing the child viewer: A history of the American discourse on television and children, 1950-1980*. Greenwood Publishing Group.
- Luviani, A., & Delliana, S. (2020). Pengaruh terpaan tayangan animasi *Nussa Official* (Cuci Tangan Yuk) di YouTube terhadap perilaku imitasi anak. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Michaels, F. S. (2011). *Monoculture: How one story is changing everything*. Red Clover Press.
- Muntadliroh, M. (2018). Multicultural communication in Indonesia television: Government control on cultural imperialism. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(1), 260-280.
- Official, Nussa. (2018). *NUSSA: SENYUM ITU SEDEKAH*. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=XHfTYWKfoZw&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=73>
- Official, Nussa. (2019). *NUSSA: BUKAN MAHRAM*. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=tPrXexNi18A&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=54>
- Official, Nussa. (2019). *NUSSA: MERDEKA!!!*. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=bmH0XkSbhAI&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=47>
- Official, Nussa. (2019). *NUSSA: TETANGGAKU HEBAT*. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=wTQK-B5pEJo&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=32>
- Official, Nussa. (2020). *NUSSA: TOLERANSI*. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ve11nzHYmDM&list=PLYc1pO20eF3h6Hb91ZpFXNjKqdYTN0HfM&index=21>

- Perse, E. M., & Lambe, J. (2008). *Media effects and society*. Routledge.
- Sari, R. P. (2021, January 1). 5 Hal Tentang Animasi Nussa yang Berhenti Tayang Akibat Pandemi Corona. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/04/080927666/5-hal-tentang-animasi-nussa-yang-berhenti-tayang-akibat-pandemi-corona?page=all>
- Schumann, D. W. (2003). Media factors that contribute to a restriction of exposure to diversity. In E. Scharrer (Ed.), *The psychology of entertainment media* (pp. 239-257). Erlbaum Psych Press.
- Seman, N. A., Mat Noordin, N. N., & Abdul Razak, F. H. (2018). A qualitative content analysis: The type of animation and elements of nationalism used in animation series of *Upin & Ipin* in episodes: Magic Pimpimpong, Masih Ada Sayang & Kompang Dipalu. *Journal of Media and Information Warfare*, *11*(2), 187-215.
- Shah, S. K., Riaz, A., & Aqeel, A. (2020). The politics of innocence: A semiotic analysis of the Pakistani animated cartoon series *Burka Avenger*. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, *9*(5), 40.
- Shiva, V. (1993). Monocultures of the mind—Understanding the threats to biological and cultural diversity. *Indian Journal of Public Administration*, *39*(3), 237-248.
- Sun, W., & Kwon, J. (2020). Representation of monoculturalism in Chinese and Korean heritage language textbooks for immigrant children. *Language, Culture and Curriculum*, *33*(4), 402–416.
- Wicks, R. H. (2000). *Understanding audiences: Learning to use the media constructively*. LEA.
- Wormer, K., & Juby, C. (2016). Cultural representations in Walt Disney films: Implications for social work education. *Journal of Social Work*, *16*(5), 578–594.
- Zhang, L., & Min, Y. (2013). Effects of entertainment media framing on support for gay rights in China: Mechanisms of attribution and value framing. *Asian Journal of Communication*, *23*(3), 248–267.

